

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM TAJUK RENCANA
SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER 2010**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah



Oleh:

Agus Mulyanto

061224063

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM TAJUK RENCANA
SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER 2010**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah



Oleh:

Agus Mulyanto

061224063

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA, DAN DAERAH
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2011**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM TAJUK RENCANA
SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER 2010**

Di susun oleh:

Agus mulyanto

061224063

Telah disetujui oleh:

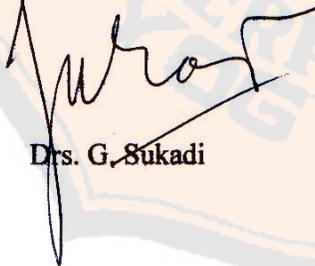
Dosen Pembimbing I



Setya Tri Nugraha, S. Pd., M. Pd

Tanggal 7 Oktober 2011

Dosen Pembimbing II



Drs. G. Sukadi

Tanggal 7 Oktober 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

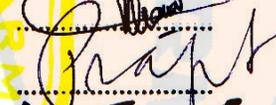
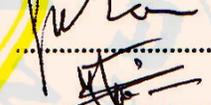
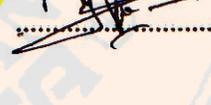
SKRIPSI

POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM TAJUK RENCANA SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER 2010

Dipersiapkan dan disusun oleh
Agus Mulyanto
061224063

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 24 Oktober 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Yuliana Setiyaningsih	
Sekretaris	: Drs. J. Prapta Diharja, S.J., M.Hum	
Anggota	: Setya Tri Nugraha, S.Pd., M.Pd	
Anggota	: Drs. G. Sukadi	
Anggota	: Dr. Y. Karmin, M.Pd	

Yogyakarta, 24 Oktober 2011
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,


Rohandi, Ph.D.


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Moto

Kecantikan itu bukan terletak pada pakaian yang dipakai tetapi bergantung pada keelokan akhlak dan budi pekerti.

(Ali bin Abi Thalib)

Hidup di dunia ini adalah fana, jadi pergunakanlah sebaik-baiknya untuk menyongsong hidup yang sebenarnya di akhirat kelak.

Ad Dei (Goeza)

maiozem Gloriam

Hidup adalah belajar

(Goeza)

Berani karena benar.

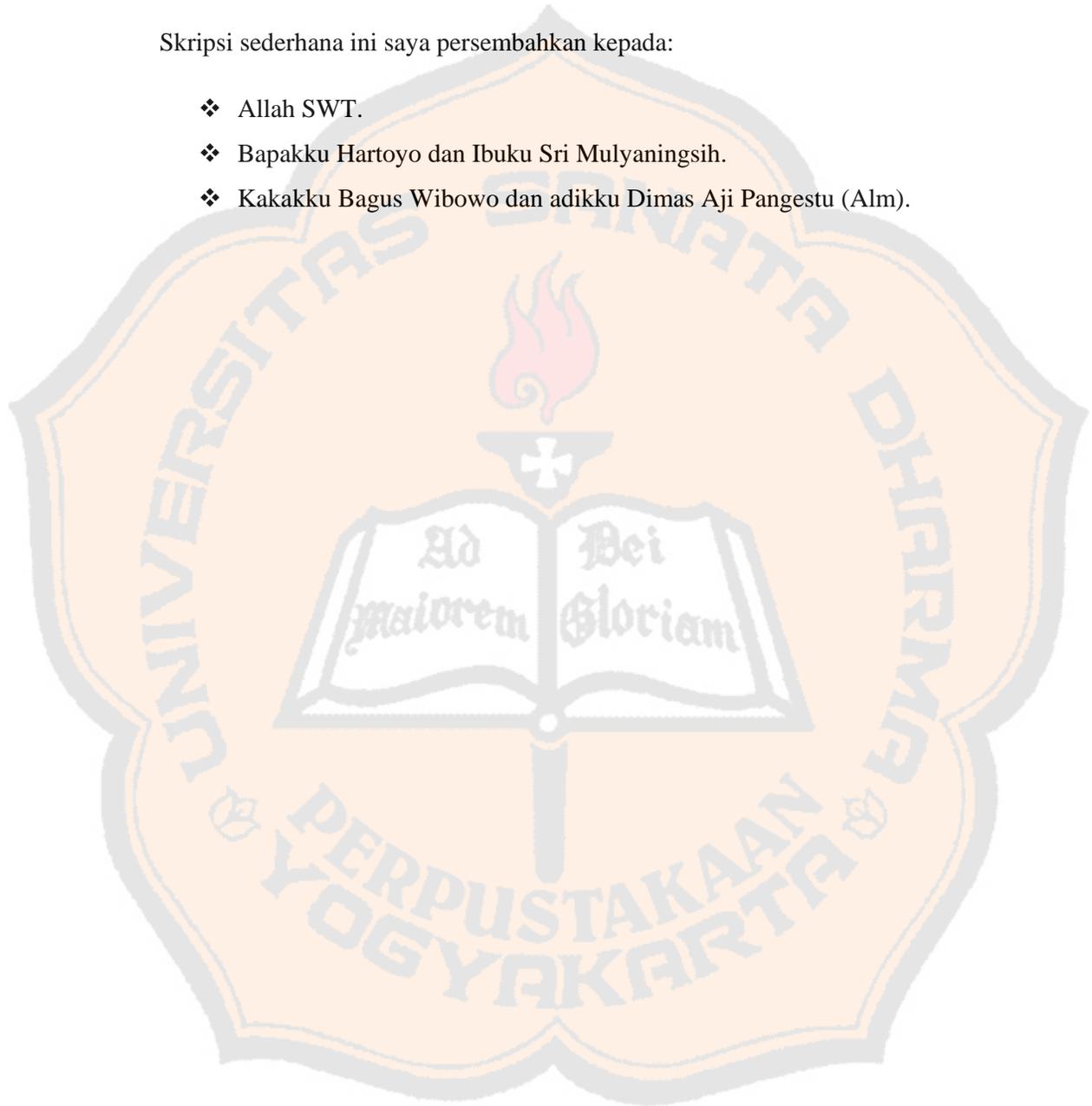
(Joxzin)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Bapakku Hartoyo dan Ibuku Sri Mulyaningsih.
- ❖ Kakakku Bagus Wibowo dan adikku Dimas Aji Pangestu (Alm).



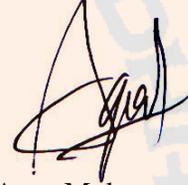
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian dari karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan dalam daftar pustaka, sebagai layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 24 Oktober 2011

Penulis



Agus Mulyanto

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Agus Mulyanto

NIM : 061224063

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DALAM TAJUK RENCANA SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT EDISI OKTOBER 2010

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 24 Oktober 2011

Yang menyatakan



(Agus Mulyanto)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Mulyanto, Agus. 2011. *Pola Pengembangan Paragraf pada Tajuk Rencana Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Edisi Oktober 2010*. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis pengembangan paragraf pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 dan mendeskripsikan penanda pengembangan paragraf pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik catat. Langkah – langkah yang dilakukan dalam analisis data yaitu (1) peneliti membuat kode pada setiap data yang dianalisis, kode yang dibuat berdasarkan hasil temuan, (2) peneliti mencari dan menentukan jenis pengembangan paragraf sekaligus penanda pengembangan paragrafnya, (3) jenis pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf yang telah ditemukan dimasukkan ke dalam tabel – tabel analisis data, (4) peneliti mendeskripsikan hasil analisis data yang telah ditemukan untuk menjawab masalah penelitian dan pemaknaan satuan data.

Peneliti menghasilkan dua temuan, yaitu pola pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf meliputi pola pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, pengembangan paragraf definisi, pengembangan paragraf sebab akibat, pengembangan paragraf pertanyaan, pengembangan paragraf analisis yang terdiri dari analisis tujuan, analisis bukti, analisis alasan, dan analisis cara. Penanda pengembangan paragraf meliputi penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), penanda pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, penanda pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, penanda pengembangan paragraf definisi, penanda pengembangan paragraf sebab akibat, penanda pengembangan paragraf pertanyaan, penanda pengembangan paragraf analisis yang terdiri dari penanda pengembangan paragraf analisis tujuan, analisis bukti, analisis alasan, dan analisis cara.

Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti memberikan saran bagi guru Bahasa Indonesia dan peneliti lain. Guru diharapkan dapat menjadikan tajuk rencana sebagai bahan pembelajaran menulis di sekolah. Bagi peneliti lain diharapkan dapat mencari wacana lain untuk diteliti dan dapat memperluas topik permasalahan penelitian, tidak hanya sebatas peneliti jenis pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragrafnya saja.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

Mulyanto, Agus. 2011. *The Paragraph Development Patterns on Kedaulatan Rakyat Editorial Edition October 2010*. A Thesis. Yogyakarta: Department of Indonesian and Vernacular Language and Literature Education. Teacher Training and Education Faculty. Sanata Dharma University.

This research was aimed to describe the types of the paragraph development patterns on Kedaulatan Rakyat editorial edition October 2010 and to describe the paragraph development markers on Kedaulatan Rakyat editorial edition October 2010.

It was a descriptive qualitative research. The technique used to collect the data was note taking technique. The steps done in the data analysis were (1) the researcher made a code on every data analyzed, the code was created based on the findings, (2) the researcher looked for and decided the types of the paragraph development and the paragraph development markers, (3) the types of the paragraph development and the paragraph development markers were put in the data analysis tables, (4) the researcher described the results of the data analysis to answer the research problems and the meaning of the unit of data.

The researcher found two findings: the pattern of paragraph development and the paragraph development markers. The pattern paragraph development consisted of paragraph development of details and descriptions, paragraph development of comparisons and contrary, paragraph development of examples and illustrations, paragraph development of definitions, paragraph development of causes and effects, paragraph development of questions, paragraph development of analysis that consisted of objective analysis, analysis of evidence, analysis of reason, and analysis of how. The paragraph development markers consisted of paragraph development markers of details and descriptions, paragraph development markers of comparisons and contrary, paragraph development markers of examples and illustrations, paragraph development markers of definitions, paragraph development markers of causes and effects, paragraph development markers of questions, paragraph development of analysis that consisted of objective analysis, analysis of evidence, analysis of reason, and analysis of how.

Based on the findings above, the researcher gave suggestions to the Indonesian teachers and other researchers. Indonesian teachers are expected to make editorial writing as learning materials in schools. Other researchers are supposed to find other discourses to research and expand the topics of the research problems, not only limited to examining the types of the paragraph development and the paragraph development markers.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNYA yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Pengembangan Paragraf pada Tajuk Rencana Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Edisi Oktober 2010”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Sebagai tulisan ilmiah, penulis tidak mampu menyusun dan menyelesaikan tulisan ini tanpa bantuan, bimbingan, dorongan, petunjuk, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini.

1. Setya Tri Nugraha, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing I yang telah sabar mengarahkan dan menyediakan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. G. Sukadi selaku dosen pembimbing II yang telah sabar mengarahkan dan menyediakan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Yuliana Setiyaningih selaku ketua Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Seluruh dosen Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
5. FX. Sudadi yang telah membantu dan melayani penulis dalam berbagai hal yang sifatnya administratif.
6. Kedua orang tuaku tercinta, ayahku Hartoyo dan ibuku Sri Mulyaningsih, yang menjadi sumber semangat bagi penulis dan untuk semua doa yang telah dipanjatkan untuk penulis.
7. Kakakku tersayang, Bagus Wibowo yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dan motivasi bagi penulis.
8. Keluarga besar kakek Kadri Maryono yang telah mendoakan dan membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan studi.
9. Sahabat-sahabatku , Deni, Devid, Prima atas persahabatan, kebersamaan, dan dukungannya.
10. Sahabat-sahabatku di kampung halaman, atas persahabatan, kebersamaan, dan dukungannya.
11. Kekasihku Ana Yuniati, yang telah memberikan semangat, motivasi, dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman PBSID Angkatan 2006 kelas B dan A atas kebersamaan dan dukungannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13. Semua pihak yang terlibat dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sungguh menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 Oktober 2011

Penulis



Agus Mulyanto



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Istilah.....	6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.6 Sistematika Penyajian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1 Penelitian Relevan.....	9
2.2 Kajian Teori.....	10
2.2.1 Paragraf.....	10
2.2.2 Jenis Pengembangan Paragraf.....	10
2.2.3 Penanda Pengembangan Paragraf.....	22
2.2.4 Syarat Paragraf yang Baik.....	34
2.2.5 Ciri atau Karakteristik Paragraf.....	35
2.2.6 Fungsi Paragraf.....	36
2.2.7 Pengertian Tajuk Rencana.....	36
2.2.8 Fungsi Tajuk Rencana.....	37
2.2.9 Jenis – Jenis Tajuk Rencana.....	38
2.2.10 Teknik Menuliskan Tajuk.....	39
2.2.11 Tajuk Rencana yang Baik.....	40
2.3 Kerangka Berpikir.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Sumber Data dan Data Penelitian.....	45
3.3 Instrumen Penelitian.....	45
3.4 Objek Penelitian.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.6 Teknik Analisis Data.....	46
3.7 Triangulasi Data.....	49
BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Hasil Temuan.....	51
4.1.1 Hasil Analisis Data Jenis Pengembangan Paragraf.....	52
4.1.2 Hasil Analisis Data Penanda Pengembangan Paragraf.....	54
4.2 Pembahasan.....	55
4.2.1 Jenis Pengembangan Paragraf.....	56
4.2.2 Penanda Pengembangan Paragraf.....	66
BAB V PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Implikasi.....	84
5.3 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92
BIODATA PENULIS.....	196

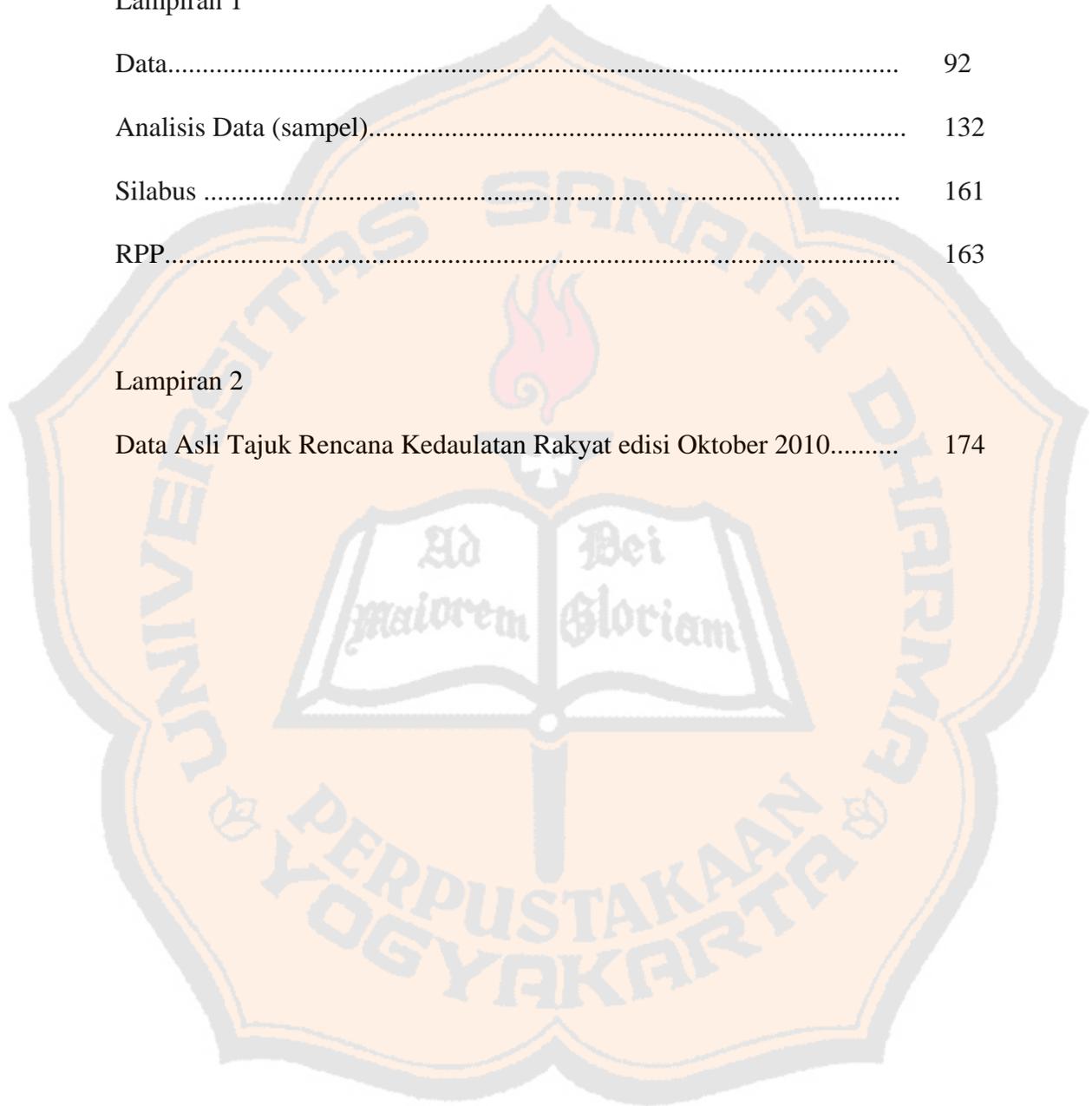
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Data.....	92
Analisis Data (sampel).....	132
Silabus	161
RPP.....	163

Lampiran 2

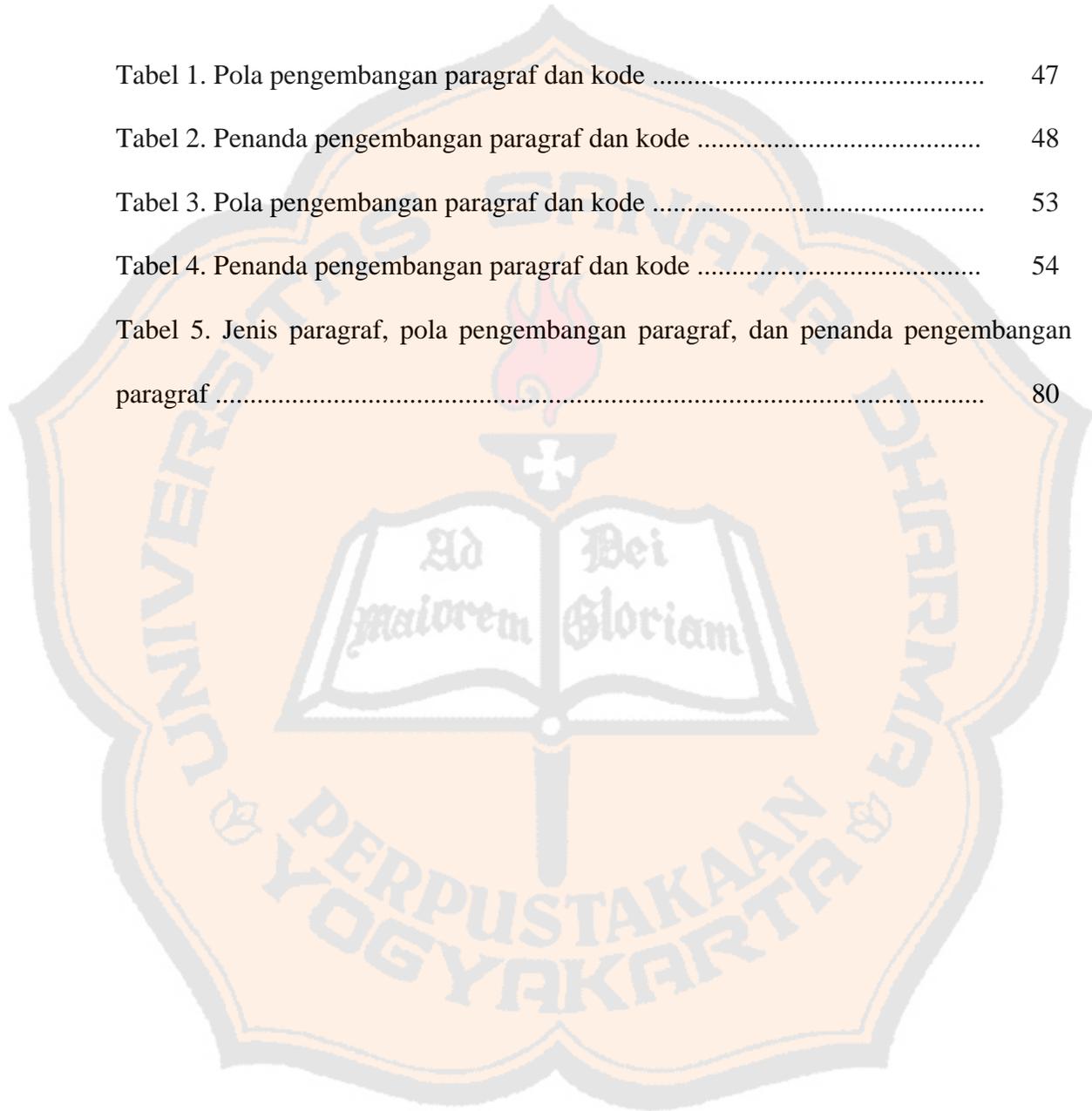
Data Asli Tajuk Rencana Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.....	174
---	-----



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pola pengembangan paragraf dan kode	47
Tabel 2. Penanda pengembangan paragraf dan kode	48
Tabel 3. Pola pengembangan paragraf dan kode	53
Tabel 4. Penanda pengembangan paragraf dan kode	54
Tabel 5. Jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, dan penanda pengembangan paragraf	80



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting bagi manusia. Bahasa digunakan manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Sejak manusia dilahirkan, bahasa sudah digunakan untuk menyampaikan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diinginkan pada sesamanya. Oleh karena itu, bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.

Bahasa sebagai sarana komunikasi dapat berupa bahasa lisan maupun bahasa tulis. Seseorang melalui sarana tersebut dapat mengemukakan pikiran dan keinginannya pada orang lain, mempengaruhi atau dipengaruhi orang lain. Melalui bahasa, orang dapat mengemukakan perasaan, menghubungkan daya khayal, dan secara kreatif dapat memikirkan sesuatu yang baru. Sementara itu, Gorys Keraf (1987: 3) menyatakan bahwa fungsi bahasa meliputi: 1) untuk menyatakan ekspresi diri, 2) sebagai alat komunikasi, 3) sebagai alat untuk mengadakan intregasi dan adaptasi sosial, 4) sebagai alat untuk mengadakan kontrol sosial.

Menurut sarananya, bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu tersebut dibagi atas ragam lisan dan ragam tulisan. Dari kedua ragam tersebut, masyarakat indonesia lebih menguasai bahasa dengan ragam tulisan. Keadaan ini

dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain 1) adanya keterbatasan pemakai bahasa dalam kaidah bahasa tulis, 2) bahasa tulis dianggap sebagai bahasa yang memiliki kaidah atau aturan – aturan yang baku, 3) adanya anggapan orang yang memiliki jenjang pendidikan tinggi cenderung lebih menguasai kaidah ragam bahasa tulis bila dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan rendah.

Sejalan dengan pendapat di atas, sebuah tulisan merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain sehingga seseorang akan lebih mudah menguasai bahasa dengan ragam tulisan (Tarigan, 1984: 3-4). Tetapi perlu diingat, menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, seorang penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosa kata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur (Tarigan, 1984: 4)

Bahasa yang berbentuk ragam tulisan, tentunya sudah banyak kita jumpai dalam berbagai media, baik itu media elektronik ataupun media cetak. Sebagai contoh, pada media elektronik seperti televisi, seseorang memasang sebuah informasi, pengumuman, iklan untuk dipublikasikan kepada pembaca atau penonton. Begitupun juga media cetak, seseorang ingin menginformasikan mengenai suatu berita, memasang iklan, membuat opini menggunakan surat kabar, majalah dan sebagainya.

Salah satu bentuk tulisan yang terdapat dalam media cetak (surat kabar) adalah tajuk rencana. Di dalam sebuah tajuk rencana terdapat opini dari suatu

media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Tajuk rencana juga dapat berisi suatu opini atau pendapat seseorang mengenai sesuatu berita atau permasalahan yang menonjol atau sedang hangat-hangatnya diperbincangkan.

Tajuk rencana adalah salah satu bentuk wacana. Wacana merupakan tataran paling besar dalam hierarki kebahasaan. Sebuah wacana tidak akan pernah lepas dari susunan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat dan akhirnya membentuk sebuah kesatuan menjadi sebuah paragraf. Sebuah paragraf di susun atas kata dan kalimat. Kata atau kalimat yang berposisi sebagai wacana disyaratkan memiliki kelengkapan makna, informasi, dan konteks tuturan yang jelas dan mendukung. Sementara itu, berdasarkan aspek semantisnya, kalimat memiliki makna sebagai serangkaian kata yang menyatakan pikiran dan gagasan yang lengkap dan logis (The Liang Gie dalam Widyamartaya, 1983: 92).

Penelitian ini akan meneliti mengenai pola pengembangan paragraf yang digunakan pada tajuk rencana yang terdapat dalam surat kabar. Telah diuraikan di atas bahwa sebuah tajuk rencana atau editorial adalah salah satu bentuk wacana yang terdapat dalam sebuah surat kabar. Sebuah wacana terbentuk dari paragraf-paragraf dan di dalam paragraf tersebut terdapat sebuah pola-pola paragraf. Hal tersebut yang akan menjadi fokus penelitian.

Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai pola pengembangan paragraf pada tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 adalah 1) sebuah tajuk rencana bisa dijadikan bahan pembelajaran di sekolah. Hal itu terdapat dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ada dalam KTSP

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), misalnya dalam Standar Kompetensi menulis kelas X semester 1 yaitu Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif) sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif. 2) tajuk rencana merupakan tulisan eksposisi dan argumentasi seseorang (redaktur) mengenai suatu masalah atau topik tertentu. Dari hal itu dapat diketahui apakah tulisan argumentasi tersebut memiliki pola pengembangan atau tidak. Hal-hal tersebut yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apa sajakah pola pengembangan paragraf yang terdapat dalam tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010?
2. Apa sajakah penanda pola pengembangan paragraf yang terdapat dalam tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pola pengembangan paragraf pada tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Tujuan penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan pola pengembangan paragraf yang terdapat dalam tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

2. Mendeskripsikan penanda pengembangan paragraf yang terdapat dalam tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada mahasiswa, calon guru bahasa Indonesia, maupun bagi pembaca

Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pola pengembangan paragraf pada sebuah tajuk rencana sebuah surat kabar. Mahasiswa diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan baru tentang pola pengembangan paragraf yang terdapat dalam tajuk rencana sebuah surat kabar, khususnya bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diharapkan, khususnya untuk mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dapat menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai pola pengembangan paragraf.

Bagi calon guru bahasa Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan mengenai berbagai jenis pola pengembangan paragraf pada tajuk rencana sebuah surat kabar. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan dalam pembelajaran. Guru diharapkan dapat menggunakan sebuah tajuk rencana untuk dijadikan sebuah bahan pembelajaran yaitu dengan menganalisis atau menemukan pola pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana tersebut.

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pola pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana sebuah surat kabar.

Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau acuan bagi peneliti. Selanjutnya, berupa bahan referensi penelitian yang relevan mengenai pola pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana sebuah surat kabar.

1.5 Variabel Penelitian dan Batasan Istilah

1.5.1 Variabel Penelitian

Variabel yang akan diteliti adalah pola pengembangan paragraf dalam tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

1.5.2 Batasan Istilah

Beberapa Istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran.

a. Paragraf

Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis dan sistematis yang merupakan satu keatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan (Djago Tarigan, 1987:11).

b. Jenis paragraf

Djago Tarigan (1987:30-34) dalam bukunya yang berjudul *Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya* mengemukakan sembilan jenis paragraf yaitu 1) paragraf deduksi, 2) paragraf induksi, 3) paragraf campuran, 4) paragraf perbandingan, 5) paragraf pertanyaan, 6) paragraf sebab akibat, 7) paragraf contoh, 8) paragraf perulangan, dan 9) paragraf definisi.

c. Pengembangan paragraf

Widyamartaya (1990:40-41) dalam bukunya yang berjudul *Seni Menuangkan Gagasan* mengemukakan tujuh jenis pengembangan paragraf yaitu 1) pengembangan dengan perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan, 3) pengembangan dengan analogi, 4) pengembangan dengan penggolongan dan pembagian, 5) pengembangan dengan contoh dan ilustrasi, 6) pengembangan dengan definisi, 7) pengembangan dengan analisis (sebab, akibat, bukti, manfaat, alasan, dan sebagainya).

d. Pola pengembangan paragraf

Djago tarigan (1987:29) dalam bukunya yang berjudul *Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya* mengemukakan ada tiga pola berpikir dalam pengembangan paragraf yaitu 1) berpolakan umum-khusus (deduktif), 2) berpolakan khusus-umum (induktif), 3) berpolakan campuran seperti umum-khusus-umum dan khusus-umum-khusus.

e. Tajuk Rencana

Tajuk rencana adalah pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol (<http://komdakcommunity.blogspot.com/>).

Tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi

diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan (<http://www.kabarindonesia.com/>).

1.5 Sistematika penyajian

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

Pada bab I diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika penyajian.

Bab II berisi landasan teori, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ini memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III berisi tentang metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, instrumen penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan triangulasi.

Dalam bab IV dipaparkan hasil temuan analisis data dan pembahasan. Hasil temuan ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap semua paragraf yang merupakan data penelitian. Hasil analisis data tersebut kemudian dibahas untuk memecahkan persoalan pada bab I.

Pada bab V dipaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan terhadap hasil analisis data. Kesimpulan inilah yang merupakan hasil penelitian ini. Selain itu, disajikan pula implikasi dari hasil penelitian ini dan saran-saran yang diperlukan bila mengadakan penelitian lanjutan tentang topik penelitian yang sama bagi peneliti lain yang tertarik pada topik ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maria Rini Wahyuni (2000) yang melakukan penelitian dengan judul *Penyimpangan Pengembangan Paragraf dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Tahun 1997*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan jenis penyimpangan pengembangan paragraf dalam tajuk rencana Kompas tahun 1997. Sampel penelitiannya adalah paragraf - paragraf dalam tajuk rencana Kompas tahun 1997. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan mempergunakan sumber – sumber tertulis untuk memperoleh data. Peneliti mengumpulkan tajuk rencana Kompas Desember 1997 sebagai sumber data. Dalam kesimpulannya, Maria Rini Wahyuni mengemukakan bahwa terdapat dua jenis penyimpangan pengembangan paragraf dalam tajuk rencana Kompas. Pertama, gagasan pokok pada satu paragraf dilanjutkan pada paragraf berikutnya. Kedua, adanya penggunaan kata penghubung yang tidak tepat dalam pengembangan paragraf. Dari hasil penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa pengembangan paragraf dalam tajuk rencana Kompas tahun 1997 belum sesuai dengan syarat pengembangan paragraf.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Paragraf

Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis dan sistematis yang merupakan satu keatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan (Djago Tarigan, 1987:11)

2.2.2 Jenis Pengembangan Paragraf

Gorys Keraf (1981) dalam bukunya yang berjudul Eksposisi dan Deskripsi mengemukakan pola-pola paragraf berdasarkan pengembangannya terdiri atas.

1. Eksposisi atau paparan

Eksposisi ialah karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Eksposisi atau pemaparan adalah salah satu bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan dan meguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut (Gorys Keraf, 1981:3). Eksposisi merupakan bentuk retorika yang sering digunakan dalam menyampaikan uraian – uraian ilmiah populer dan uraian-uraian ilmiah lainnya yang tidak berusaha mempengaruhi pendapat orang lain.

Pola pengembangan paragraf ekposisi terdiri dari:

1.1 Pola proses

Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa.

Untuk menyusun sebuah proses, Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

- a. Penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh.
- b. Penulis harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya.
- c. Penulis menjelaskan tiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas.

Contoh:

“Pohon anggur, di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambil daun anggur secukupnya. Lalu, tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan tersebut kita dinginkan dan setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah, kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri”

1.2 Pola Sebab Akibat

Pengembangan paragraf dapat pula dinyatakan dengan menggunakan sebab-akibat. Dalam hal ini sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan gagasan utama, sedangkan untuk memahami sepenuhnya, akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab-akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Bila disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, maka proses itu dapat disebut proses kausal.

Contoh

“Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85 persen. Akibatnya, Impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Sesudah swasembada pangan tercapai pada tahun 1984, pada tahun 1986, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. akan tetapi, pada tahun 1004, neraca perdagangan beras kita tekor 400 ribu ton. Sejak itu, impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton”

1.3 Pola Ilustrasi

Sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkrit. Dalam karangan eksposisi, ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Dalam hal ini pengamatan-pengamatan pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam menjelaskan gagasan-gagasan umum tersebut.

Contoh:

“Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak memahami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65 persen; demikian pula perkebunan, yang meningkat 6,46 persen. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95 persen. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 18,07 persen menjadi 18,04 persen. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sector pertanian merosot dari tahun ke tahun”

2. Narasi

Narasi adalah sejenis karangan yang isinya mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu (secara kronologis). Kejadian yang diceritakan dapat bersifat khayalan atau faktual, atau gabungan dari keduanya. Narasi ini sering digolongkan karangan fiktif, misalnya: roman, novel, cerpen, hikayat, tambo, dan dongeng. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah

pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu (Gorys Keraf, 1985, 135-136). Narasi terdiri dari narasi ekspositoris dan narasi sugestif.

2.1 Narasi Ekspositoris

Narasi ekspositoris bertujuan untuk menggugah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Sasaran utamanya adalah rasio, yaitu berupa perluasan pengetahuan pembaca sesudah membaca kisah tersebut. Narasi menyampaikan informasi mengenai berlangsungnya suatu peristiwa (Gorys Keraf, 1985:136). Narasi ekspositoris dapat bersifat khas atau khusus dan dapat pula bersifat generalisasi.

Narasi ekspositoris yang bersifat khas atau khusus adalah narasi yang berusaha menceritakan suatu peristiwa yang khas, yang hanya terjadi satu kali. Peristiwa yang khas adalah peristiwa yang tidak dapat diulang kembali karena merupakan pengalaman atau kejadian pada suatu waktu tertentu saja. Contoh narasi mengenai pengalaman seseorang masuk perguruan tinggi sedangkan narasi ekspositoris yang bersifat generalisasi adalah narasi yang menyampaikan suatu proses yang umum yang dapat dilakukan siapa saja dan dapat pula dilakukan berulang-ulang. Dengan melaksanakan tipe kejadian itu secara berulang-ulang, maka seseorang dapat memperoleh kemahiran yang tinggi mengenai hal itu (Gorys Keraf, 1985:137). Contoh suatu wacana naratif yang menceritakan bagaimana seseorang menyiapkan nasi goreng.

2.2 Narasi Sugestif

Narasi sugestif merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. Pembaca menarik suatu makna baru di luar apa yang diungkapkan secara eksplisit (Gorys Keraf, 1985: 138). Sesuatu yang eksplisit adalah sesuatu yang tersurat mengenai obyek atau subyek yang bergerak dan bertindak sedangkan makna yang baru adalah sesuatu yang tersirat.

Perbedaan pokok antara narasi ekspositoris dan narasi sugestif (Gorys Keraf, 1985:138-139)

Narasi ekspositoris	Narasi sugestif
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas pengetahuan 2. Menyampaikan informasi mengenai suatu kejadian 3. Didasarkan pada penalaran untuk mencapai kesepakatan rasional 4. Bahasanya lebih condong ke bahasa informatif dengan titik berat penggunaan kata – kata denotatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan suatu makna yang tersirat 2. Menimbulkan daya khayal 3. Penalaran hanya berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan makna sehingga kalau perlu penalaran dapat dilanggar. 4. Bahasanya lebih condong ke bahasa figuratif dengan menitikberatkan penggunaan kata – kata konotatif

3. Deskripsi

Deskripsi atau pemerian merupakan suatu bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian-perincian dari obyek yang sedang dibicarakan (Gorys Keraf, 1981:93). Kata deskripsi berasal dari kata latin *describere* yang berarti *menulis tentang* atau *membeberkan sesuatu hal*. Sebaliknya kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi *pemerian* yang berasal dari kata *peri-memerikan* yang berarti 'melukiskan sesuatu hal'. Berdasarkan tujuannya, deskripsi sekurang-kurangnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau ekspositoris (Gorys Keraf, 1981:94). Dalam deskripsi sugestif penulis bermaksud menciptakan sebuah pengalaman pada diri pembaca, pengalaman karena pengenalan langsung dengan obyeknya. Dengan kata lain, deskripsi sugestif berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap obyek tersebut melalui imajinasi para pembaca. Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis hanya bertujuan untuk memberikan identifikasi atau informasi mengenai obyeknya sehingga pembaca dapat mengenalnya bila bertemu atau berhadapan dengan obyek tadi. Selain itu, deskripsi juga dibagi menjadi dua macam yaitu deskripsi tempat dan deskripsi orang. Deskripsi tempat yaitu menggambarkan atau merincikan tempat, jalannya suatu peristiwa akan lebih menarik atau lebih hidup jika dikaitkan dengan keadaan tempat. Deskripsi orang merincikan atau mendeskripsikan secara jelas atau terperinci mengenai orang tersebut.

Pola pengembangan paragraf deskripsi meliputi pola pengembangan spasial dan pola sudut pandang.

3.1 Pola Spasial

Pola spasial adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan atas ruang dan waktu. Pola ini menggambarkan suatu ruangan dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari bawah ke atas, dari depan ke belakang, dan sebagainya. Uraian tentang kepadatan penduduk suatu daerah dapat dikemukakan dengan landasan urutan geografi (misalnya: dari barat ke timur atau dari utara ke selatan). Deskripsi mengenai sebuah gedung bertingkat dapat dilakukan dari tingkat pertama berturut-turut hingga tingkat terakhir, penggambaran terhadap suasana suatu lingkungan dapat dilakukan mulai dari siang, sore, hingga malam hari.

Contoh:

“Pada malam hari, pemandangan rumah terlihat begitu eksotis. Apalagi dengan cahaya lampu yang memantul dari seluruh penjuru rumah. Dari luar bangunan ini tampak indah, mampu memberikan pancaran hangat bagi siapa saja yang memandangnya. Lampu-lampu taman yang bersinar menambah kesan eksotis yang telah ada. Begitu hangat. Begitu indah”

3.2 Pola Sudut Pandang

Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan tempat atau posisi seorang penulis dalam melihat sesuatu. Pola sudut pandang tidak sama dengan pola spasial. Dalam pola ini penggambaran berpatokan pada posisi atau keberadaan penulis terhadap objek yang digambarkannya itu. Untuk menggambarkan sesuatu tempat atau keadaan, pertama-tama penulis mengambil sebuah posisi tertentu. Kemudian, secara perlahan-lahan dan berurutan, ia menggambarkan benda demi benda yang terdapat dalam tempat itu, yakni mulai dari yang terdekat kepada yang terjauh.

Contoh:

“Sekarang hanya beberapa langkah lagi jaraknya mereka dari tebing diatas jalan. Medasing menegakkan dirinya sambil menguasai ke muka dan ia pun berdiri tiada bergerak sebagai pohon diantara pohon-pohon yang lain. Oleh isyarat yang lebih terang dari perkataan itu maju sekian temannya sejajar dengan dia. Di antara daun kayu tapak kepada mereka tebing tu turun ke bawah; dikakinya tegak pondok, sunyi-mati, tak sedikit jua pun kentara, bahwa dia melindungi manusia yang hidup, pandai bergerak dan bersuara. Di bawahnya kedengaran sebentar-bentar sepi mendengaus dan bintang-bintang itupun kelihatan kekabur-kaburan dalam sinar bara yang kusam. Dari celah-celah dinding pondok keluaran cahaya yang kuning merah, tetapi tiada berupa jauh sinar yang halus itu lenyap dibalut oleh kelam yang maha kuasa. Dikelilingi pondok itu tertegak pedati, ketiganya sunyi dan sepi pula”

4. Argumentasi

Argumentasi adalah sebuah karangan yang berusaha meyakinkan dan membuktikan kebenaran suatu pernyataan, pendapat, sikap, atau keyakinan. Dalam argumentasi ini, suatu gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang akan terpengaruh untuk membenarkan pernyataan, pendapat, dan sikapnya. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara (Gorys Keraf, 1985:3). Melalui Argumentasi, penulis berusaha merangkaikan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam paragraf argumentasi yaitu

4.1 Proposisi

Penalaran (reasoning, jalan pikiran) adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubungkan – hubungkan fakta – fakta atau evidensi – evidensi yang

diketahui menuju kepada suatu kesimpulan (Gorys Keraf, 1985: 5). Penalaran bukan saja dapat dilakukan dengan mempergunakan fakta – fakta yang masih berbentuk polos, tetapi dapat juga dilakukan dengan mempergunakan fakta – fakta yang telah dirumuskan ke dalam kalimat – kalimat yang berbentuk pendapat atau kesimpulan.

4.2 Inferensi dan Implikasi

Tiap proposisi dapat mencerminkan dua macam kemungkinan. Pertama, ia merupakan ucapan – ucapan faktual sebagai akibat dari pengalaman atau pengetahuan seseorang mengenai sesuatu hal. Kedua, proposisi dapat juga merupakan pendapat atau kesimpulan seseorang mengenai sesuatu hal (Gorys Keraf, 1985:6). Kata inferensi berasal dari kata latin *inferre* yang berarti menarik kesimpulan. Kata implikasi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *implicare* yang berarti melihat atau merangkum.

5. Persuasi

Persuasi ialah karangan yang isinya meyakinkan, mengajak atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan-alasan yang kadang-kadang agak emosional. Jika argumentasi berusaha membuktikan kebenaran melalui proses penalaran, maka persuasi berusaha merebut perhatian dan membangkitkan tindakan terhadap pembacanya.

Jadi, jenis pengembangan paragraf menurut Gorys Keraf dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis pengembangan paragraf menurut Gorys Keraf
1. Eksposisi atau paparan terdiri dari pola proses, pola sebab akibat, dan pola ilustrasi
2. Narasi terdiri dari narasi ekspositoris dan narasi sugestif
3. Deskripsi terdiri dari pola spasial dan pola sudut pandang.
4. Argumentasi
5. Persuasi

Widyamartaya (1990: 39-41) dalam bukunya berjudul *Seni Menuangkan Gagasan* mengemukakan tujuh jenis pengembangan paragraf yaitu 1) pengembangan dengan perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan, 3) pengembangan dengan analogi, 4) pengembangan dengan penggolongan dan pembagian, 5) pengembangan dengan contoh dan ilustrasi, 6) pengembangan dengan definisi, 7) pengembangan dengan analisis (sebab, akibat, bukti, manfaat, alasan, dan sebagainya).

1. Pengembangan dengan perincian dan pelukisan (deskripsi)

Contoh: “Dinding gedung pemufakatan berat berhias daun kelapa dan daun beringin, di sela kertas merah putih. Di dinding sebelah kanan nyata dan jelas tersusun huruf perkataan Pemuda Baru, di dinding sebelah kiri terbaca Kongres Kelima. Bau daun yang segar memenuhi seluruh ruang yang girang gembira nampaknya oleh cahaya lampu listrik yang terang benderang. Di sebelah hadapan ruang itu terlabuh layar ungu berombak – ombak” (STA, Layar Terkembang).

Paragraf di atas terkembang dan hidup karena pelukisan dan perincian.

Dengan pelukisan dan perincian, pancaindera pembaca tergugah dan dalam angan-angan seakan melihat, menyentuh, mencium, mendengar, dan mencecap segala sesuatu yang dilukiskan.

2. Pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan

Contoh: “Penyair, dramawan, dan novelis bebas untuk mengembangkan daya khayal mereka seluas – luasnya menurut kehendak mereka. Akan tetapi, sejarawan tidak dapat menggunakan kebebasan seluas itu. Sejarawan dapat menunaikan tugasnya sebagai seniman hanya dalam batas – batas yang sangat ketat. Ia tidak dapat mereka-reka apa yang terjadi dalam pikiran seorang tokoh. Penyair dapat. Ia tidak dapat menghapuskan tokoh – tokoh kecil yang tak menyenangkan dan menciptakan sendiri – sendiri tokoh lain yang menggarisbawahi makna karyanya secara lebih berarti”

Pikiran utama yang terkandung dalam kalimat kedua dikembangkan dengan perbandingan-pertentangan.

3. Pengembangan dengan analogi

Contoh: “Di atas mantel, hanya 43,2 kilometer dari permukaan bumi, terdapatlah kerak bumi, tempat kehidupan dapat berkembang. Bagaimanakah rupa kerak itu? Kerak itu dapat digambarkan seperti buih mengeras yang terbentuk di atas periuk bubur yang sedang mendidih. Dari api yang memanasi tengah periuk, panas memancar tidak hanya ke atas tetapi ke segala arah”

Paragraf di atas dikembangkan dengan analogi. Kerak bumi dianalogikan dengan terjadinya kerak bubur.

4. Pengembangan dengan penggolongan dan pembagian

Contoh: “Berdasarkan makanannya, binatang digolongkan menjadi 3 jenis yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah binatang pemakan tumbuhan, contohnya kambing, kerbau, kuda dan sebagainya. Karnivora adalah binatang pemakan daging, contohnya harimau, kucing, serigala, dan sebagainya. Omnivora adalah binatang pemakan segala makanan, contohnya ayam, bebek, dan sebagainya”

Paragraf di atas dikembangkan dengan penggolongan dan pembagian. Binatang digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan makanannya.

5. Pengembangan dengan contoh dan ilustrasi

Contoh: “Dalam beberapa bidang ilmu kedokteran, nosologi masih merupakan masalah yang besar. Dalam bidang psikiatri, oleh para ahli sendiri dengan sedih diakui bahwa nama – mana seperti psikosis, neurosis, dan bahkan skizofrenia belum dapat diberi batasan ilmiah secermat-cermatnya. Bahkan nama-nama seperti flu, pilek, atau

selesma masih merupakan nama yang samar-samar dari berbagai macam infeksi pernafasan”

6. Pengembangan dengan definisi

Contoh: ‘Nosologi berhubungan dengan penggolongan penyakit, bagaimana berbagai penyakit dapat digolongkan, diberi nama, dan diberi batasan. Meskipun kelihatannya sangat sederhana, sebenarnya nosologi adalah masalah yang sangat penting dan rumit”

7. Pengembangan dengan analisis

Pengembangan paragraf dengan analisis terdiri dari pengembangan paragraf analisis proses, analisis unsur/bagian, analisis sebab, analisis akibat, analisis bukti, analisis manfaat, analisis alasan, analisis tujuan, analisis cara, analisis sifat dan sebagainya.

Contoh analisis sebab: “Meskipun kelihatannya sangat sederhana, sebenarnya nosologi adalah masalah yang sangat penting dan rumit. TBC tulang dan TBC paru – paru selama bertahun – tahun diteliti dengan seksama sebelum dapat dipastikan sebagai penampilan – penampilan dari pembunuh yang sama. Kankr dengan segala macam bentuknya harus diketahui dengan pasti sebagai satu penyakit yang sama sebelum dapat dicari obatnya”

Dalam paragraf di atas dapat dilihat analisis sebab, menjawab pertanyaan mengapa nosologi itu masalah yang penting dan rumit.

Jadi, jenis pengembangan paragraf menurut A. Widyamartaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis pengembangan paragraf menurut A. Widyamartaya.
1. Pengembangan dengan perincian dan pelukisan (deskripsi).
2. Pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan.

3. Pengembangan dengan Analogi.
4. Pengembangan dengan penggolongan dan pembagian.
5. Pengembangan dengan contoh dan ilustrasi
6. Pengembangan dengan definisi.
7. Pengembangan dengan analisis terdiri dari analisis sebab, analisis akibat, analisis bukti, analisis manfaat, analisis alasan, analisis tujuan, analisis cara, analisis sifat dan sebagainya.

2.2.3 Penanda Pengembangan paragraf

Djago Tarigan (1987: 30-34) dalam bukunya yang berjudul *Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya* mengemukakan sembilan jenis paragraf dan pola pengembangannya serta penandanya yaitu.

a. Paragraf deduksi

Kalimat topik dikembangkan dengan pemaparan ataupun deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. Dengan kata lain, pola pengembangan paragraf deduksi yaitu kalimat topik-kalimat pengembang/kalimat penjelas.

Contoh: Harga sebagian barang pokok bergerak naik. Beras seminggu lalu berharga Rp 200,00/liter kini berubah jadi 225,00/liter. Gula pasir melonjak dari Rp 250,00/kg menjadi Rp 300,00/kg. Terigu kini mencapai Rp 2.500/zak padahal minggu lalu masih Rp 2.250/zak.

b. Paragraf induksi

Paragraf dimulai dengan penjelasan bagian konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat pengembang. Berdasarkan penjelasan itu

pengarang sampai pada kesimpulan umum dinyatakan dengan kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Dengan kata lain, pola pengembangan paragraf deduksi yaitu kalimat pengembang/kalimat penjelas-kalimat topik.

Contoh: Jam meja yang biasanya berdering pukul 08.00 untuk membangunkanku sekali ini membisu karena lupa diputar. Akibatnya saya terlambat bangun. Cepat-cepat saya pergi ke kamar mandi. Ternyata sabun mandi pun sudah habis karena lupa membelinya. Mau sarapan nasi hangus. Mau berpakaian semua baju kotor. Naik angkutan tapi mogok ditengah jalan. Sungguh sial benar nasibku hari ini.

c. Paragraf campuran

Paragraf dapat dimulai dengan kalimat topik disusul kalimat pengembang dan diakhiri kalimat penegas. Sebaliknya, dapat pula kalimat pengembang terbagi dua sebagian di awal, sebagian di akhir paragraf sedangkan kalimat topiknya di tengah. Dengan kata lain, pola pengembangan paragraf campuran yaitu kalimat topik - kalimat pengembang/penjelas - kalimat penegas dan kalimat pengembang/kalimat penjelas - kalimat topik - kalimat pengembang/kalimat penjelas.

Contoh: Gengsi irama dangdut makin meningkat. Bila dahulu irama ini dianggap kampungan, peralatan asal ada dan tempat pertunjukannya pun di daerah pinggiran, maka kini suasana berubah. Irama dangdut tidak lagi dianggap sebagai kampungan. Peralatannya lengkap, megah, dan modern tidak kalah dengan peralatan band pop.

d. Paragraf perbandingan

Kalimat topik berisi perbandingan dua hal, misalnya hal yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkret. Kalimat topik tersebut dikembangkan dengan memperinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Contoh: “Struktur suatu karangan atau buku pada hakikatnya mirip atau bersamaan dengan struktur suatu pohon. Bila pohon dapat diuraikan menjadi pokok (batang), dahan, ranting, dan daun maka karangan pun dapat diuraikan menjadi tubuh (body), bab, anak bab, dan paragraf. Batang sebanding dengan tubuh (body) karangan, cabang sebanding dengan bab, ranting dengan anak bab, dan daun sebanding dengan paragraf”

e. Paragraf pertanyaan

Kalimat topik dalam suatu paragraf dapat pula dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya dan kalimat berita.

Contoh: “Kepala kantor kami, Pak Akhmadi, gelisah. Mengapa beliau gelisah? Tidak puas dengan kedudukannya sekarang? Bukan, bukan itu sebabnya. Ia sangat puas bahkan ingin mempertahankan kedudukannya sekarang. Ia resah karena pimpinan pusat telah mencium ketidakberesan pertanggungjawaban keuangan di kantornya. Banyak pengeluaran yang menyalahi anggaran. Tidak sedikit kuitansi pembelian barang yang meragukan”

f. Paragraf sebab akibat

Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik.

Contoh: “Nilai ujian akhir Cecep pada semester pertama ini rata-rata baik. Dia pantas mendapat nilai tersebut karena ia telah bekerja keras dan tekun. Cecep rajin mengikuti setiap perkuliahan. Ia tidak lupa membaca dua sampai tiga buku tambahan untuk melengkapi setiap mata kuliah. Setiap seminar atau diskusi yang diadakan oleh teman sekelasnya, ia selalu tampil sebagai pembicara”

g. Paragraf contoh

Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh – contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya.

Contoh: “Tes biasanya menilai keterampilan seseorang. Bila kita ingin menilai ketrampilan seseorang dalam mengemudikan mobil, maka orang tersebut disuruh menjalankan mobil: mundur, maju, belok, kencang, lambat, dan seterusnya. Contoh lain menilai kecakapan memotong rambut, maka orang tersebut disuruh memotong rambut seseorang lalu diamati bagaimana caranya memegang gunting, sisir, caranya memotong rambut, menyisirnya, dan lain-lain”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

h. Paragraf perulangan

Kalimat topik dapat pula dikembangkan dengan pengulangan kata/kelompok kata atau bagian-bagian kalimat yang penting.

Contoh: “Ada kaitan yang erat antara makan, hidup, dan berpikir pada manusia. Setiap manusia perlu makan, makan untuk hidup. Namun, hidup tidak hanya untuk makan. Hidup manusia mempunyai tujuan tertentu. tujuan hidup dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya”

i. Paragraf definisi

Suatu paragraf dikembangkan dengan pola definisi adalah pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjernih pengertian tersebut ialah serangkaian kalimat pengembang.

Contoh: “Istilah paragraf sering digunakan baik dalam percakapan maupun praktek. Paragraf kadang – kadang diartikan garis baru, kadang-kadang pembagian karangan atau bagian – bagian. Yang jelas paragraf sebagai wadah pikiran terkecil. Ciri khas paragraf mengandung makna, ide, pesan yang relevan dengan isi karangan. Paragraf harus merupakan kesatuan yang padu dinyatakan dengan kalimat yang tersusun logis dan sistematis. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dfinisi paragraf adalah seperangkat kalimat – kalimat tersusun logis dan sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan me ndukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan”

Jadi, penanda pengembangan paragraf menurut Djago Tarigan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis paragraf	Pola pengembangan
a. Paragraf deduksi	Kalimat topik dikembangkan dengan pemaparan ataupun deskripsi sampai bagian-bagian kecil sehingga pengertian kalimat topik yang bersifat umum menjadi jelas. Dengan kata lain, pola pengembangan paragraf deduksi yaitu kalimat topik-kalimat pengembang/kalimat penjelas.

<p>b. Paragraf induksi</p>	<p>Paragraf dimulai dengan penjelasan bagian konkret atau khusus yang dituangkan dalam beberapa kalimat pengembang. Berdasarkan penjelasan itu pengarang sampai pada kesimpulan umum dinyatakan dengan kalimat topik pada bagian akhir paragraf. Dengan kata lain, pola pengembangan paragraf deduksi yaitu kalimat pengembang/kalimat penjelas - kalimat topik.</p>
<p>c. Paragraf campuran</p>	<p>kalimat topik disusul kalimat pengembang dan diakhiri kalimat penegas. Sebaliknya, dapat pula kalimat pengembang terbagi dua sebagian di awal, sebagian di akhir paragraf sedangkan kalimat topiknya di tengah. Dengan kata lain, pola pengembangan paragraf campuran yaitu kalimat topik - kalimat pengembang/penjelas - kalimat penegas dan kalimat pengembang/kalimat penjelas - kalimat topik - kalimat pengembang/kalimat penjelas.</p>
<p>d. Paragraf perbandingan</p>	<p>kalimat topik berisi perbandingan dua hal, misalnya hal yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkret. Kalimat topik tersebut dikembangkan dengan memperinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian – bagian kecil.</p>
<p>e. Paragraf pertanyaan</p>	<p>Kalimat topik dalam suatu paragraf dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya dan kalimat berita.</p>
<p>f. Paragraf sebab akibat</p>	<p>kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik.</p>
<p>g. Paragraf contoh</p>	<p>kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh – contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya.</p>
<p>h. Paragraf perulangan</p>	<p>kalimat topik dikembangkan dengan pengulangan kata/kelompok kata atau bagian-</p>

<p>i. Paragraf definisi</p>	<p>bagian kalimat yang penting. Pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik dijelaskan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjernih pengertian tersebut ialah serangkaian kalimat pengembang.</p>
-----------------------------	--

Kunjana Rahardi (2006: 48-56) dalam bukunya yang berjudul *Paragraf Jurnalistik* mengemukakan beberapa macam bentuk paragraf jurnalistik dan penandanya yaitu.

1. Paragraf jurnalistik deduktif

Di dalam paragraf jurnalistik jenis deduktif, kalimat utama yang terletak di bagian paling depan paragraf itu dikembangkan dengan pemaparan tertentu, sampai dengan bagian-bagian yang paling kecil. Penyajiannya dimulai dengan sesuatu yang umum sifatnya, kemudian beranjak pada hal-hal khusus, terperinci, mendetail. Dengan demikian, paragraf jurnalistik deduktif mengikuti alur pikiran umum-khusus.

2. Paragraf jurnalistik induktif

Paragraf jurnalistik induktif dimulai dengan penjelasan beberapa hal yang sifatnya khusus, terurai, detail, terperinci. Penjabaran itu kemudian dituangkan ke dalam kalimat-kalimat pengembang yang menempati posisi mulai awal paragraf hingga menjelang akhir paragraf itu. Berdasarkan penjabaran yang terurai itu, penulis membuat simpulan umum, yang kemudian dinyatakan dalam wujud kalimat topik dan diletakkan pada bagian akhir paragraf jurnalistik itu. Paragraf dengan konstruksi demikian ini disebut paragraf jurnalistik induktif. Alur

penalaran khusus-umum digunakan dalam penyusunan paragraf jurnalistik induktif ini.

3. Paragraf jurnalistik abduktif

Paragraf jurnalistik abduktif disebut juga paragraf jurnalistik campuran karena kalimat utama yang dinyatakan di bagian awal paragraf kemudian dikembangkan ke dalam kalimat-kalimat penopang kemudian dinyatakan lagi secara umum dalam bentuk kalimat penegas di akhir paragraf. Kalimat penegas yang dinyatakan di bagian akhir paragraf itu bukanlah kalimat topik. Paragraf jurnalistik seperti ini disebut paragraf campuran atau alinea kombinasi.

4. Paragraf jurnalistik komparatif

Paragraf jurnalistik komparatif dapat disusun dengan cara membandingkan atau mengkomparasikan dua macam hal yang terdapat dalam kalimat utama paragraf. Misalnya saja, dalam kalimat topik itu terdapat sesuatu yang bersifat abstrak, maka sesuatu yang abstrak itu dikomparasikan dengan sesuatu yang tidak abstrak, hingga perincian-perincian paling kecil. Paragraf seperti ini disebut paragraf jurnalistik deduktif perbandingan atau paragraf deduktif komparatif. Adapun kalimat topik yang berisi dua hal atau lebih yang dikomparasikan itu terletak di akhir paragraf, maka paragraf itu disebut paragraf jurnalistik induktif perbandingan atau alinea induktif komparatif. kata-kata yang biasa digunakan yaitu *sejalan dengan, serupa dengan, sama saja, demikian juga, sesuai dengan, hampir sama dengan, seperti halnya, sama dengan, meyerupai, seperti, ibarat, bak*. Jika penulis bermaksud mempertentangkan, maka paragraf tersebut disebut paragraf jurnalistik kontradiktif. Kata-kata yang biasa digunakan adalah *meskipun,*

akan tetapi, lain halnya dengan, tidak sama dengan, kurang dari, di pihak lain, sebaliknya, sedangkan, bertentangan dengan, berlawanan dengan, berbeda dengan.

5. Paragraf jurnalistik pertanyaan

Kalimat topik dalam sebuah paragraf jurnalistik tidak selalu merupakan kalimat pernyataan. Jadi kalimat pokok itu tidak selalu berbentuk kalimat deklaratif. Ada kalanya kalimat topik itu berupa kalimat pertanyaan yang kemudian dijawab terperinci lewat kalimat-kalimat berikutnya yang merupakan sosok penjelas, penopang, atau pengembangnya. Paragraf jurnalistik dengan kalimat topik yang berupa pertanyaan demikian ini disebut paragraf jurnalistik pertanyaan. Apabila pertanyaan itu diletakkan di akhir paragraf, maka disebut paragraf jurnalistik induktif pertanyaan. Apabila kalimat topik paragraf itu ditempatkan di awal dan ditegaskan kembali pada akhir paragraf, maka disebut paragraf jurnalistik abduktif pertanyaan.

6. Paragraf jurnalistik sebab akibat

Paragraf jurnalistik yang dikembangkan dengan cara sebab akibat ini dapat disebut paragraf jurnalistik kausal. Paragraf jurnalistik sebab akibat tersusun dari sebuah kalimat topik yang menunjukkan sebab-sebab dari hal-hal tertentu, kemudian akibat-akibatnya dijabarkan dalam kalimat-kalimat penjelas atau pengembangnya. Biasanya dalam sebuah paragraf jurnalistik sebab akibat, akibat sebab itu dipaparkan terinci terlebih dahulu di bagian depan paragraf, kemudian baru dirumuskan sebabnya di akhir paragraf. Paragraf jurnalistik yang berpola induktif ini disebut paragraf jurnalistik akibat sebab. Kata-kata yang biasa

digunakan adalah *oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan pertimbangan bahwa, dengan alasan itu, dengan alasan ini, pengalaman membuktikan bahwa, karena.*

7. Paragraf jurnalistik contoh

Paragraf jurnalistik contoh disusun dengan cara menjabarkan kalimat topiknya dengan memakai aneka contoh. Contoh-contoh tersebut tersusun dalam kalimat-kalimat pengembang. Paragraf jurnalistik seperti ini disebut dengan paragraf jurnalistik deduktif contoh. Apabila contoh-contoh yang tersusun dalam kalimat pengembang ditempatkan mendahului kalimat topik, maka paragrafnya disebut paragraf induktif contoh.

8. Paragraf jurnalistik pengulangan

Paragraf jurnalistik pengulangan disusun dengan cara memberikan pengulangan-pengulangan tertentu pada kata-kata kuncinya, pada bagian-bagian kalimat tertentu yang terdapat dalam kalimat topik paragraf jurnalistik itu. Pengulangan itu dimaksudkan untuk menunjukkan sejumlah pementingan atau penonjolan. Satu hal sangat mendasar yang harus dicatat dalam rangka menyusun paragraf jurnalistik pengulangan atau alinea jurnalistik repetisi ini adalah pengulangan itu harus dilakukan dengan wajar dan proporsional. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan hingga menjadi sebuah kelatahan perbilangan.

9. Paragraf jurnalistik definisi

Paragraf jurnalistik jenis definisi disusun dengan cara memberikan penjelasan atau pendefinisian atas pengertian tertentu terhadap kata-kata kunci atau bagian-bagian kalimat tertentu yang terdapat dalam kalimat topik itu.

Terdapat lima jenis definisi yaitu definisi nominal, definisi formal, definisi operasional, definisi paradigmatis, dan definisi luas.

9.1 Definisi nominal merupakan definisi yang menunjuk pada pengertian singkat, misalnya *manusia ialah ciptaan Tuhan*,

9.2 Definisi formal ialah definisi yang disusun atas dasar logika atau penalaran, misalnya *manusia merupakan makhluk bermartabat dan berakal budi*,

9.3 Definisi operasional atau definisi kerja merupakan definisi yang dijadikan pedoman atau tuntunan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, misalnya *penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan linguistik yang telah dirumuskan sebelumnya*.

9.4 Definisi paradigmatis adalah definisi yang disusun berdasarkan paradigma atau kerangka berpikir tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi pola berpikir orang lain.

9.5 Definisi luas adalah definisi yang berisi gagasan yang diuraikan secara luas atau panjang lebar supaya benar-benar menjadi jelas.

10. Paragraf jurnalistik perincian

Paragraf jurnalistik perincian atau yang sering disebut juga paragraf jurnalistik rincian biasanya tidak memiliki pokok bahasan tertentu yang sifatnya khusus. Dapat juga dikatakan bahwa paragraf jurnalistik perincian tidak memiliki kalimat utama.

11. Paragraf jurnalistik kronologis

Paragraf jurnalistik kronologis disusun dengan cara mengurutkan kejadian atau peristiwa yang ada. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pertama

disampaikan pertama dan kejadian yang terjadi kemudian dituliskan di akhir. Paragraf jurnalistik seperti ini sangat baik digunakan untuk menyusun tulisan jurnalistik yang bertautan dengan biografi seseorang sejarah perusahaan, urutan kerja, riwayat hidup, dan kronologi peristiwa. Kata-kata yang biasa digunakan adalah *mula – mula, akhirnya, dalam peristiwa itu, sementara, sebelum, bila, ketika itu, pada waktu itu, sekarang ini, dewasa ini, peristiwa itu diawali dengan, dalam peristiwa itu, pada hari itu, selama itu, proses itu diawali, dilanjutkan dan diakhiri, peristiwa itu diakhiri dengan, selanjutnya, sejak itu.*

12. Paragraf jurnalistik deskriptif spasial

Paragraf jurnalistik deskriptif spasial dipakai untuk menggambarkan tempat atau lokasi tertentu. penulis harus secara urut dan runtut mendeskripsikan bagian-bagian dari ruang yang ada dengan menempatkan dimensi tertentu secara loyal. Kata-kata yang biasa digunakan adalah di persimpangan, di hadapan, di sisi, di seberang, ke atas, ke samping, belok kiri, ke depan, belok kanan, berseberangan, bertolak belakang, berhadapan, di luar, di dalam dan sebagainya.

13. Paragraf jurnalistik perkiraan atau peramalan

Perkiraan atau peramalan secara umum dapat dibedakan menjadi dua yakni yang sifatnya ilmiah dan tidak ilmiah. Perkiraan atau peramalan yang sifatnya ilmiah didasarkan pada alur pikir ilmiah sedangkan perkiraan atau ramalan yang tidak ilmiah didasarkan pada sesuatu yang sifatnya tidak ilmiah. Kata-kata yang biasa digunakan adalah ditaksir, sangat mungkin, boleh jadi, dapat diproyeksikan, mungkin, diduga, akan, barangkali, kemungkinan.

Jadi, penanda pengembangan paragraf menurut Kundjana Rahardi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Jenis pengembangan paragraf	Penanda pengembangan paragraf
1. Paragraf jurnalistik deduktif	1.1 alur pikiran/penalaran umum-khusus, terperinci, mendetail. 1.2 Kalimat utama terletak di awal paragraf.
2. Paragraf jurnalistik induktif	2.1 Alur pikiran/penalaran khusus-umum. 2.2 Kalimat utama terletak di akhir paragraf.
3. Paragraf jurnalistik abduktif	3.1 Kalimat utama pada awal paragraf ditegaskan kembali pada akhir paragraf. 3.2 Kalimat utama biasanya terletak pada awal dan akhir paragraf.
4. Paragraf jurnalistik komparatif	4.1 Terdapat perbandingan antara hal yang bersifat abstrak dengan hal yang bersifat konkret. 4.2 Kata-kata yang biasa digunakan: sejalan dengan, serupa dengan, sama saja, demikian juga, sesuai dengan, hampir sama dengan, menyerupai, seperti, ibarat. 4.3 Jika mempertentangkan dua hal, kata-kata yang biasa digunakan: meskipun, akan tetapi, lain halnya dengan, tidak sama dengan, kurang dari, di pihak lain, sebaliknya, sedangkan, bertentangan dengan, berlawanan dengan, berbeda dengan.
5. Paragraf jurnalistik pertanyaan	5.1 Kalimat topik berupa kalimat tanya 5.2 Biasanya terdapat kata tanya (apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana).

<p>6. Paragraf jurnalistik sebab akibat</p>	<p>6.1 Sebab dipaparkan terlebih dahulu kemudian akibatnya pada kalimat penjelas.</p> <p>6.2 Kata-kata yang biasa digunakan: oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan pertimbangan bahwa, dengan alasan itu, dengan alasan ini, pengalaman membuktikan bahwa, karena.</p>
<p>7. Paragraf jurnalistik contoh</p>	<p>Kalimat topik dijabarkan dengan contoh-contoh.</p>
<p>8. Paragraf jurnalistik pengulangan</p>	<p>Ada pengulangan pada kata-kata kunci.</p>
<p>9. Paragraf jurnalistik definisi</p>	<p>9.1 Ada penjelasan dan pendefinisian terhadap kata-kata kunci.</p> <p>9.2 Tidak memiliki kalimat utama.</p>
<p>10. Paragraf jurnalistik perincian</p>	<p>Ada perincian-perincian terhadap suatu hal.</p>
<p>11. Paragraf jurnalistik kronologis</p>	<p>11.1 Ada urutan peristiwa (narasi)</p> <p>11.2 Kata-kata yang biasa digunakan: mula-mula, akhirnya, dalam peristiwa itu, sementara, sebelum, bila, ketika itu, pada waktu itu, sekarang ini, dewasa ini, peristiwa itu diawali dengan, dalam peristiwa itu, pada hari itu, selama itu, proses itu diawali, dilanjutkan dan diakhiri, peristiwa itu diakhiri dengan, selanjutnya, sejak itu.</p>
<p>12. Paragraf jurnalistik deskriptif spasial</p>	<p>12.1 Menggambarkan tempat atau lokasi tertentu.</p> <p>12.2 Secaraurut dan runtut mendeskripsikan bagian-bagian dari ruang yang ada dengan menempatkan dimensi tertentu secara loyal.</p>

<p>13. Paragraf jurnalistik perkiraan atau peramalan</p>	<p>12.3 Kata-kata yang biasa digunakan adalah di persimpangan, di hadapan, di sisi, di seberang, ke atas, ke samping, belok kiri, ke depan, dan sebagainya.</p> <p>13.1 Adanya perkiraan atau ramalan terhadap hal tertentu.</p> <p>13.2 Kata-kata yang biasa digunakan: ditaksir, sangat mungkin, boleh jadi, dapat diproyeksikan, mungkin, diduga, dan sebagainya.</p>
--	--

2.2.4 Adapun syarat-syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut.

a. Kesatuan

Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama dan semua kalimat dalam paragraf itu harus berkaitan dengan gagasan utama. Paragraf dikatakan mempunyai kesatuan jika kalimat-kalimat dalam paragraf itu tidak terlepas atau selalu relevan dengan gagasan utama itu

b. Kepaduan

Kalimat-kalimat yang membangun paragraf itu harus mempunyai hubungan timbal balik sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis. Jadi, kepaduan (koherensi) ditentukan oleh hubungan antarkalimat dalam paragraf itu.

c. Kelengkapan

Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama.

Pikiran utama adalah ide pokok atau gagasan yang menjiwai isi paragraf yang dijelaskan dengan beberapa pikiran penjelas. Pikiran utama merupakan pokok persoalan yang dipentingkan dalam paragraf dan dituangkan dalam kalimat utama. Untuk mengetahui gagasan utama kita harus membaca paragraf secara berulang-ulang dan mencermati bagian awal dan akhir paragraf.

2.2.5 Ciri atau karakteristik paragraf menurut Djago Tarigan (1987:11) yaitu 1) setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan, 2) paragraf dibangun oleh sejumlah kalimat, 3) paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran, 4) paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padat, 5) kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis.

2.2.6 Fungsi paragraf menurut Djago Tarigan (1987:12) adalah sebagai berikut.

- a. Penampung fragmen pikiran atau ide pokok.
- b. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran pengarang.
- c. Alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis.
- d. Pedoman bagi pembaca mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang.
- e. Alat untuk penyampai fragmen pikiran atau ide pokok pengarang kepada para pembaca.
- f. Sebagai penanda bahwa pikiran baru dimulai.

- g. Keseluruhan karangan paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup (konklusi).

2.2.7 Tajuk Rencana

Setiap surat kabar hampir pasti terdapat satu halaman untuk pendapat atau opini. Ada yang menyebut halaman pendapat atau halaman opini. Pada halaman tersebut terdapat tajuk rencana (editorial), surat pembaca, pojok atau tulisan atas nama (by line story), artikel-artikel dari penulis atau ilmuwan, dan blok pengelola surat kabar. Penyediaan satu halaman penuh, bahkan ada yang dua halaman (harian Kompas) untuk pendapat atau opini semata – mata dilandaskan kepada praktek jurnalistik, untuk memisahkan mana yang fakta dan mana yang opini (Kardiyat Wiharyanto, 2005: 50).

Diantara isi halaman opini, yang paling utama adalah tajuk rencana. Tajuk rencana sebelumnya disebut sebagai induk karangan. Istilah tersebut berasal dari bahasa Belanda *Hoofd artikel* atau dalam bahasa Inggris *leader*. Oleh karena itu, penulis tajuk rencana atau editorial disebut *Leader Writer*

Menurut Lyle Spencer dalam bukunya berjudul *Editorial Writing* via Kardiyat Wiharyanto menjelaskan bahwa tajuk rencana adalah pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, dan menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan interpretasi terhadap suatu berita yang menonjol sebegitu rupa sehingga bagi kebanyakan pembaca surat kabar akan menyimak pentingnya arti berita yang ditajukkan itu. Berdasarkan pengertian tajuk rencana di atas, maka tajuk rencana mempunyai ciri-ciri 1) berisi pendapat 2) logis 3) singkat 4) menarik dan 5)

bertujuan mempengaruhi pendapat. Dengan demikian, tajuk rencana haruslah ada pendapat, logis, dan ditulis secara menarik serta singkat.

2.2.8 Fungsi tajuk rencana

Menurut Kardiyat Wiharyanto, (2005: 52), fungsi tajuk rencana adalah

- a. Penjelas suatu berita atau peristiwa. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan apa arti kebijakan yang diambil dan apa akibatnya kepada masyarakat. Penjelasan itu merupakan interpretasi yang bebas dari penulis.
- b. Mengisi latar belakang, yaitu memberikan kaitan sesuatu berita dengan kenyataan-kenyataan sosial lainnya. Penulis bisa melengkapi dengan faktor-faktor lain yang melatarbelakanginya sehingga pembaca akan memiliki pemahaman yang lebih luas.
- c. Meramalkan masa depan. Penulis mencoba memberikan ramalan apa yang akan terjadi sehingga pembaca bisa berjaga-jaga atau memanfaatkan sesuatu di masa mendatang.
- d. Meneruskan suatu penilaian moral. Masyarakat menganggap bahwa tajuk rencana mencerminkan suara hati nuraninya. Penulis memberikan penilaian dan sikapnya atas sesuatu kejadian.

Jika diamati dari segi tulisan, tajuk-tajuk yang didominasi oleh ketiga fungsi tersebut umumnya merupakan tajuk-tajuk yang panjang. Hal ini disebabkan karena penulis sering terjerumus kepada analisa dan penguraian yang meminta ruang banyak. Sebaliknya jenis tajuk yang menggunakan fungsi keempat cenderung pendek dan langsung pada permasalahan.

2.2.9 Jenis – jenis tajuk rencana

- a. Bersifat memberi informasi. Tajuk yang bersifat memberi informasi biasanya bersifat analitis dan kemudian memberikan argumentasi mengapa sampai terjadi suatu hal dan apa akibatnya.
- b. Bersifat menjuruskan timbulnya aksi disebabkan tiadanya masyarakat untuk melakukan aksi. Si penulis tajuk ini bermaksud menjuruskan timbulnya tindakan secara cepat.
- c. Bersifat jihat. Tajuk semacam ini umumnya datang berturut-turut, dan dengan sikap yang jelas untuk mengadakan perubahan. Misalnya tajuk-tajuk rencana yang terus menerus anti judi atau kemudian menghapuskan judi.
- d. Bersifat membujuk. Tajuk itu secara halus ditujukan kepa masyarakat untuk mengambil tindakan atau membentuk pendapat umum.
- e. Bersifat memuji. Tajuk jenis ini bertolak belakang dengan tajuk yang mendorong aksi. Tajuk yang memuji ditujukan untuk memuji atau memberikan pujian atas suatu prestasi yang terjadi di masyarakat.
- f. Bersifat menghibur. Isinya semata-mata sebagai suatu hiburan dan sering dikaitkan dengan *human interest story*, misalnya meninggalnya gajah jantan di Gembira Loka.

2.2.10 Teknik menuliskan tajuk

Teknik menulis tajuk berbeda dengan menulis berita. Jika dalam penulisan berita sudah ada pola dan pedoman pemisahan fakta dengan opini dan harus obyektif. Tidak demikian halnya dengan penulisan tajuk rencana.

Tajuk rencana umumnya mempunyai tulisan opini dan harus mempunyai kedalaman analisa. Karena itu seorang penulis tajuk rencana haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan didukung dengan pemilikan sumber. Di samping itu, seorang penulis tajuk haruslah seorang yang berkepala dingin dan tidak berprasangka. Ia mampu berbahasa baik, menggunakan analisa logis, dan memiliki sikap yang mantap dalam mengemukakan argumentasinya. Ia harus mampu menjaga jangan sampai debatnya bersifat pribadi dan tidak lugas.

Teknik penulisan tajuk rencana haruslah dipahami agar tajuk rencana yang ditulisnya ada harganya untuk dibaca dan bukan semata-mata suatu analisa yang panjang lebar tetapi tanpa memberikan sikap. Oleh karena itu, tajuk rencana yang baik adalah yang berisi pendapat, logis, dan ditulis secara menarik serta singkat.

2.2.11 Tajuk rencana yang baik menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dalam bukunya yang berjudul *Jurnalistik Teori dan Praktik* (2005: 249) memuat hal-hal berikut ini.

- a. Pernyataan masalah pokok atau topik
- b. Alasan mengapa hal yang diangkat dalam tajuk rencana itu penting
- c. Penyajian fakta – fakta yang bersangkutan dengan topik
- d. Pernyataan sikap yang diambil terhadap topik tersebut

- e. Evaluasi terhadap mereka yang mengambil sikap lain
- f. Pernyataan alternatif lain
- g. Pembuatan perbandingan atau analogi dengan isu – isu atau topik – topik lain
- h. Kesimpulan

Menurut <http://komdakcommunity.blogspot.com/>, tajuk rencana adalah pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis, menarik ditinjau dari segi penulisan dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat, atau memberikan interpretasi diri terhadap suatu berita yang menonjol. Tajuk rencana adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan

Menurut <http://www.kabarindonesia.com/>, tajuk rencana mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan medianya bisa harian (*daily*), atau mingguan (*weekly*), atau dua mingguan (*biweekly*) dan bulanan (*monthly*).
2. Isinya menyikapi situasi yang berkembang di masyarakat luas baik itu aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, atau olah raga bahkan entertainment, tergantung jenis liputan medianya.
3. Memiliki karakter atau konsistensi yang teratur, kepada para pembacanya terkait sikap dari media massa yang menulis tajuk rencana.

4. Terkait erat dengan policy media atau kebijakan media yang bersangkutan.

Karena setiap media mempunyai perbedaan iklim tumbuh dan berkembang dalam kepentingan yang beragam, yang menaungi media tersebut.

Menurut <http://komdakcommunity.blogspot.com>, secara terperinci maksud penulisan tajuk rencana yaitu.

1. Menjelaskan berita.

Surat kabar tersebut bebas memberikan interpretasi untuk menjelaskan suatu berita kepada masyarakat.

2. Mengisi latar belakang.

Mengarahkan pada berita-berita yang berkaitan dengan kenyataan-kenyataan sosial.

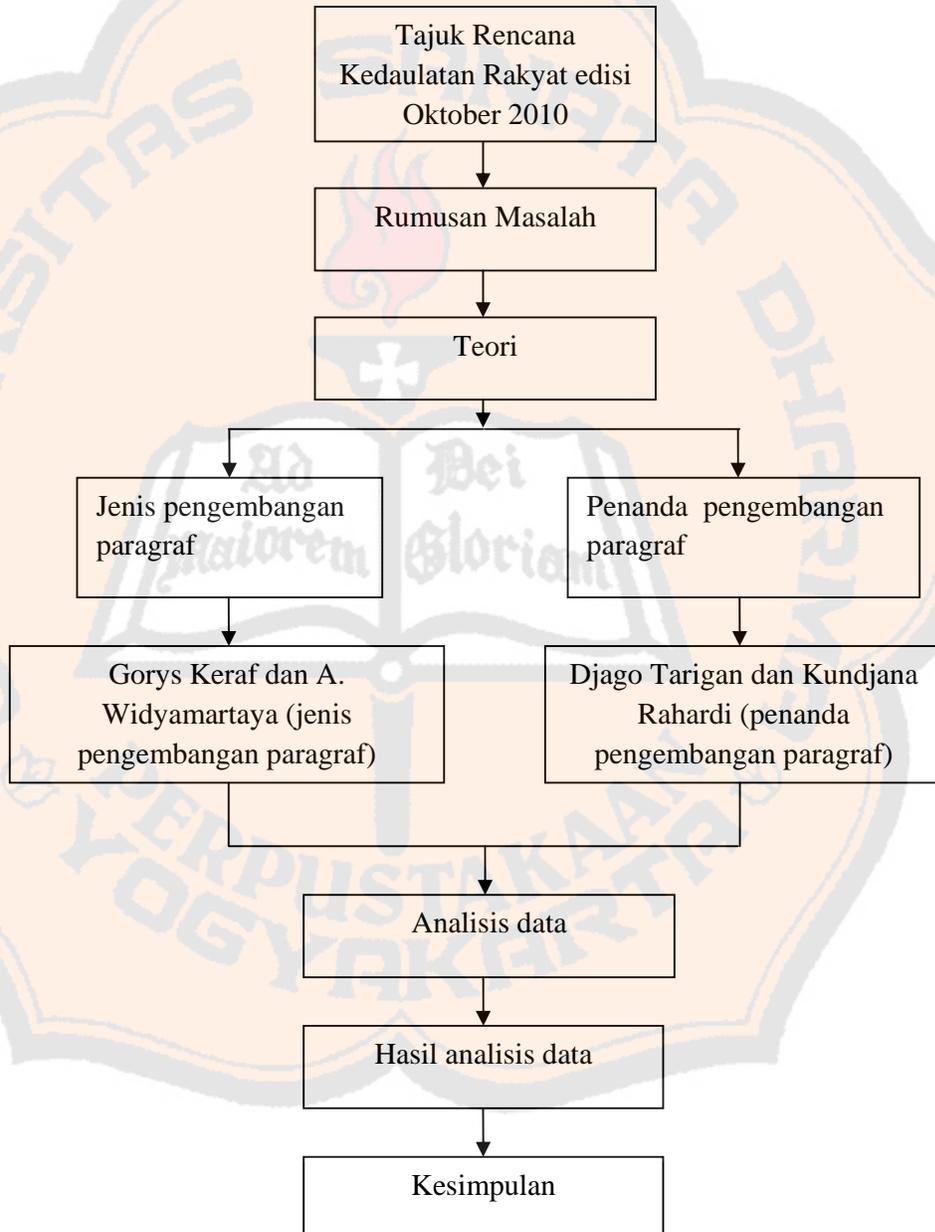
3. Meramalkan masa depan.

Penulis tajuk rencana meramalkan apa yang akan terjadi masa mendatang dengan latar belakang kejadian yang tengah terjadi.

4. Merumuskan suatu penelitian sosial.

penulis tajuk rencana memberikan penilaian atau argumentasi terhadap suatu kejadian, berita atau peristiwa tertentu yang tengah terjadi.

2.3 Dalam penelitian ini digunakan skema kerangka berpikir untuk memperjelas penggunaan teori – teori. Selain itu, untuk pembandingan antara hasil analisis dengan teori yang digunakan. Berikut ini skema kerangka berpikir.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab III ini terdiri dari tujuh sub bab. Ketujuh sub bab itu adalah jenis penelitian, sumber data, instrumen penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan triangulasi. Ketujuh hal tersebut dijelaskan secara terperinci dalam setiap sub bab berikut ini.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya berdasarkan fakta – fakta yang ada untuk dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta tidak ada maksud untuk mencari atau menjelaskan hubungan – hubungan, membuat ramalan (Nazir, 1983: 63).

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007: 4), penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Melalui metode deskriptif kualitatif ini, peneliti melakukan analisis terhadap tulisan tajuk rencana yang terdapat dalam surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata – kata jenis – jenis pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf pada tulisan tajuk rencana Surat Kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

3.2 Sumber Data dan Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, yaitu tajuk rencana harian/surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Data penelitian berupa tulisan/wacana berparagraf yang terdapat dalam tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

Sumber – sumber data tersebut adalah sebagai berikut 1) surat kabar Kedaulatan rakyat tanggal 2 Oktober 2010, tanggal 4 Oktober 2010, tanggal 5 Oktober 2010, tanggal 6 Oktober 210, tanggal 7 Oktober 2010, tanggal 8 Oktober 2010, tanggal 9 Oktober 2010, tanggal 11 Oktober 2010, tanggal 12 Oktober 2010, tanggal 13 Oktober 2010, tanggal 14 Oktober 2010, tanggal 16 Oktober 2010, tanggal 18 Oktober 2010, tanggal 19 Oktober 2010, tanggal 20 Oktober 2010, tanggal 21 Oktober 2010, tanggal 22 Oktober 2010, tanggal 25 Oktober 2010, tanggal 26 Oktober 2010, tanggal 27 Oktober 2010, tanggal 28 Oktober 2010, dan tanggal 30 Oktober 2010. Untuk edisi 1 Oktober, 15 Oktober, 23 Oktober, dan 29 Oktober tidak ada tulisan tajuk rencana sedangkan khusus untuk hari minggu yaitu tanggal 3 Oktober, 10 Oktober, 17 Oktober, 24 Oktober, dan 31 Oktober memang tidak memiliki tulisan tajuk rencana.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Moleong dalam bukunya berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (2006: 168), instrumen penelitian adalah alat pengumpul data. Dalam penelitian ini, yang berperan sebagai alat pengumpul data adalah peneliti sendiri. Peneliti yang mengumpulkan data – data dari tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah jenis pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Objek penelitian tersebut dapat ditemukan dalam data penelitian yang berupa paragraf.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Arikunto (1990: 134), metode pengumpulan data adalah cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik catat.

Pengumpulan data dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut. *Pertama*, peneliti mengumpulkan harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. *Kedua*, peneliti mencari tulisan tajuk rencana dalam harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. *Ketiga*, peneliti mengumpulkan tulisan tajuk rencana yang telah ditemukan. *Keempat*, tulisan tajuk rencana yang telah dikumpulkan tersebut difotokopi dan diurutkan sesuai dengan jadwal terbit. *Kelima*, setiap tulisan tajuk rencana dibagi menjadi paragraf – paragraf lepas.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2006: 280). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil rumusan masalah pada bab I. Berikut ini langkah-langkah teknik analisis data yang dilakukan.

3.6.1 Peneliti memberikan kode di setiap paragraf pada tulisan tajuk rencana. Kode data yang digunakan adalah sebagai berikut Tjr1-p1, Tjr1-p2, Tjr1-p3, Tjr1-p4, Tjr1-p5, Tjr1-p6, Tjr1-p7, Tjr1-p8, Tjr1-p9, Tjr2-p1, Tjr2-p2, Tjr2-p3, Tjr2-p4, Tjr2-p5, Tjr2-p6, dan seterusnya. Kode Tr1 menjelaskan tulisan tajuk rencana yang pertama, kode p1 menjelaskan paragraf pertama. Jadi, kode Tjr1-p1 menjelaskan tulisan tajuk rencana pertama pada paragraf pertama. Kode Tjr2 menjelaskan tulisan tajuk rencana yang kedua, kode p1 menjelaskan paragraf pertama. Jadi, kode Tjr2-p1 menjelaskan tulisan tajuk rencana kedua pada paragraf pertama dan seterusnya.

3.6.2 Peneliti membuat kode berdasarkan hasil temuan (jenis pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf). Berikut ini adalah tabel – tabel yang menjelaskan kode tersebut.

Tabel 1. Jenis Pengembangan Paragraf dan Kode

No	Jenis pengembangan paragraf	Kode
1.	Pola pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)	aPppd
2.	Pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan	aPpp
3.	Pola pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi	aPpc
4.	Pola pengembangan paragraf definisi	aPpd
5.	Pola pengembangan paragraf sebab akibat	aPpsa

6.	Pola pengembangan paragraf pertanyaan	aPppt
7.	Pola pengembangan paragraf analisis	aPpa
	a. Analisis proses	aPpa1
	b. Analisis sebab	aPpa2
	c. Analisis akibat	aPpa3
	d. Analisis bukti	aPpa4
	e. Analisis manfaat	aPpa5
	f. Analisis alasan	aPpa6
	g. Analisis tujuan	aPpa7
	h. Analisis cara	aPpa8

Tabel2. Penanda pengembangan paragraf dan kode

No	Penanda pengembangan paragraf	Kode
1.	Penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)	bPppd
2.	Pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan	bPpp

3.	Pola pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi	bPpc
4.	Pola pengembangan paragraf definisi	bPpd
5.	Pola pengembangan paragraf sebab akibat	bPpsa
6.	Pola pengembangan paragraf pertanyaan	bPpqt
7.	Pola pengembangan paragraf analisis	bPpa
	a. Analisis proses	bPpa1
	b. Analisis sebab	bPpa2
	c. Analisis akibat	bPpa3
	d. Analisis bukti	bPpa4
	e. Analisis manfaat	bPpa5
	f. Analisis alasan	bPpa6
	g. Analisis tujuan	bPpa7
	h. Analisis cara	bPpa8

3.7 Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar

data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk dipadukan. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lebih lengkap. Triangulasi teori adalah memanfaatkan penjelasan atau teori pembanding untuk mengukur tingkat derajat kepercayaan. Dengan menggunakan teori sebagai alat untuk memeriksa keabsahan data, peneliti mencari data yang menunjang penelitiannya dan mampu menjelaskan hasil temuannya itu. Dengan demikian akan memberikan hasil yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat teori ahli bahasa yaitu teori dari Gorys Keraf dalam bukunya yang berjudul *Argumentasi dan Narasi* serta *Eksposisi dan Deskripsi*, teori dari Kundjana Rahardi dalam bukunya yang berjudul *Paragraf Jurnalistik*, teori dari A. Widyamartaya dalam bukunya yang berjudul *Seni Menuangkan Gagasan*, dan teori dari Djago Tarigan dalam bukunya yang berjudul *Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya*.

Langkah yang diambil oleh peneliti adalah mengoreksi setiap hasil analisis dengan teori yang ada. Analisis jenis pengembangan paragraf dibandingkan dengan teori Gorys Keraf dan A. Widyamartaya sedangkan analisis penanda pengembangan paragraf dibandingkan dengan teori Djago Tarigan dan Kundjana Rahardi. Dengan teori jenis pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf ini, peneliti dapat membandingkan teori penunjang tersebut dengan hasil penelitiannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu hasil temuan dan pembahasan. Pada sub bab pertama dijelaskan tentang hasil temuan dan analisis data penelitian. Sistematika laporan sub bab ini disusun sebagai berikut 1) jenis pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010, dan 2) penanda pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010,

Dalam sub bab kedua dibahas tentang hasil – hasil temuan dari analisis data. Pembahasan dilakukan sebagai berikut 1) jenis pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010, dan 2) penanda pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana harian Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

4.1 Hasil Temuan

Pada sub bab ini, penulis memaparkan tentang empat hasil temuan, yaitu 1) jenis pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 dan 2) penanda pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.1.1 Hasil analisis data jenis pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

Analisis data jenis pengembangan paragraf ini dilakukan terhadap 22 tulisan tajuk rencana yang diambil dari surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Peneliti meneliti paragraf – paragraf pada tulisan tajuk rencana tersebut. Semua paragraf yang diteliti berjumlah 161 buah. Untuk edisi 1 Oktober, 15 Oktober, 23 Oktober, dan 29 Oktober tidak ada tulisan tajuk rencana sedangkan khusus untuk hari minggu yaitu tanggal 3 Oktober, 10 Oktober, 17 Oktober, 24 Oktober, dan 31 Oktober memang tidak memiliki tulisan tajuk rencana.

Dari penelitian ini peneliti menemukan tujuh jenis pengembangan paragraf. Ketujuh jenis pengembangan paragraf tersebut dirinci sebagai berikut 1) pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, 3) pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, 4) pengembangan paragraf definisi, 5) pengembangan dengan sebab akibat 6) pengembangan dengan pertanyaan, dan 7) pengembangan dengan analisis.

Dalam tabel berikut ini dijelaskan tentang jenis pengembangan paragraf dan kode tiap jenis pengembangan paragraf yang digunakan dalam tulisan tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Pembahasan tiap jenis pengembangan paragraf dijabarkan pada sub bab berikutnya.

Tabel 3. Jenis pengembangan paragraf dan kode

No	Jenis pengembangan paragraf	Kode
1.	Pola pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)	aPppd
2.	Pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan	aPpp
3.	Pola pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi	aPpc
4.	Pola pengembangan paragraf definisi	aPpd
5.	Pola pengembangan paragraf sebab akibat	aPpsa
6.	Pola pengembangan paragraf pertanyaan	aPppt
7.	Pola pengembangan paragraf analisis	aPpa
	a. Analisis proses	aPpa1
	b. Analisis sebab	aPpa2
	c. Analisis akibat	aPpa3
	d. Analisis bukti	aPpa4
	e. Analisis manfaat	aPpa5
	f. Analisis alasan	aPpa6

	g. Analisis tujuan	aPpa7
	h. Analisis cara	aPpa8

4.1.2 Hasil analisis data penanda pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

Tabel 4. Penanda pengembangan paragraf dan kode

No	Penanda pengembangan paragraf	Kode
1.	Penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)	bPppd
2.	Pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan	bPpp
3.	Pola pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi	bPpc
4.	Pola pengembangan paragraf definisi	bPpd
5.	Pola pengembangan paragraf sebab akibat	bPpsa
6.	Pola pengembangan paragraf pertanyaan	bPppt
7.	Pola pengembangan paragraf analisis	bPpa
	a. Analisis proses	bPpa1

	b. Analisis sebab	bPpa2
	c. Analisis akibat	bPpa3
	d. Analisis bukti	bPpa4
	e. Analisis manfaat	bPpa5
	f. Analisis alasan	bPpa6
	g. Analisis tujuan	bPpa7
	h. Analisis cara	bPpa8

4.2 Pembahasan

Pada sub bab ini peneliti membahas tentang hasil temuan yang telah dipaparkan di atas. Pembahasan hasil temuan ini terdiri dari 1) jenis pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 dan 2) penanda pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010. Pembahasan kedua hasil temuan tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.1 Jenis pengembangan paragraf yang terdapat pada tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

Dari penelitian ini peneliti menemukan tujuh jenis pengembangan paragraf. Ketujuh jenis pengembangan paragraf tersebut dirinci sebagai berikut.

1) pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, 3) pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, 4) pengembangan paragraf definisi, 5) pengembangan dengan sebab akibat 6) pengembangan dengan pertanyaan, dan 7) pengembangan dengan analisis. Pengembangan paragraf analisis yang ditemukan oleh peneliti terdiri dari pengembangan paragraf analisis tujuan, analisis bukti, analisis alasan dan analisis cara. Paragraf yang dianalisis sebanyak 161 buah paragraf yang diambil dari sumber data. Tidak semua analisis data disajikan dalam pembahasan ini, hanya beberapa saja yang dianggap dapat mewakili. Analisis data yang lain dapat dilihat dalam lampiran. Berikut ini ditampilkan pembahasan analisis jenis pengembangan paragraf.

A. Pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)

Deskripsi atau pemerian merupakan suatu bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian – perincian dari obyek yang sedang dibicarakan (Gorys Keraf, 1981: 93). Kata deskripsi berasal dari kata latin *describere* yang berarti *menulis tentang* atau *membeberkan sesuatu hal*. Sebaliknya kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi *pemerian* yang berasal dari kata *peri* – *memerikan* yang berarti ‘melukiskan sesuatu hal’. Berdasarkan

tujuannya, deskripsi sekurang – kurangnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau ekspositoris (Gorys Keraf, 1981:94). Dalam deskripsi sugestif penulis bermaksud menciptakan sebuah pengalaman pada diri pembaca, pengalaman karena perkenalan langsung dengan obyeknya. Dengan kata lain, deskripsi sugestif berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap obyek tersebut melalui imajinasi para pembaca. Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis hanya bertujuan untuk memberikan identifikasi atau informasi mengenai obyeknya sehingga pembaca dapat mengenalnya bila bertemu atau berhadapan dengan obyek tadi. Selain itu, deskripsi juga dibagi menjadi dua macam yaitu deskripsi tempat dan deskripsi orang. Deskripsi tempat yaitu menggambarkan atau merincikan tempat, jalannya suatu peristiwa akan lebih menarik atau lebih hidup jika dikaitkan dengan keadaan tempat. Deskripsi orang merincikan atau mendeskripsikan secara jelas atau terperinci mengenai orang tersebut.

Berikut ini contoh pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)

“BARBAR, primitif, hukum rimba, atau sebutan lain mencuat ketika khalayak ramai menonton TV yang membayangkan bentrokan dua kelompok masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, 29 September lalu. Para pemirsa TV secara gamblang melihat kedua kelompok masyarakat itu membawa senjata tajam. Terlihat pula para wartawan foro dan kameraman TV leluasa meliput adegan kekerasan, tanpa terganggu sedikit pun oleh massa kedua pihak yang bentrok. Seolah aksi mereka pas kalau diliput media massa (Tjr1.p1) *Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2010*”

Pada paragraf di atas terkembang dan hidup karena pelukisan dan perincian. Terlihat jelas bahwa penulis berusaha untuk melukiskan suatu kejadian bentrokan secara terinci. Hal ini dibuktikan dengan perincian – perincian di mana tempat terjadinya, kapan waktunya, bagaimana suasana kejadian tersebut, dan sebagainya. Hal – hal tersebut dirinci dengan jelas pada paragraf di atas..

Jenis pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi) juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr2.p1, Tjr3.p1, Tjr3.p1, Tjr3.p2, Tjr3.p4, Tjr4.1, Tjr4.p2, Tjr4.p4, Tjr6.p2, Tjr7.p1, Tjr7.p2, Tjr8.p3, Tjr9.p1, Tjr10.p1, Tjr10.p2, Tjr12.p1, Tjr12.p3, Tjr13.p1, Tjr16.p1, Tjr17.p1, Tjr17.p2, Tjr17.p6, Tj20.p1, Tjr21.p1, Tjr22.p2. Jumlah keseluruhan paragraf adalah 26 paragraf.

B. Pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan

Kalimat topik berisi perbandingan dua hal, misalnya hal yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkret. Kalimat topik tersebut dikembangkan dengan memperinci perbandingan tersenut dalam bentuk yang konkret atau bagian – bagian kecil. Paragraf ini disebut juga paragraf deduktif perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dapat disusun dengan cara membandingkan atau mengkomparasikan dua macam hal yang terdapat dalam kalimat utama paragraf. Misalnya saja, dalam kalimat topik itu terdapat sesuatu yang bersifat abstrak, maka sesuatu yang abstrak itu dikomparasikan dengan sesuatu yang tidak abstrak, hingga perincian – perincian paling kecil. kata – kata yang biasa digunakan yaitu *sejalan dengan, serupa dengan, sama saja, demikian*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

juga, sesuai dengan, hampir sama dengan, seperti halnya, sama dengan, meyerupai, seperti, ibarat, bak. Jika penulis bermaksud untuk mempertentangkan, maka dinamakan pengembangan paragraf pertentangan atau konrastif. Kata – kata yang biasa digunakan yaitu *meskipun, akan tetapi, lain halnya dengan, tidak sama dengan, kurang dari, di pihak lain, sebaliknya, sedangkan, bertentangan dengan, berlawanan dengan, berbeda dengan.*

Berikut ini contoh pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan

“Menjadikan tersangka masinis, sekalipun ada indikasi lalai karena mengantuk, nampak tak adil bagi kemanusiaan. Kecelakaan tersebut, jelas tanggung jawab korporasi. Juga tanggung jawab negara ini dalam memberi layanan transportasi masyarakat. Menjadikan masinis sebagai kambing hitam, seharusnya juga dilihat kambing yang amat-sangat lebih hitam. Yakni sosok pemangku kebijakan. Kita huga dapat mempertanyakan sensitivitas para legislative yang selain berkewajiban melakukan budgeting juga pengawasan” (Tjr4.p6) *Kedaulatan Rakyat, edisi 6 Oktober 2010.*

Jenis pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr3.p7, Tjr4.p2, Tjr4.p3, Tjr6.p3, Tjr6.p5, Tjr6.p6, Tjr7.p3, Tjr7.p5, Tjr7.p6, Tjr7.p7, Tjr8.p1, Tjr8.p2, Tjr8.p5, Tjr10.p4, Tjr11.p2, Tjr12.p4, Tjr12.p7, Tjr14.p2, Tjr14.p3, Tjr14.p4, Tjr15.p8, Tjr16.p6, Tjr18.p2, Tjr18.p3, Tjr19.p2, Tjr19.p4, Tjr19.p5, Tjr20.p2, Tjr20.p3, Tjr20.p7, Tjr21.p7, Tjr22.p4. Jumlah keseluruhan paragraf adalah 33 paragraf.

C. Pola pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi

Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh – contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Pola pengembangan paragraf contoh

dapat disusun dengan cara menjabarkan kalimat topiknya dengan memakai aneka contoh. Contoh – contoh tersebut tersusun dalam kalimat – kalimat pengembang. Paragraf seperti ini disebut dengan paragraf deduktif contoh. Apabila contoh – contoh yang tersusun dalam kalimat pengembang ditempatkan mendahului kalimat topik, maka paragrafnya disebut paragraf induktif contoh.

Berikut ini contoh pengembangan paragraf contoh atau ilustrasi

“Kita ambil contoh kasus mafia pajak dengan tokoh sentral mantan pegawai Gayus Tambunan. Dalam persidangan terungkap fakta keterlibatan jenderal polisi dalam praktik kotor tersebut. Tak kurang kesaksian Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (penyidik kasus Gayus) yang menunjuk keterlibatan atasannya dalam kasus mafia pajak. Arafat dan Sri Sumartini merasa dikorban oleh atasannya. Namun, hingga sekarang sang atasan tak pernah dibawa ke pengadilan”.(Tjr14.p2) *Kedaulatan Rakyat*, 19 Oktober 2010.

Pola pengembangan paragraf contoh juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr3.p5, Tjr16.p4, Tjr19.p4. Jumlah keseluruhan paragraf adalah 4 paragraf.

D. Pola pengembangan paragraf definisi

Suatu pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjernih pengertian tersebut ialah serangkaian kalimat pengembang, disusun dengan cara memberikan penjelasan atau pendefinisian atas pengertian tertentu terhadap kata – kata kunci atau bagian – bagian kalimat tertentu yang terdapat dalam kalimat topik itu. Terdapat lima jenis definisi yaitu

definisi nominal, definisi formal, definisi operasional, definisi paradigmatis, dan definisi luas.

1. Definisi nominal merupakan definisi yang menunjuk pada pengertian singkat, misalnya *manusia ialah ciptaan Tuhan*,
2. Definisi formal ialah definisi yang disusun atas dasar logika atau penalaran, misalnya *manusia merupakan makhluk bermartabat dan berakal budi*,
3. Definisi operasional atau definisi kerja merupakan definisi yang dijadikan pedoman atau tuntunan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, misalnya *penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan linguistik yang telah dirumuskan sebelumnya*.
4. Definisi paradigmatis adalah definisi yang disusun berdasarkan paradigma atau kerangka berpikir tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi pola berpikir orang lain.
5. Definisi luas adalah definisi yang berisi gagasan yang diuraikan secara luas atau panjang lebar supaya benar – benar menjadi jelas.

Berikut ini contoh pengembangan paragraf definisi

‘Premanisme selalu terkait dengan dunia kejahatan. Kata ‘preman’ menyuguhkan identitas kaum sipil. Dengan demikian premanisme merupakan aktifitas warga sipil yang bias mengarah pada unsur kejahatan, meski dalam praktik mereka yang digolongkan preman hanya sebagai petugas keamanan tempat hiburan malam dan sebagainya’ (Tjr1.p3) *Kedaulatan Rakyat*, 2 Oktober 2010.

Pola pengembangan paragraf definisi juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr1.p6, Tjr18.p1. Jumlah keseluruhan 3 paragraf.

E. Pola pengembangan paragraf sebab akibat

Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Paragraf ini disusun dari sebuah kalimat topik yang menunjukkan sebab – sebab dari hal – hal tertentu, kemudian akibat – akibatnya dijabarkan dalam kalimat – kalimat penjelas atau pengembangnya. Biasanya dalam sebuah pengembangan paragraf sebab akibat, akibat sebab itu dipaparkan terinci terlebih dahulu di bagian depan paragraf, kemudian baru dirumuskan sebabnya di akhir paragraf. Paragraf yang berpola induktif ini disebut paragraf akibat sebab. Kata – kata yang biasa digunakan adalah *oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan pertimbangan bahwa, dengan alasan itu, dengan alasan ini, pengalaman membuktikan bahwa, karena.*

Contoh pola pengembangan paragraf sebab akibat

“Ibukota dan kota besar yang semakin banyak memiliki tempat hiburan malam, dan siang, menjadi lahan rezeki bagi kelompok masyarakat seperti itu. Jarang ditemui petugas keamanan tempat hiburan yang tak punya kelompok. Sehingga kelompok besar yang bersaing sering terlibat bentrokan karena perebutan wilayah untuk mengais rezeki. Satu bentrokan kecil di suatu tempat hiburan bisa menyulut bentrokan besar. Ketika kasus bentrokan kecil terangkat di pengadilan, kedua kelompok bisa bergerak sebagai usaha mempengaruhi jalannya pengadilan. Manakala mereka berhadapan, maka adegan massa kontra massa pun terjadi. Tapi untuk kelompok massa preman, senjata pun bicara, sehingga munculnya orang yang meregang nyawa atau luka berat, termasuk polisi yang berusaha meleraikan, bisa terjadi” (Tjr1.p4) *Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2010*

Pola pengembangan paragraf sebab akibat juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr1.p5, Tjr1.p7, Tjr1.p8, Tjr1.p4, Tjr2.p4, Tjr2.p6,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tjr3.p2, Tjr3.p3, Tjr3.p5, Tjr3.p8, Tjr5.p1, Tjr5.p2, Tjr5.p3, Tjr5.p4, Tjr6.p4, Tjr7.p2, Tjr7.p4, Tjr7.p5, Tjr7.p7, Tjr7.p8, Tjr8.p6, Tjr9.p4, Tjr9.p5, Tjr9.p6, Tjr9.p7, Tjr9.p8, Tjr10.p1, Tjr10.p3, Tjr10.p4, Tjr10.p5, Tjr11.p3, Tjr11.p6, Tjr11.p7, Tjr12.p2, Tjr12.p4, Tjr12.p8, Tjr13.p3, Tjr13.p4, Tjr13.p5, Tjr14.p5, Tjr15.p2, Tjr15.p3, Tjr15.p4, Tjr15.p5, Tjr15.p6, Tjr16.p2, Tjr16.p5, Tjr17.p3, Tjr17.p4, Tjr17.p5, Tjr17.p6, Tjr18.p7, Tjr19.p6, Tjr19.p7, Tjr20.p1, Tjr20.p3, Tjr20.p4, Tjr20.p5, Tjr21.p3, Tjr21.p4, Tjr21.p6, Tjr22.p1, Tjr22.p2, Tjr22.p3, Tjr22.p4, Tjr22.p5. Jumlah keseluruhan paragraf 67 paragraf.

F. Pola pengembangan paragraf pertanyaan

Kalimat dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat topik dalam sebuah paragraf tidak selalu merupakan kalimat pernyataan. Jadi kalimat pokok itu tidak selalu berbentuk kalimat deklaratif. Ada kalanya kalimat topik itu berupa kalimat pertanyaan yang kemudian dijawab terperinci lewat kalimat - kalimat berikutnya yang merupakan sosok penjelas, penopang, atau pengembangnya. Paragraf dengan kalimat topik yang berupa pertanyaan demikian ini disebut paragraf pertanyaan. Apabila pertanyaan itu diletakkan di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif pertanyaan. Apabila kalimat topik paragraf itu ditempatkan di awal dan ditegaskan kembali pada akhir paragraf, maka disebut paragraf jurnalistik abduktif pertanyaan.

Contoh pola pengembangan paragraf pertanyaan

“Tentu kita sangat sedih dan merasa pilu mengapa kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara silih berganti terjadi di negeri ini. Sepertinya kecelakaan itu sudah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mentradisi. Tidak ada bulan atau tahun yang tidak diwarnai peristiwa kecelakaan, yang tidak jarang memakan korban jiwa manusia dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Mengapa seakan terkesan tidak ada upaya menghentikannya, atau paling tidak meminimalisasinya. Mengurangi secara signifikan frekuensinya, sehingga tidak terlalu banyak nyawa manusia yang melayang sia-sia” (Tjr2.p5) *Kedaulatan Rakyat*, 4 Oktober 2010.

Pola pengembangan paragraf pertanyaan juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr3.p2, Tjr3.p6, Tjr4.p5, Tjr4.p7, Tjr6.p1, Tjr6.p4, Tjr9.p2, Tjr9.p5, Tjr9.p7, Tjr9.p8, Tjr10.p6, Tjr13.p6, Tjr14.p1, Tjr14.p3, Tjr14.p6, Tjr14.p7, Tjr15.p7, Tjr19.p3. Jumlah keseluruhan paragraf 19 paragraf.

G. Pola pengembangan paragraf analisis

Pola pengembangan paragraf dengan analisis terdiri dari analisis proses, analisis sebab, analisis akibat, analisis bukti, analisis manfaat, analisis alasan, analisis tujuan, analisis cara. Pola pengembangan analisis sebab dan pola pengembangan analisis akibat pada hakikatnya sama dengan pola pengembangan paragraf sebab akibat ataupun akibat sebab di mana kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Paragraf ini disusun dari sebuah kalimat topik yang menunjukkan sebab – sebab dari hal – hal tertentu, kemudian akibat – akibatnya dijabarkan dalam kalimat – kalimat penjelas atau pengembangnya. Biasanya dalam sebuah pengembangan paragraf sebab akibat, akibat sebab itu dipaparkan terinci terlebih dahulu di bagian depan paragraf, kemudian baru dirumuskan sebabnya di akhir paragraf. Paragraf yang berpola induktif ini disebut paragraf akibat sebab. Kata – kata yang biasa digunakan dalam kalimatnya pun sama yaitu *oleh sebab itu*, *oleh karena itu*,

akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan pertimbangan bahwa, dengan alasan itu, dengan alasan ini, pengalaman membuktikan bahwa, karena.

1. Contoh pola pengembangan paragraf analisis tujuan

“Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala melihat kejadian itu sebagai isyarat kembali maraknya aksi premanisme” (Tjr1.p2) *Kedaulatan Rakyat*, 2 Oktober 2010.

Pola pengembangan paragraf analisis tujuan juga terdapat pada paragraf dengan kode – kode sebagai berikut Tjr1.p9, Tjr2.p2, Tjr4.p8, Tjr5.p5, Tjr5.p6, Tjr8.p6, Tjr8.p7, Tjr10.p7, Tjr10.p8, Tjr10.p9, Tjr12.p5, Tjr12.p6, Tjr13.p2, Tjr13.p7, Tjr15.p1, Tjr15.p8, Tjr16.p5, Tjr16.p7, Tjr17.p7, Tjr18.p5, Tjr18.p6, Tjr19.p1, Tjr21.p5, Tjr20.p6, Tjr21.p8. Jumlah keseluruhan 26 paragraf.

2. Contoh pola pengembangan paragraf analisis bukti

“Di antara kita tentu ada yang menengarai pernyataan para pejabat itu sekadar *lip service*. Hanya berfungsi sebagai pemanis bibir atau basa-basi dalam kerangka menghibur keluarga para korban. Sebatas menabur janji kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan kinerja. Buktinya, kecelakaan KA dalam berbagai ragam dan bentuknya selalu terulang dan terulang. Secara pukul rata, setiap tahun tidak kurang dari 100 kali kecelakaan KA di berbagai tempat” (Tjr2. p3) *Kedaulatan Rakyat*, 4 Oktober 2010.

Pola pengembangan paragraf analisis bukti juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr3. p3, Tjr12.p5. Jumlah keseluruhan 3 paragraf.

3. Contoh pola pengembangan paragraf analisis alasan

“SKPP dengan alasan sosiologis, mungkin baru ini diajukan Kejaksaan, yakni tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan” (Tjr9. p3) *Kedaulatan Rakyat*, 12 Oktober 2010.

Pola pengembangan paragraf analisis alasan juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr8. p4. Jumlah keseluruhan 2 paragraf.

4. Contoh pola pengembangan paragraf analisis cara

“Untuk itu harus *fairness*. Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi maupun ahli hukum. Dengan jalur tersebut, kita bias akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas. Kita belum lupa catatan kasus minyak kelapa sawit (CPO) yang mengurangi dominasi Indonesia di perdagangan dunia akibat telaah kasus yang tidak objektif” (Tjr10 p8) *Kedaulatan Rakyat, 13 Oktober 2010*.

Pola pengembangan analisis cara juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr 11 p8, Tjr16.p3. Jumlah keseluruhan 3 paragraf.

4.2.2 Penanda pengembangan paragraf yang terdapat dalam tulisan tajuk rencana edisi Oktober 2010.

Dari penelitian ini peneliti menemukan tujuh penanda pengembangan paragraf. Ketujuh penanda pengembangan paragraf tersebut dirinci sebagai berikut

1) penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) penanda pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, 3) penanda pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, 4) penanda pengembangan paragraf definisi, 5) penanda pengembangan paragraf sebab akibat 6) penanda pengembangan paragraf pertanyaan, dan 7) penanda pengembangan paragraf analisis. Penanda pengembangan paragraf analisis yang ditemukan oleh peneliti terdiri dari pengembangan paragraf analisis tujuan, analisis bukti, analisis alasan dan analisis cara. Paragraf yang dianalisis sebanyak 161 buah paragraf yang

diambil dari sumber data. Tidak semua analisis data disajikan dalam pembahasan ini, hanya beberapa saja yang dianggap dapat mewakili. Analisis data yang lain dapat dilihat dalam lampiran. Berikut ini ditampilkan pembahasan analisis penanda pengembangan paragraf.

A. Penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)

Deskripsi atau pemerian merupakan suatu bentuk tulisan yang bertalian dengan usaha para penulis untuk memberikan perincian – perincian dari obyek yang sedang dibicarakan (Gorys Keraf, 1981: 93). Kata deskripsi berasal dari kata latin *describere* yang berarti *menulis tentang* atau *membeberkan sesuatu hal*. Sebaliknya kata deskripsi dapat diterjemahkan menjadi *pemerian* yang berasal dari kata *peri* – *memerikan* yang berarti ‘melukiskan sesuatu hal’. Berdasarkan tujuannya, deskripsi sekurang – kurangnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu deskripsi sugestif dan deskripsi teknis atau ekspositoris (Gorys Keraf, 1981:94). Dalam deskripsi sugestif penulis bermaksud menciptakan sebuah pengalaman pada diri pembaca, pengalaman karena pengenalan langsung dengan obyeknya. Dengan kata lain, deskripsi sugestif berusaha untuk menciptakan suatu penghayatan terhadap obyek tersebut melalui imajinasi para pembaca. Deskripsi ekspositoris atau deskripsi teknis hanya bertujuan untuk memberikan identifikasi atau informasi mengenai obyeknya sehingga pembaca dapat mengenalnya bila bertemu atau berhadapan dengan obyek tadi. Selain itu, deskripsi juga dibagi menjadi dua macam yaitu deskripsi tempat dan deskripsi orang. Deskripsi tempat yaitu

menggambarkan atau merincikan tempat, jalannya suatu peristiwa akan lebih menarik atau lebih hidup jika dikaitkan dengan keadaan tempat. Deskripsi orang merincikan atau mendeskripsikan secara jelas atau terperinci mengenai orang tersebut.

Berikut ini contoh penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)

“BARBAR, primitif, hukum rimba, atau sebutan lain mencuat ketika khalayak ramai menonton TV yang membayangkan bentrokan dua kelompok masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, 29 September lalu. Para pemirsa TV secara gamblang melihat kedua kelompok masyarakat itu membawa senjata tajam. Terlihat pula para wartawan foro dan kameraman TV leluasa meliput adegan kekerasan, tanpa terganggu sedikit pun oleh massa kedua pihak yang bentrok. Seolah aksi mereka pas kalau diliput media massa” (Tjr1.p1) Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2010.

Pada paragraf di atas berkembang dan hidup karena pelukisan dan perincian. Terlihat jelas bahwa penulis berusaha untuk melukiskan suatu kejadian bentrokan secara terinci. Hal ini dibuktikan dengan perincian – perincian di mana tempat terjadinya, kapan waktunya, bagaimana suasana kejadian tersebut, dan sebagainya. Hal – hal tersebut dirinci dengan jelas pada paragraf di atas.

Penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi) juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr2.p1, Tjr3.p1, Tjr3.p1, Tjr3.p2, Tjr3.p4, Tjr4.1, Tjr4.p2, Tjr4.p4, Tjr6.p2, Tjr7.p1, Tjr7.p2, Tjr8.p3, Tjr9.p1, Tjr10.p1, Tjr10.p2, Tjr12.p1, Tjr12.p3, Tjr13.p1, Tjr16.p1, Tjr17.p1, Tjr17.p2, Tjr17.p6, Tjr19.p2, Tj20.p1, Tjr21.p1, Tjr22.p2. Jumlah keseluruhan paragraf adalah 27 paragraf.

B. Penanda pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan

Kalimat topik berisi perbandingan dua hal, misalnya hal yang bersifat abstrak dengan yang bersifat konkret. Kalimat topik tersebut dikembangkan dengan memperinci perbandingan tersenut dalam bentuk yang konkret atau bagian – bagian kecil. Paragraf ini disebut juga paragraf deduktif perbandingan. Pengembangan paragraf perbandingan dapat disusun dengan cara membandingkan atau mengkomparasikan dua macam hal yang terdapat dalam kalimat utama paragraf. Misalnya saja, dalam kalimat topik itu terdapat sesuatu yang bersifat abstrak, maka sesuatu yang abstrak itu dikomparasikan dengan sesuatu yang tidak abstrak, hingga perincian – perincian paling kecil. kata – kata yang biasa digunakan yaitu *sejalan dengan, serupa dengan, sama saja, demikian juga, sesuai dengan, hampir sama dengan, seperti halnya, sama dengan, meyerupai, seperti, ibarat, bak*. Jika penulis bermaksud untuk mempertentangkan, maka dinamakan pengembangan paragraf pertentangan atau kontrasitif. Kata – kata yang biasa digunakan yaitu *meskipun, akan tetapi, lain halnya dengan, tidak sama dengan, kurang dari, di pihak lain, sebaliknya, sedangkan, bertentangan dengan, berlawanan dengan, berbeda dengan*.

Berikut ini contoh penanda pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan

“Menjadikan tersangka masinis, sekalipun ada indikasi lalai karena mengantuk, nampak tak adil bagi kemanusiaan. Kecelakaan tersebut, jelas tanggung jawab korporasi. Juga tanggung jawab negara ini dalam memberi layanan transportasi masyarakat. Menjadikan masinis sebagai kambing hitam, seharusnya juga dilihat kambing yang amat-sangat lebih hitam. Yakni sosok pemangku kebijakan. Kita juga dapat mempertanyakan

sensitivitas para legislative yang selain berkewajiban melakukan budgeting juga pengawasan” (Tjr4.p6) Kedaulatan Rakyat, edisi 6 Oktober 2010.

Dalam paragraf di atas jelas terlihat bahwa ada dua hal yang dibandingkan yaitu antara *seorang masinis* diibaratkan sebagai *kambing hitam* (orang yang dipersalahkan dalam suatu peristiwa atau kejadian). Penggunaan kata *sebagai* menunjukkan suatu perbandingan antara dua hal. Hal ini terlihat dalam kalimat *Menjadikan masinis sebagai kambing hitam*. Untuk pertentangannya dapat dilihat dalam kalimat *seharusnya juga dilihat kambing yang amat-sangat lebih hitam*. Kata *seharusnya* menunjukkan bahwa penulis bermaksud menentang atau menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah terhadap kasus kecelakaan kereta api.

Penanda pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr3.p7, Tjr4.p2, Tjr4.p3, Tjr6.p3, Tjr6.p5, Tjr6.p6, Tjr7.p3, Tjr7.p5, Tjr7.p6, Tjr7.p7, Tjr8.p1, Tjr8.p2, Tjr8.p5, Tjr10.p4, Tjr11.p2, Tjr12.p4, Tjr12.p7, Tjr14.p2, Tjr14.p3, Tjr14.p4, Tjr15.p8, Tjr16.p6, Tjr18.p2, Tjr18.p3, Tjr19.p2, Tjr19.p4, Tjr19.p5, Tjr20.p2, Tjr20.p3, Tjr20.p7, Tjr21.p7, Tjr22.p4. Jumlah keseluruhan paragraf adalah 33 paragraf.

C. Penanda pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi

Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh – contoh sehingga kalimat topik jelas pengertiannya. Pola pengembangan paragraf contoh dapat disusun dengan cara menjabarkan kalimat topiknya dengan memakai aneka

contoh. Contoh – contoh tersebut tersusun dalam kalimat – kalimat pengembang. Paragraf seperti ini disebut dengan paragraf deduktif contoh. Apabila contoh – contoh yang tersusun dalam kalimat pengembang ditempatkan mendahului kalimat topiknya, maka paragrafnya disebut paragraf induktif contoh.

Berikut ini contoh penanda pengembangan paragraf contoh atau ilustrasi

“Kita ambil contoh kasus mafia pajak dengan tokoh sentral mantan pegawai Gayus Tambunan. Dalam persidangan terungkap fakta keterlibatan jenderal polisi dalam praktik kotor tersebut. Tak kurang kesaksian Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (penyidik kasus Gayus) yang menunjuk keterlibatan atasannya dalam kasus mafia pajak. Arafat dan Sri Sumartini merasa dikorban oleh atasannya. Namun, hingga sekarang sang atasan tak pernah dibawa ke pengadilan” (Tjr14.p2) Kedaulatan Rakyat, 19 Oktober 2010.

Pada paragraf di atas jelas terlihat bahwa kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh – contoh. Dapat dilihat dalam kalimat *Kita ambil contoh kasus mafia pajak dengan tokoh sentral mantan pegawai Gayus Tambunan*. Penulis bermaksud untuk memberikan contoh terhadap bobroknya hukum di negara Indonesia ini yaitu dengan mengambil contoh kasus mafia pajak, Gayus Tambunan

Penanda pengembangan paragraf contoh juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr3.p5, Tjr16.p4, Tjr19.p4. Jumlah keseluruhan 4 paragraf.

D. Penanda pengembangan paragraf definisi

Suatu pengertian atau istilah yang terkandung dalam kalimat topik memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Alat untuk memperjernih pengertian tersebut ialah serangkaian kalimat pengembang, disusun dengan cara memberikan penjelasan atau pendefinisian atas pengertian tertentu terhadap kata – kata kunci atau bagian – bagian kalimat tertentu yang terdapat dalam kalimat topik itu. Terdapat lima jenis definisi yaitu definisi nominal, definisi formal, definisi operasional, definisi paradigmatis, dan definisi luas.

1. Definisi nominal merupakan definisi yang menunjuk pada pengertian singkat, misalnya *manusia ialah ciptaan Tuhan*,
2. Definisi formal ialah definisi yang disusun atas dasar logika atau penalaran, misalnya *manusia merupakan makhluk bermartabat dan berakal budi*,
3. Definisi operasional atau definisi kerja merupakan definisi yang dijadikan pedoman atau tuntunan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu, misalnya *penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan linguistik yang telah dirumuskan sebelumnya*.
4. Definisi paradigmatis adalah definisi yang disusun berdasarkan paradigma atau kerangka berpikir tertentu yang ditujukan untuk mempengaruhi pola berpikir orang lain.
5. Definisi luas adalah definisi yang berisi gagasan yang diuraikan secara luas atau panjang lebar supaya benar – benar menjadi jelas.

Berikut ini contoh penanda pengembangan paragraf definisi

“Premanisme selalu terkait dengan dunia kejahatan. Kata ‘preman’ menyuguhkan identitas kaum sipil. Dengan demikian premanisme merupakan aktifitas warga sipil yang biasa mengarah pada unsur kejahatan, meski dalam praktik mereka yang digolongkan preman hanya sebagai petugas keamanan tempat hiburan malam dan sebagainya” (Tjr1 p3) *Kedaulatan Rakyat*, 2 Oktober 2010.

Dalam paragraf di atas jelas ada pendefinisian terhadap kata *Preman*. Hal itu terlihat dalam kalimat *Kata ‘preman’ menyuguhkan identitas kaum sipil. Dengan demikian premanisme merupakan aktifitas warga sipil yang biasa mengarah pada unsur kejahatan*. Menurut Kundjana Rahardi dalam bukunya yang berjudul paragraf Jurnalistik, pendefinisian di atas termasuk definisi nominal yaitu definisi yang menunjuk pada pengertian singkat.

Penanda pengembangan paragraf definisi juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr1.p6, Tjr18.p1. Jumlah keseluruhan 3 paragraf.

E. Penanda pengembangan paragraf sebab akibat

Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Paragraf ini disusun dari sebuah kalimat topik yang menunjukkan sebab – sebab dari hal – hal tertentu, kemudian akibat – akibatnya dijabarkan dalam kalimat – kalimat penjelas atau pengembangnya. Biasanya dalam sebuah pengembangan paragraf sebab akibat, akibat sebab itu dipaparkan terinci terlebih dahulu di bagian depan paragraf, kemudian baru dirumuskan sebabnya di akhir paragraf. Paragraf yang berpola induktif ini disebut paragraf akibat sebab. Kata – kata yang biasa digunakan adalah *oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan pertimbangan bahwa, dengan alasan itu, dengan alasan ini, pengalaman membuktikan bahwa, karena*.

Contoh penanda pengembangan paragraf sebab akibat

“Ibukota dan kota besar yang semakin banyak memiliki tempat hiburan malam, dan siang, menjadi lahan rezeki bagi kelompok masyarakat seperti itu. Jarang ditemui petugas keamanan tempat hiburan yang tak punya kelompok. Sehingga kelompok besar yang bersaing sering terlibat bentrokan karena perebutan wilayah untuk mengais rezeki. Satu bentrokan kecil di suatu tempat hiburan bisa menyulut bentrokan besar. Ketika kasus bentrokan kecil terangkat di pengadilan, kedua kelompok bisa bergerak sebagai usaha mempengaruhi jalannya pengadilan. Manakala mereka berhadapan, maka adegan massa kontra massa pun terjadi. Tapi untuk kelompok massa preman, senjata pun bicara, sehingga munculnya orang yang meregang nyawa atau luka berat, termasuk polisi yang berusaha meleraikan, bisa terjadi” (Tjr1.p4) Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2010.

Dalam kalimat di atas jelas terlihat bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Hal ini ditunjukkan dalam kalimat *Ibukota dan kota besar yang semakin banyak memiliki tempat hiburan malam, dan siang, menjadi lahan rezeki bagi kelompok masyarakat seperti itu. Jarang ditemui petugas keamanan tempat hiburan yang tak punya kelompok. Sehingga kelompok besar yang bersaing sering terlibat bentrokan karena perebutan wilayah untuk mengais rezeki.* Kata *sehingga* menunjukkan hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat juga ditunjukkan dalam kalimat *untuk kelompok massa preman, senjata pun bicara, sehingga munculnya orang yang meregang nyawa atau luka berat, termasuk polisi yang berusaha meleraikan, bisa terjadi.* Kata *sehingga* menunjukkan hubungan sebab akibat

Penanda pengembangan paragraf sebab akibat juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr1.p5, Tjr1.p7, Tjr1.p8, Tjr1.p4, Tjr2.p4, Tjr2.p6, Tjr3.p2, Tjr3.p3, Tjr3.p5, Tjr3.p8, Tjr5.p1, Tjr5.p2, Tjr5.p3, Tjr5.p4, Tjr6.p4,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tjr7.p2, Tjr7.p4, Tjr7.p5, Tjr7.p8, Tjr8.p6, Tjr9.p4, Tjr9.p5, Tjr9.p6, Tjr9.p7, Tjr9.p8, Tjr10.p1, Tjr10.p3, Tjr10.p4, Tjr10.p5, Tjr11.p3, Tjr11.p6, Tjr11.p7, Tjr12.p2, Tjr12.p4, Tjr12.p8, Tjr13.p3, Tjr13.p4, Tjr13.p5, Tjr14.p5, Tjr15.p2, Tjr15.p3, Tjr15.p4, Tjr15.p5, Tjr15.p6, Tjr16.p2, Tjr16.p5, Tjr17.p3, Tjr17.p4, Tjr17.p5, Tjr17.p6, Tjr18.p7, Tjr19.p6, Tjr19.p7, Tjr20.p1, Tjr20.p3, Tjr20.p4, Tjr20.p5, Tjr21.p3, Tjr21.p4, Tjr21.p6, Tjr22.p1, Tjr22.p2, Tjr22.p3, Tjr22.p4, Tjr22.p5. Jumlah keseluruhan paragraf 65 paragraf.

F. Penanda pengembangan paragraf pertanyaan

Kalimat topik dijelaskan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya dan kalimat berita. Kalimat topik dalam sebuah paragraf tidak selalu merupakan kalimat pernyataan. Jadi kalimat pokok itu tidak selalu berbentuk kalimat deklaratif. Ada kalanya kalimat topik itu berupa kalimat pertanyaan yang kemudian dijawab terperinci lewat kalimat - kalimat berikutnya yang merupakan sosok penjelas, penopang, atau pengembangnya. Paragraf dengan kalimat topik yang berupa pertanyaan demikian ini disebut paragraf pertanyaan. Apabila pertanyaan itu diletakkan di akhir paragraf, maka disebut paragraf induktif pertanyaan. Apabila kalimat topik paragraf itu ditempatkan di awal dan ditegaskan kembali pada akhir paragraf, maka disebut paragraf abduktif pertanyaan.

Contoh penanda pengembangan paragraf pertanyaan

Tentu kita sangat sedih dan merasa pilu mengapa kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara silih berganti terjadi di negeri ini. Sepertinya kecelakaan itu sudah mentradisi. Tidak ada bulan atau tahun yang tidak diwarnai peristiwa kecelakaan, yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tidak jarang memakan korban jiwa manusia dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Mengapa seakan terkesan tidak ada upaya menghentikannya, atau paling tidak meminimalisasinya. Mengurangi secara signifikan frekuensinya, sehingga tidak terlalu banyak nyawa manusia yang melayang sia-sia (Tjr2.p5) Kedaulatan Rakyat, 4 Oktober 2010.

Dalam kalimat di atas jelas terlihat bahwa ada hal yang ditanyakan. Hal ini terlihat dalam kalimat *Mengapa seakan terkesan tidak ada upaya menghentikannya, atau paling tidak meminimalisasinya. Mengurangi secara signifikan frekuensinya, sehingga tidak terlalu banyak nyawa manusia yang melayang sia-sia.* Penanda pengembangan paragraf pertanyaan ditunjukkan dengan kata tanya *mengapa*

Penanda pengembangan paragraf pertanyaan juga terdapat pada paragraf dengan kode sebagai berikut Tjr3.p2, Tjr3.p6, Tjr4.p5, Tjr4.p7, Tjr6.p1, Tjr6.p4, Tjr9.p2, Tjr9.p5, Tjr9.p7, Tjr9.p8, Tjr10.p6, Tjr13.p6, Tjr14.p1, Tjr14.p3, Tjr14.p6, Tjr14.p7, Tjr15.p7, Tjr19.p3. Jumlah Keseluruhan 19 paragraf.

G. Penanda pengembangan paragraf analisis

Penanda pengembangan paragraf dengan analisis terdiri dari analisis proses, analisis sebab, analisis akibat, analisis bukti, analisis manfaat, analisis alasan, analisis tujuan, analisis cara. Pola pengembangan analisis sebab dan pola pengembangan analisis akibat pada hakikatnya sama dengan pola pengembangan paragraf sebab akibat ataupun akibat sebab di mana kalimat topik dikembangkan dengan memberikan sebab atau akibat dari pernyataan pada kalimat topik. Paragraf ini disusun dari sebuah kalimat topik yang menunjukkan sebab – sebab dari hal – hal tertentu, kemudian akibat – akibatnya dijabarkan dalam kalimat – kalimat penjelas atau pengembangnya. Biasanya dalam sebuah pengembangan

paragraf sebab akibat, akibat sebab itu dipaparkan terinci terlebih dahulu di bagian depan paragraf, kemudian baru dirumuskan sebabnya di akhir paragraf. Paragraf yang berpola induktif ini disebut paragraf akibat sebab. Kata – kata yang biasa digunakan dalam kalimatnya pun sama yaitu *oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan pertimbangan bahwa, dengan alasan itu, dengan alasan ini, pengalaman membuktikan bahwa, karena.*

1. Contoh penanda pengembangan paragraf analisis tujuan seperti yang telah disebutkan di atas.

“Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala melihat kejadian itu sebagai isyarat kembali maraknya aksi premanisme (Tjr1.p2) Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2010”

Pada paragraf di atas penulis berusaha memberitahukan kepada pembaca bahwa peristiwa – peristiwa yang telah terjadi merupakan pertanda atau isyarat terjadinya aksi premanisme. Hal itu bisa dilihat pada paragraf sebelumnya yaitu paragraf dengan kode Tjr1.p1.

Penanda pengembangan paragraf analisis tujuan juga terdapat pada paragraf dengan kode – kode sebagai berikut Tjr1.p9, Tjr2.p2, Tjr4.p8, Tjr5.p5, Tjr5.p6, Tjr8.p6, Tjr8.p7, Tjr10.p7, Tjr10.p8, Tjr10.p9, Tjr12.p5, Tjr12.p6, Tjr13.p2, Tjr13.p7, Tjr15.p1, Tjr15.p8, Tjr16.p5, Tjr16.p7, Tjr17.p7, Tjr18.p5, Tjr18.p6, Tjr19.p1, Tjr20.p6, Tjr21.p5, Tjr21.p8. Jumlah keseluruhan 26 paragraf.

2. Contoh penanda pengembangan paragraf analisis bukti

“Di antara kita tentu ada yang menengarai pernyataan para pejabat itu sekadar *lip service*. Hanya berfungsi sebagai pemanis bibir atau basa-basi dalam kerangka menghibur keluarga para korban. Sebatas menabur janji kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan kinerja. Buktinya, kecelakaan KA dalam berbagai ragam dan bentuknya selalu terulang dan terulang. Secara pukul rata, setiap tahun tidak kurang dari 100 kali kecelakaan KA di berbagai tempat” (Tjr2. p3) *Kedaulatan Rakyat*, 4 Oktober 2010.

Paragraf di atas dikembangkan dengan pola pengembangan paragraf analisis bukti. Hal itu ditunjukkan dengan kalimat..... “Buktinya, kecelakaan KA dalam berbagai ragam dan bentuknya selalu terulang dan terulang. Secara pukul rata, setiap tahun tidak kurang dari 100 kali kecelakaan KA di berbagai tempat”. Penulis berusaha untuk menunjukkan bukti bahwa para pejabat hanya menyatakan janji palsu atau basa – basi dalam rangka menghibur keluarga korban kecelakaan kereta api

Penanda pengembangan paragraf analisis bukti juga terdapat pada dengan kode Tjr3.p3, Tjr12.p5. Jumlah keseluruhan 3 paragraf.

3. Contoh penanda pengembangan paragraf analisis alasan

“SKPP dengan alasan sosiologis, mungkin baru ini diajukan Kejaksaan, yakni tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan” (Tjr9. p3) *Kedaulatan Rakyat*, 12 Oktober 2010. Jumlah keseluruhan 1 paragraf.

Penanda pengembangan paragraf analisis alasan pada paragraf di atas ditunjukkan dalam kalimat “SKPP dengan alasan sosiologis”.....

Penulis berusaha menunjukkan alasan yang bersifat sosiologis atau sosial. Hal itu dapat dilihat pada tajuk rencana edisi 12 Oktober 2010.

Penanda pengembangan paragraf analisis alasan juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr8. p4. Jumlah keseluruhan 2 paragraf.

4. Contoh penanda pengembangan paragraf analisis cara

“Untuk itu harus *fairness*. Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi maupun ahli hokum. Dengan jalur tersebut, kita bias akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas. Kita belum lupa catatan kasus minyak kelapa sawit (CPO) yang mengurangi dominasi Indonesia di perdagangan dunia akibat telaah kasus yang tidak objektif” (Tjr10 p8) *Kedaulatan Rakyat, 13 Oktober 2010*.

Penanda pengembangan paragraf analisis cara pada paragraf di atas ditunjukkan dalam kalimat “Untuk itu harus *fairness*. Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi maupun ahli hukum. Dengan jalur tersebut, kita bisa akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas”

Penulis berusaha menunjukkan cara untuk bersaing di era perdagangan bebas yaitu secara terbuka diteliti secara objektif dunia prdagangan dengan menghadirkan ahli teknologi maupun ahli hukum. Hal itu dapat dilihat pada tulisan tajuk rencana edisi 13 Oktober 2010

Penanda pengembangan analisis cara juga terdapat pada paragraf dengan kode Tjr 11 p8, Tjr16.p3. Jumlah keseluruhan 3 paragraf.

Berikut ini disajikan tabel jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, dan penanda pengembangan paragraf untuk memperjelas analisis data di atas.

Tabel 5. jenis paragraf, pola pengembangan paragraf, dan penanda pengembangan paragraf.

jenis paragraf	pola pengembangan paragraf	penanda pengembangan paragraf
<p>1. paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi)</p> <p>2. paragraf perbandingan dan pertentangan</p> <p>3. paragraf contoh dan ilustrasi</p>	<p>-</p> <p>7.5 kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p> <p>7.6 kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat topik</p> <p>kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>ada sesuatu yang dipaparkan, dirinci, dan dilukiskan.</p> <p>kalimat topik berisi perbandingan dua hal, misalnya hal yang bersifat abstrak dengan hal yang bersifat konkret. Kalimat topik tersebut kembangkan dengan memperinci perbandingan tersebut dalam bentuk yang konkret atau bagian-bagian kecil.</p> <p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>sejalan dengan, serupa dengan, sama saja, demikian juga, sesuai dengan, seperti</i> dan sebagainya.</p> <p>kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh.</p>

<p>4. paragraf definisi</p>	<p>kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>misalnya, contohnya, yaitu,</i> dan sebagainya.</p> <p>kalimat topik dijelaskan panjang lebar pada kalimat pengembang.</p> <p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>adalah, yaitu, definisi, pengertian, mendefinisikan, mengartikan</i> dan sebagainya.</p>
<p>5. paragraf sebab akibat</p>	<p>5.1 kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p> <p>5.2 kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat topik</p>	<p>kalimat topik bisa sebagai sebab dan kalimat pengembang sebagai akibat. Begitu juga sebaliknya kalimat topik bisa sebagai akibat dan kalimat pengembang sebagai sebab.</p> <p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>oleh sebab itu, oleh karena itu, akibatnya, alhasil, jadi, sebab, dengan alasan ini,</i> dan sebagainya.</p>
<p>6. paragraf pertanyaan</p>	<p>kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>kalimat topik dijelaskan dengan dengan kalimat pengembang berupa kalimat tanya.</p> <p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>apa, mengapa, siapa, kapan, di mana,</i></p>

<p>7. paragraf analisis</p>		<p><i>bagaimana.</i></p>
<p>7.1 analisis tujuan</p>	<p>-kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p> <p>-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat topik</p>	<p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>tujuan, untuk,</i> dan sebagainya.</p>
<p>7.2 analisis bukti</p>	<p>-kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p> <p>-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat topik</p>	<p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>buktinya, datanya,</i> dan sebagainya.</p>
<p>7.3 analisis alasan</p>	<p>-kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p> <p>-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat topik</p>	<p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>dengan alasan, alasannya, dengan dalih, bahwa,</i> dan sebagainya.</p>
<p>7.4 analisis cara</p>	<p>kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p> <p>-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat topik</p>	<p>kata-kata yang biasa digunakan: <i>caranya, dengan cara, langkah-langkahnya, dan sebagainya.</i></p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab IV, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, jenis – jenis pola pengembangan paragraf yang ditemukan pada tulisan tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 ada tujuh jenis pola pengembangan paragraf. Ketujuh jenis pola pengembangan paragraf tersebut adalah 1) pola pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) Pola pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan, 3) Pola pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, 4) Pola pengembangan paragraf definisi, 5) Pola pengembangan paragraf sebab akibat, 6) Pola pengembangan paragraf pertanyaan, 7) Pola pengembangan analisis (analisis tujuan, analisis bukti, analisis alasan, dan analisis cara). Jadi, tidak semua jenis pola pengembangan paragraf analisis terdapat dalam tulisan tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

Kedua, peneliti juga menemukan tujuh jenis penanda pengembangan paragraf pada tulisan tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 yaitu 1) penanda pengembangan paragraf perincian dan pelukisan (deskripsi), 2) penanda pengembangan paragraf perbandingan dan pertentangan,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3) penanda pengembangan paragraf contoh dan ilustrasi, 4) penanda pengembangan paragraf definisi, 5) penanda pengembangan paragraf sebab akibat, 6) penanda pengembangan paragraf pertanyaan, 7) penanda pengembangan analisis (analisis tujuan, analisis bukti, analisis alasan, dan analisis cara). Jadi, tidak semua penanda pengembangan paragraf analisis terdapat dalam tulisan tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010.

5.2 Implikasi

Hasil dari penelitian pola pengembangan paragraf pada tulisan tajuk rencana surat kabar Kedaulatan Rakyat edisi Oktober 2010 juga dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran menulis khususnya pembelajaran menulis paragraf tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Banyak kompetensi dasar dengan penelitian pola pengembangan paragraf ini, khususnya pada standar kompetensi menulis. Berikut ini dijabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar menulis yang merupakan implementasi dari penelitian ini.

5.2.1 Standar kompetensi dan kompetensi dasar menulis kelas X semester 1

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
4.1 Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif)	4.1.1 Menulis gagasan dengan menggunakan pola urutan waktu dan tempat dalam bentuk paragraf naratif 4.1.2 Menulis hasil observasi dalam bentuk paragraf deskriptif

	4.1.3 Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif.
--	---

5.2.2 Standar kompetensi dan kompetensi dasar menulis keas X semester 2

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
12. Mengungkapkan informasi melalui penulisan paragraf dan teks pidato	<p>12.1 Menulis gagasan untuk mendukung suatu pendapat dalam bentuk paragraf argumentatif.</p> <p>12.2 Menulis gagasan untuk meyakinkan atau mengajak pembaca bersikap atau melakukan sesuatu dalam bentuk paragraf peruasif.</p> <p>12.3 Menulis hasil wawancara ke dalam beberapa paragraf dengan menggunakan ejaan yang tepat.</p>

5.2.3 Standar kompetensi dan kompetensi dasar menulis kelas XI semester 1

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
4. Mengungkapkan informasi dalam	4.1 Menulis proposal untuk berbagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bentuk proposal, surat dagang, karangan ilmiah	keperluan
--	-----------

5.2.4 Standar kompetensi dan kompetensi dasar kelas XI semester 2

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
12. Mengungkapkan informasi dalam bentuk rangkuman/ringkasan, notulen rapat, dan karya ilmiah	12.3 Menulis karangan ilmiah seperti hasil pengamatan, penelitian.

5.2.5 Standar kompetensi dan Kompetensi dasar kelas XII semester 2

Standar kompetensi	Kompetensi dasar
12. Mengungkapkan pikiran, pendapat, dan informasi dalam penulisan karangan berpola.	12.1 Menulis karangan berdasarkan topik tertentu dengan pola penembangan deduktif dan induktif. 12.2 Menulis esai berdasarkan topik tertentu dengan pola pengembangan pembuka, isi, dan penutup.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa tidak semua paragraf memiliki jenis pola pengembangan paragraf dan penanda pengembangan paragraf. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh kurangnya salah satu

unsur pada sebuah paragraf. Adapun syarat paragraf yang baik adalah mengandung unsur 1) kesatuan, 2) kepaduan, 3) kelengkapan, 4). Hal tersebut sudah dijelaskan panjang lebar dan detail pada kajian teori bab 2. Menurut Djago Tarigan (1987: 13-14), unsur sebuah paragraf adalah 1) transisi (berupa kata atau kalimat, 2) kalimat topik, 3) kalimat pengembang, 4) kalimat penegas. Keempat unsur paragraf terkadang tampil bersama – sama dalam sebuah paragraf tetapi terkadang juga hanya sebagian tampil dalam suatu paragraf. Hal ini yang menyebabkan sebuah paragraf tidak memiliki pola pengembangan paragraf tertentu dan informasi yang disampaikan tidak begitu jelas.

Keterampilan kemampuan penulis untuk menciptakan suatu karya tulis yang utuh dan padu harus lebih ditingkatkan lagi. Hal itu penting dilakukan agar pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang dibaca. Tidak hanya terbatas pada penulisan tajuk rencana saja, pola pengembangan paragraf juga penting untuk diperhatikan dalam menyusun semua bentuk tulisan apapun.

5.3 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi peneliti lain yang tertarik meneliti pola pengembangan paragraf, bagi guru Bahasa Indonesia, dan Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah.

Saran yang pertama yaitu bagi peneliti lain. Peneliti lain yang tertarik untuk meneliti tentang pola pengembangan paragraf dapat memperluas topik permasalahan penelitian, tidak hanya sebatas meneliti penanda dan jenisnya saja,

melainkan dapat meneliti kohesi dan koherensinya dan sebagainya. Di samping itu, peneliti lain juga dapat mencari wacana lain untuk diteliti, karena wacana surat kabar sudah pernah dianalisis.

Saran kedua yaitu masukan bagi guru Bahasa Indonesia. Guru diharapkan dapat memberikan perhatian lebih pada pembelajaran menulis khususnya mengenai pola pengembangan paragraf. Dengan begitu siswa makin terampil dalam menulis. Guru dapat menjadikan sebuah tulisan tajuk rencana sebagai bahan pembelajaran menulis di sekolah. Hal tersebut terdapat dalam Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam KTSP misalnya dalam Standar Kompetensi menulis kelas X semester 1 yaitu Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif) sedangkan Kompetensi Dasarnya adalah menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif.

Ketiga, bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah (PBSID). Salah satu mata kuliah yang ada di PBSID adalah Menulis 1 yang mempelajari mengenai paragraf. Diharapkan dengan adanya mata kuliah ini, mahasiswa dapat lebih mengenal tentang pola pengembangan paragraf yang terdapat pada tulisan apapun.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Buku Pedoman Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah. 2005. PBSID: FKIP: USD: Yogyakarta.

Depdiknas. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas.

<http://www.kabarindonesia.com/>

<http://komdakcommunity.blogspot.com/>

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 2 Oktober 2010. *Premanisme dan Pembangunan Masyarakat Sipil*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 4 Oktober 2010. *Kecelakaan Kereta Api Seolah Tradisi*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 5 Oktober 2010. *Profesionalisme Penanganan Teroris*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 6 Oktober 2010. *Hikmah Tragedi Petarukan*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 7 Oktober 2010. *Menutup Peluang Komersialisasi Pendidikan*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 8 Oktober 2010. *Mereaksi 'Pembatalan' Kunjungan Presiden SBY*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 9 Oktober 2010. *Kegalauan Politik Malaysia Perlu Dicermati*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 11 Oktober 2010. *Bencana Wasior, Isu Negatif dan Sensitif*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 12 Oktober 2010. *Apa Maunya Kejakung?*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 13 Oktober 2010. *'Indomie' dan Bangsa Indonesia*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 14 Oktober 2010. *Mendewasakan Pola Pikir UM KM*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 16 Oktober 2010. *'Sehari Tanpa Beras' Baik, Tapi Tak Mudah*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 18 Oktober 2010. *Mempertahankan JJC sebagai Event Kelas Dunia*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 19 Oktober 2010. *Siapa Sesungguhnya Mafia Hukum?*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 20 Oktober 2010. *UN, Agenda yang energik*

Tajuk rencana Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 21 Oktober 2010. *Berharap Banyak pada Kerja Sama DIY-Kyoto*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 22 Oktober 2010. *Meneguhkan Komitmen Sukseskan Program KB*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 25 Oktober 2010. *Memperbaiki Citra Polri yang Terpuruk*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 26 Oktober 2010. *Segera, Evakuasi Warga Merapi*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 27 Oktober 2010. *Saatnya UN Lebih Pedagogis*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 28 Oktober 2010. *Uji Nyali di Jogja Export Expo*

Tajuk rencana Kedaulatan Rakyat edisi 30 Oktober 2010. *Anatomi Gunung Berapi Perlu Diseksamai*

Keraf, Gorys. 1971. *Komposisi*. Ende: Nusa Indah.

Keraf, Gorys. 1981. *Eksposisi dan Deskripsi: Komposisi Lanjutan II*. Ende: Nusa Indah.

Keraf, Gorys. 1985. *Argumentasi dan Narasi: Komposisi Lanjutan III*. Jakarta: Gramedia.

Kusumaningrat, Hikmat dan Kusumaningrat, Purnama. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nazir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. 2003. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahardi, Kunjana. 2006. *Paragraf Jurnalistik*. Yogyakarta: Santusta.

Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Tarigan, Henry Guntur. 1984. *Menulis Sebagai Suatu keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.

Tarigan, Djago. 1987. *Membina Keterampilan Menulis Paragraf dan Pengembangannya*. Bandung: Angkasa.

Wahyuni, Rini Maria. 2000. "Penyimpangan Pengembangan Paragraf dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kompas Tahun 1997". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma. FKIP. PBSID.

Widyamartaya, A. 1990. *Seni Menuangkan Gagasan*. Yogyakarta: Kanisius.

Wiharyanto, A. Kardiyat. 2005. *Teknik Menulis Berita*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LAMPIRAN

Lampiran 1

Edisi Sabtu Pon, 2 Oktober 2010

No	Data	Kode
1	<p>BARBAR, primitif, hukum rimba, atau sebutan lain mencuat ketika khalayak ramai menonton TV yang membayangkan bentrokan dua kelompok masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, 29 September lalu. Para pemirsa TV secara gambling melihat kedua kelompok masyarakat itu membawa senjata tajam. Terlihat pula para wartawan foro dan kameraman TV leluasa meliput adegan kekerasan, tanpa terganggu sedikit pun oleh massa kedua pihak yang bentrok. Seolah aksi mereka pas kalau diliput media massa.</p>	Tjr1. p1
2	<p>Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala melihat kejadian itu sebagai isyarat kembali maraknya aksi premanisme.</p>	Tjr1. p2
3	<p>Premanisme selalu terkait dengan dunia kejahatan. Kata ‘preman’ menyuguhkan identitas kaum sipil. Dengan demikian premanisme merupakan aktifitas warga sipil yang bias mengarah pada unsur kejahatan, meski dalam praktik mereka yang digolongkan preman hanya sebagai petugas keamanan tempat hiburan malam dan sebagainya.</p>	Tjr1. p3
4	<p>Ibukota dan kota besar yang semakin banyak memiliki tempat hiburan malam, dan siang, menjadi lahan rezeki bagi kelompok masyarakat seperti itu. Jarang ditemui petugas keamanan tempat hiburan yang tak punya kelompok. Sehingga kelompok besar yang bersaing sering terlibat bentrokan karena perebutan wilayah untuk mengais rezeki. Satu bentrokan kecil di suatu tempat hiburan bisa menyulut bentrokan besar. Ketika kasus betrokan kecil terangkat di pengadilan, kedua kelompok bisa bergerak sebagai usaha mempengaruhi jalannya pengadilan. Manakala mereka berhadapan, maka adegan massa kontra massa pun terjadi. Tapi untuk kelompok</p>	Tjr1. p4

	massa preman, senjata pun bicara, sehingga munculnya orang yang meregang nyawa atau luka berat, termasuk polisi yang berusaha meleraikan, bisa terjadi.	
5	Bentrokan antara kelompok preman kebanyakan bermula pada perebutan lahan rezeki, meski terkadang diwarnai persoalan pribadi. Puncak perebutan rezeki berupa bentrokan terbatas. Namun percikan kecil bisa jadi bara yang besar, karena kelompok preman juga punya pengaruh dengan warga masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka yang tak pernah berperan sebagai preman bisa terlibat bentrokan karena solidaritas.	Tjr1. p5
6	Sebagai warga negara hukum, dalam bentrokan bentuk apapun, mereka yang terlibat secara hukum bisa jadi tersangka.	Tjr1. p6
7	Kebanyakan kriminolog mengatakan, premanisme di dalam dan di luar negeri tak mudah diberantas, karena suatu waktu jasa para preman dimanfaatkan aparat penegak hukum. Sehingga sulit menekan premanisme sampai ke titik nol.	Tjr1. p7
8	Namun kejadian di jalan Ampera, Jakarta Selatan, 29 September lalu merupakan 'lampu merah' atas membiarkannya premanisme yang diwarnai perang di jalanan umum, yang terus menerus ditayangkan di TV, sehingga bisa menimbulkan ketakutan masyarakat.	Tjr1. p8
9	Galibnya, pembangunan masyarakat sipil yang dicita-citakan, harus ditegakkan warga sipil sendiri. Jika premanisme membiak, sudah saatnya diberantas.	Tjr1. p9

Edisi Senin Kliwon, 4 Oktober 2010

No	Data	Kode
10	LAGI-LAGI kecelakaan kereta api (KA). Kali ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. KA Eksekutif Argo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya menabrak bagian belakang KA Bisnis Senja Utama jurusan Jakarta-Semarang. Sebanyak 36 penumpang tewas	Tjr2. P1

	dan puluhan lainnya luka berat dan ringan. Pada hari yang sama, di Solo juga terjadi kecelakaan KA. Gerbong belakang KA Gaya Baru Malam diserempet KA Eksekutif Bima. Seorang tewas, 4 lainnya cedera.	
11	Seperti biasa, Menteri Perhubungan atas nama pemerintah meminta maaf atas terjadinya kecelakaan transportasi missal itu. Sseraya berjanji akan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Sementara melalui jurubicara kepresidenan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan menteri terkait dan jajaran Direksi PT KAI mengusur tuntas peristiwa maut tersebut.	Tjr2. P2
12	Di antara kita tentu ada yang menengarai pernyataan para pejabat itu sekadar <i>lip service</i> . Hanya berfungsi sebagai pemanis bibir atau basa-basi dalam kerangka menghibur keluarga para korban. Sebatas menabur janji kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan kinerja. Buktinya, kecelakaan KA dalam berbagai ragam dan bentuknya selalu terulang dan terulang. Secara pukul rata, setiap tahun tidak kurang dari 100 kali kecelakaan KA di berbagai tempat.	Tjr2. P3
13	Dalam setiap peristiwa kecelakaan transportasi -- darat, laut dan udara – secara garis besar disebabkan salah satu dari dua factor. Pertama, karena factor manusia (<i>human error</i>), atau factor teknis (<i>technical error</i>). Atau malah karena factor apa yang dominant dalam terjadinya kecelakaan KA di Pemalang itu.	Tjr2. P4
14	Tentu kita sangat sedih dan merasa pilu mengapa kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara silih berganti terjadi di negeri ini. Sepertinya kecelakaan itu sudah mentradisi. Tidak ada bulan atau tahun yang tidak diwarnai peristiwa kecelakaan, yang tidak jarang memakan korban jiwa manusia dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Mengapa seakan terkesan tidak ada upaya menghentikannya, atau paling tidak meminimalisasinya.	Tjr2. P5

	Mengurangi secara signifikan frekuensinya, sehingga tidak terlalu banyak nyawa manusia yang melayang sia-sia.	
15	Tidak bisa tidak! Kementerian Perhubungan harus melakukan evaluasi menyeluruh dan super serius terhadap sarana-sarana transportasi dan mekanikanya, berikut manusia yang mengoperasikannya. Dari evaluasi itu kita berharap akan diketahui secara pasti beragam kelemahan atau kesalahan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan peralatan maupun kinerjanya. Sebab kalau tidak, peristiwa kecelakaan demi kecelakaan beragam moda transportasi akan selalu terulang dan terulang dalam batas waktu yang panjang.	Tjr2. P6

Edisi Selasa Legi, 5 Oktober 2010

No	Data	Kode
16	PUJIAN terus mengalir ke institusi Polri terkait penangkapan anggota kelompok bersenjata yang diduga sebagai pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerbu Mapolsek Hamparan Perak Deli Serdang Sumatera Utara. Dua peristiwa itu diyakini Polri bukan berdiri sendiri, melainkan terkait dengan jaringan terorisme.	Tjr3. P1
17	Dalam penyergapan di sejumlah lokasi di Sumatera Utara, polisi setidaknya menembak mati 6 tersangka. Beberapa di antaranya ditangkap hidup-hidup. Mengapa polisi menembak mati? Versi aparat kepolisian menyebutkan, para tersangka tak mau menyerah, melainkan terus melawan dengan menembaki petugas. Dalam kondisi terancam itulah polisi akhirnya menembak mati tersangka	Tjr3. P2
18	Bahkan, untuk lebih meyakinkan publik, penggrebekan itu ditayangkan stasiun televisi swasta. Aksi saling tembak antara petugas dan tersangka juga bisa terekam. Semua yang disajikan nampak meyakinkan, sehingga banyak pihak mendukung tindakan	Tjr3. P3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	kepolisian.	
19	Kita tentu merespons positif upaya Polri meringkus semua pelaku perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerbu Mapolsek Hampan Perak. Kita sangat mengapresiasi kerja Polri yang dalam waktu relative cepat bisa mengendus persembunyian tersangka untuk kemudian meringkusnya. Beberapa tersangka memang masih dalam pengejaran petugas.	Tjr3. P4
20	Di sisi lain, polisi juga mengakui bahwa kerja mereka didukung masyarakat. Acara penggrebekan tersangka diawali dari informasi masyarakat. Misalnya, para tersangka yang merasa terpojok di hutan, meminta bantuan kepada warga sekitar, namun kemudian warga justru melaporkan ke polisi. Ada pula tersangka yang meminta diantarkan warga menuju pos polisi guna menyerahkan diri. Agaknya, mereka telah menyadari bahwa aparat kepolisian benar-benar <i>all out</i> memburu pelaku.	Tjr3. P5
21	Meski demikian, beberapa pihak menyayangkan mengapa polisi menembak mati tersangka. Padahal, seandainya tersangka ditangkap dalam kondisi hidup hidup, lebih menguntungkan karena bisa dimintai keterangan guna mengungkap jaringannya. Pertanyaannya, benarkah polisi dalam kondisi terdesak yang mengancam keselamatan jiwa? Tentu harus ada pertanggungjawaban publiknya. Bahkan, setiap peluru yang melesat, harus ada pertanggungjawabannya.	Tjr3. P6
22	Kita tentu berharap agar aparat tidak salah tembak. Dalam beberapa kejadian, aparat digugat lantaran dianggap tidak professional dalam menangani kasus terorisme. Sepertinya aparat serba salah, tidak bertindak dihujat, namun bertindak dianggap berlebihan, melanggar HAM dan sebagainya.	Tjr3. P7
23	Dalam kaitan itu, kita mengingatkan, undang-undang tetap menjadi acuan dalam bertindak. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana	Tjr3. P8

	<p>Terorisme yang memberi keleluasaan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan, hendaknya tidak disalahgunakan. Karena hal itu menyangkut nasib seseorang. Sekali lagi, kita mengingatkan, setiap tindakan aparat yang bersentuhan dengan kepentingan publik harus ada pertanggungjawabannya. Hal ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan, bila aparat bertindak professional, pasti masyarakat mendukung.</p>	
--	---	--

Edisi Rabu Pahing, 6 Oktober 2010

No	Data	Kode
24	<p>MASINIS keretab api eksekutif Argo Bromo Anggrek, M Halik Rudianto, menjadi tersangka untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan manabrak kereta api (KA) Senja Utama di Stasiun Petarukan (Pemalang), Sabtu pagi lalu. Semua ini setelah Polres Pemalang dan Tim Polda jateng melakukan pemeriksaan dan menentukan pemeriksaan dan menentukan pasal-pasal yang 'menjerat' masinis.</p>	Tjr4. P1
25	<p>Kecelakaan yang menewaskan 35 penumpang dan korban luka berat lainnya itu makin menambah daftar panjang kecelakaan transportasi. Satu hal yang jamak dilakukan dalam setiap kecelakaan adalah segera mencari dan menunjuk siapa yang bersalah. Untuk kecelakaan kereta api (KA), masinis dan asisten masinis menjadi sosok yang langsung menjadi tumpuan kesalahan. Menjadi 'kambing' yang 'paling hitam'. Tak banyak yang akan jernih berpikir bahwa kondisi masinis dan asisten, bagaikan orang jatuh, tertimpa tangga bahkan kemudian diterkam harimau.</p>	Tjr4. P2
26	<p>Mengikuti liputan perihal tragedy ini, sungguh menyesakkan dada. Prihatin, sedih campur aduk dengan perasaan kemanusiaan lainnya. Marilah kita berempati tidak hanya terhadap korban kecelakaan. Akan tetapi terhadap para masinis. Suatu profesi yang benar-benar</p>	Tjr4. P3

	menuntut kesehatan lahir dan batin. Psikis maupun fisik. Suatu kondisi manusiawi yang hanya akan diperoleh setelah kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) tercukupi.	
27	Sulit untuk mengatakan kebutuhan dasar keluarga Halik Rudianto dan Giono (asisten masinis) telah tercukupi, saat media audio visual meliput suasana keluarga. Dari tampilan fisik rumah petak yang sangat sederhana – (mungkin rumah dinas?) – dihuni isteri dan dua anaknya, masyarakat awam pun akan dapat mengukur tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Pastinya, serupa juga kehidupan keluarga para masinis lainnya.	Tjr4. P4
28	Pertanyaan yang korelatif dengan kondisi itu, bagaimana mungkin sosok yang mendapat fasilitas kesejahteraan minim itu mendapat tanggung jawab yang luar biasa: membawa kereta eksekutif dengan ratusan nyawa? Korporasi tempat bekerja bisa saja membuat peraturan baku yang bersifat tak bisa diganggu gugat, terutama dalam hal penggajian. Peraturan yang tak akan pernah bisa mampudiubah oleh pekerja. Ketidakberdayaan yang jamak terpaksa diterima oleh pekerja yang di negeri ini memang sangat rendah posisi tawar-nya.	Tjr4. P5
29	Menjadikan tersangka masinis, sekalipun ada indikasi lalai karena mengantuk, nampak tak adil bagi kemanusiaan. Kecelakaan tersebut, jelas tanggung jawab korporasi. Juga tanggung jawab negara ini dalam memberi layanan transportasi masyarakat. Menjadikan masinis sebagai kambing hitam, seharusnya juga dilihat kambing yang amat-sangat lebih hitam. Yakni sosok pemangku kebijakan. Kita huga dapat mempertanyakan sensitivitas para legislative yang selain berkewajiban melakukan budgeting juga pengawasan.	Tjr4. P6
30	Kemana hati nurani para wakil rakyat sampai tidak melihat kesejahteraan buruk para masinis – sementara harus bertanggung	Tjr4. P7

	jawab pada ratusan nyawa setiap malam? Mengantuk, seperti halnya lapar, adalah ritme biologis manusia. Harus dicari penyebab masinis mengantuk saat bekerja. Siapa tahu memang dia harus bekerja ekstra untuk hasrat hidup keluarga yang tak kunjung sejahtera?	
31	Tragedy Pemalang kemarin, hendaknya menjadi <i>entry point</i> menengok kembali kelayakan hak dan kewajiban masinis. Mendesak dilakukan deregulasi, agar tidak ada lagi kecelakaan serupa. Mencari hikmah dari tragedy. Agar tak ada lagi kecelakaan serupa.	Tjr4. P8

Edisi Kamis Pon, 7 Oktober 2010

No	Data	Kode
32	MASALAH komersialisasi pendidikan masih akan jadi persoalan klasik dan tak pernah hilang, selama peluang komersialisasi itu tetap ada. Apa pun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, selalu ada celah atau peluang untuk terjadinya pelanggaran. Sebab, seperti sudah menjadi tradisi dan ‘penyakit’ umum bahwa seketat apa pun peraturan dibuat, pasti ada saja kasus pelanggaran dengan memanfaatkan peluang yang tak tersentuh dalam peraturan tersebut, termasuk khususnya dalam sector pendidikan.	Tjr5. P1
33	Sehingga, wajar kalau kemudian muncul banyak komentar terkait dengan keluarnya Keputusan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai pengganti PP 17. Karena, sebagaimana diungkapkan beberapa pengamat, kendati dalam PP tersebut ada aturan yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus menerima mahasiswa miskin minimal 20 persen, tapi peluang adanya komersialisasi masih tetap ada.	Tjr5. P2
34	Komersialisasi antara lain bisa juga terjadi manakala hukum	Tjr5. P3

	<p>ekonomi <i>supply and demand</i> tak seimbang. Selama permintaan masih jauh melebihi persediaan atau kuota, maka peluang penyimpanan dengan melakukan komersialisasi, selalu ada. Dalam dunia pendidikan, maka komersialisasi sangat terasa dan terbuka pada tahapan penerimaan mahasiswa baru, hingga pelaksanaan program belajar mengajar. Hal ini terutama dipicu oleh dominasi pemikiran bahwa pendidikan formal adalah segala-galanya dan menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang dalam dunia pendidikan.</p>	
35	<p>Memang, kita semua tahu bahwa antara tuntutan kualitas pendidikan yang tentunya membutuhkan dukungan financial atau pembiayaan akan sangat terkait dengan kebutuhan sebuah institusi pendidikan akan ketersediaan dana yang signifikan. Sehingga, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus juga sejalan dengan misi pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Jangan sampai muncul dualisme atau dikotomi di antara keduanya. Dengan demikian, tujuan mulia dari pemerintah untuk mengedepankan rakyat miskin dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, tetap harus diamankan.</p>	Tjr5. P4
36	<p>Artinya, tak ada yang salah dengan munculnya sebuah peraturan, sejauh diikuti dengan langkah pengawasan dan upaya yang terus menerus dalam menutup celah-celah munculnya komersialisasi pendidikan. Dalam kaitan inilah, kita layak menjaga konsistensi penyelenggaraan pendidikan agar jangan sampai frustrasi lantaran dibingungkan oleh peraturan yang lebih sering berubah-ubah, dan kemudian terjebak serta tergoda untuk melakukan langkah dan tindakan yang bisa diindikasikan sebagai komersialisasi.</p>	Tjr5. P5
37	<p>Apa pun, kita layak menggarisbawahi seruan Mendiknas yang mewajibkan semua PTN harus menerima mahasiswa miskin, minimal 20 persen. Misi dan tugas mulia ini harus diamankan dan harus benar-benar dibersihkan dari komersialisasi pendidikan.</p>	Tjr5.P6

Edisi Jumat Wage, 8 Oktober 2010

No	Data	Kode
38	<p>MASIH ingat <i>Inter-Governmental Group on Indonesia</i> atau IGGI? Kelompok negara-negara donor untuk Indonesia itu ‘dibubarkan’ Presiden Soeharto – karena Johannes Pieter Pronk, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda sebagai coordinator IGGI, mengkritisi masalah Ham di Indonesia. Keputusan Presiden Soeharto itu dinilai sangat berani, karena dilakukan menjelang berlangsungnya pertemuan tahunan IGGI.</p>	Tjr6. P1
39	<p>Selasa (5/10) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membuat keputusan yang sangat berani. Menunda (untuk tidak sampai menggunakan istilah ‘membatalkan’) kunjungan kenegaraannya ke Negeri Belanda. Padahal seluruh rangkaian kegiatan protokoler baik yang dilakukan pemerintah Belanda telah siap. Alasan ‘pembatalan’, menjelang kedatangan Presiden SBY di Belanda, pengadilan di negeri itu menyetujui dimulainya proses hukum atas tuntutan dugaan HAM di Indonesia.</p>	Tjr6. P2
40	<p>Memang, antara kedua peristiwa itu – ‘pembubaran’ IGGI oleh Presiden Soeharto dan ‘pembatalan’ kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Negeri Belanda – secara substantive tidak ada korelasinya. Tetapi nuansa yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yang sama-sama sangat berani itu relative sama. Ada upaya-upaya yang sangat kuat untuk memanfaatkan, baik IGGI maupun kunjungan kenegaraan, untuk kepentingan politis. Mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.</p>	Tjr6. P3
41	<p>Tentunya, saat Presiden Soeharto ‘membubarkan’ IGGI dan sewaktu Presiden SBY ‘membatalkan’ kunjungan kenegaraan ke Belanda, diputuskan setelah mempertimbangkan pula reaksi dan dampak positif-negatif yang bakal timbul, baik di dalam negeri</p>	Tjr6. P4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>maupun di kalangan dunia internasional. Reaksi atas ‘pembubaran’ IGGI di dalam negeri Indonesia waktu itu boleh dikata positif. Sebab tidak siapapun dan pihak manapun termasuk media massa, dalam situasi kehidupan politik yang represif, tidak berani melawan arus. Sementara reaksi yang timbul atas ‘pembatalan’ kunjungan yang dilakukan Presiden SBY?</p>	
42	<p>Kita menyaksikan reaksi itu sangat beragam. Ada yang menilai keputusan itu sebagai tepat – karena dikatakan Presiden SBY, digelarnya pengadilan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia itu menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Ada pula yang menengarainya sebagai blunder politik, karena dilakukan di luar kelaziman. Diputuskan pada jam terakhir menjelang keberangkatan, sehingga menghadirkan unsur <i>surprise</i> bagi pemerintah dan kerajaan Belanda pada khususnya, dan dunia internasional pada umumnya.</p>	Tjr6.p5
43	<p>Munculnya reaksi positif, pro maupun kontra, perlu kita sikapi dengan lapang dada. Pemerintah pun tentu menyadari, dalam kehidupan demokrasi siapapun an pihak manapun bebas bersuara dan mengeluarkan pendapat. Tetapi karena permasalahan yang dikritisi sangat berkait dengan harga diri bangsa Indonesia, rasanya kita sepakat untuk tidak mereaksinya secara ekstrem.</p>	Tjr6.p6

Edisi Sabtu Kliwon, 9 Oktober 2010

No	Data	Kode
44	<p>HUBUNGAN Indonesia dengan Malaysia sering memanas. Tapi kalau dirunut, kebanyakan karena persoalan hukum, antara lain perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dan masalah perbatasan. Konflik pun sempat menajam terkait penangkapan 3 petugas DKP dari Indonesia oleh Kepolisian Diraja Malaysia pertengahan Agustus.</p>	Tjr7.p1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

45	Penangkapan 3 petugas DKP berbuntut pelemparan kotoran oleh kelompok LSM Bendera terhadap Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia dan menyulut kemarahan pejabat negeri jiran itu.	Tjr7.p2
46	Kasus pengusiran maupun penyiksaan TKI Indonesia di Malaysia dan persoalan perbatasan memang mudah menyengat perasaan rakyat Indonesia, dan membawa persoalan ke tingkat diplomatic kedua negara. Tapi hingga sekarang sangat jarang terungkap kegalauan politik yang melanda Malaysia sekarang.	Tjr7.p3
47	Sebagaimana diketahui, partai UMNO yang selama puluhan tahun bisa dikatakan sebagai 'mayoritas tunggal' mengalami pukulan berat di berbagai negara bagian di Malaysia pada Pemilu, yang berbuntut terjadinya konflik internal di tubuh partai terbesar itu. Bahkan kekalahan UMNO di berbagai negara bagian Malaysia sempat membawa konflik diplomatic antara Malaysia dengan India akibat tindakan rasialis pihak UMNO.	Tjr7.p4
48	Popularitas dan soliditas UMNO menurun tapi masih berkuasa, sedangkan melejitnya partai-partai oposisi semakin menjadi ancaman bagi para tokoh UMNO. Sehingga masuk akal jika para tokoh UMNO mencari popularitas dengan berbagai cara. Terkait hal ini, mantan Deputy Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menuding partai berkuasa di Malaysia, UMNO, memanasi-manasi hubungan Indonesia-Malaysia dengan menebar ketakutan dengan membangun image bahwa seolah-olah Malaysia terancam Indonesia.	Tjr7.p5
49	Meski tidak benar, tapi sentimen terhadap Indonesia menjalar ke masyarakat. Namun Anwar yakin tidak semua masyarakat akan melakukan tindakan yang merusak hubungan dua negara serumpun ini.	Tjr7.p6
50	Anwar juga menegaskan, mayoritas rakyat Malaysia tidak membenci Indonesia. Kalau ada aura kebencian mengemuka di	Tjr7.p7

	public akibat permainan media massa Malaysia yang selalu menyampaikan hal buruk tentang Indonesia. Ia membantah pandangan bahwa mayoritas rakyat Malaysia tidak suka Indonesia. Ini hanya mayoritas kecil, kemudian dipermainkan oleh media. Anwar juga minta agar masyarakat kedua negara menjalin hubungan dan kerja sama yang baik. Masyarakat antar-dua negara ini, generasi muda, mahasiswa, anggota parlemennya bisa lebih baik berhubungan.	
51	Dari kenyataan itu jelas bahwa segala gesekan dengan Indonesia bisa dijadikan komoditi politik bagi UMNO yang makin kurang populer bagi masyarakat Malaysia.	Tjr7.p8

Edisi Senin Pahing, 11 Oktober 2010

No	Data	Kode
52	TERJADI silang pendapat berkait dengan bencana banjir di Wasior, Papua Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah musibahdiakibatkan pembalakan liar. Bantahan itu didasarkan pada laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Muarif. Sebelumnya, sejumlah LSM peduli pelestarian hutan melansir eksploitasi hutan Wasior secara berlebihan sebagai penyebabnya. Sementara Menhut Zulkifli Hasan dinyatakan, alam punya cara tersendiri untuk membalas terjadinya pembalakan liar.	Tjr8.p1
53	Kita mencermati, setiap terjadi bencana alam yang menewaskan sejumlah orang dan memporandakan infrastruktur, silang pendapat seperti itu selalu terjadi. Di satu sisi, para pegiat pelestarian alam bersikukuh bencana dalam berbagai bentuk dan intensitasnya itu sebagai dampak dari terganggunya ekologi. Berubahnya keseimbangan dalam hubungan timbale balik antara makhluk hidup dengan kondisi alam sekitar dan lingkungannya.	Tjr8.p2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Sedang di sisi lain, pemerintah selalu terkesan mengelak atau menepis adanya ‘tuduhan’ tersebut.	
54	Ada pun penyebab banjir banding di Wasior, yang pasti musibah itu telah menyentak nurani berbangsa kita. Demikian dahsyatnya – sehingga 100 orang lebih meninggal dunia dan ratusan lainnya dinyatakan hilang – mengundang pula perhatian masyarakat internasional. Salah satu di antara tokoh dunia yang menyatakan keprihatinannya adalah Menlu AS Hillary Rodham Cliton.	Tjr8.p3
55	Kita berpendapat, untuk sementara hentikan dulu terjadinya silang pendapat. Rasanya sudah lebih dari cukup para pegiat pelestari alam membeberkan penyebab terjadinya bencana Wasior dengan berbagai analisis dan argumentasi yang melatarbelakangi ‘tuduhannya’. Sementara pemerintah tidak perlu terkesan ekstra reaktif menanggapi ‘tuduhan’ itu, sampai-sampai Presiden SBY pun merasa perlu membantahnya.	Tjr8.p4
56	Yang diperlukan rakyat Wasior, lebih0lebih yang kehilangan saudara dan rumah tempat tinggalnya adalah bantuan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bukan hanya bantuan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari. Tetapi juga bantuan pengobatan, sanitasi, serta normalisasi kehidupan lingkungan sehingga Wasior berdenyut lagi. Tidak berlama-lama menjadi kota mati.	Tjr8.p5
57	Tidak terlalu berlebihan bila kita mengingatkan, penanganan yang terkesan lamban atas derita rakyat dan pemilihan lingkungan Wasior, akan dapat menghadirkan isu sensitive, mengingat masih adanya kelompok mesyarakat Papua yang selalu berusaha memanfaatkan ‘kelemahan’ dan ‘kelengahan’ pemerintah untuk kepentingan politiknya.	Tjr8.p6
58	Kita mengharapkan Presiden SBY sesegera mungkin mengunjungi Wasior, sekaligus membeberkan upaya normalisasi kehidupan masyarakatnya. Sekaligus rencana membangun kembali	Tjr8.p7

	infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang telah porak poranda. Itu semua perlu dilakukan untuk mencegah munculnya isu negative dan sensitive tadi.	
--	--	--

Edisi Selasa Pon, 12 Oktober 2010

No	Data	Kode
59	PERDEBATAN seputar penolakan Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan peninjauan kembali (PK) terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKKP) dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, terus bergulir. Apalagi, sejak awal public menduga Kejaksaan tidak ikhlas mengeluarkan SKPP Bibit-Chandra lantaran institusi penegak hukum ini masih meyakini bahwa bukti dugaan suap dua pimpinan KPK ini cukup kuat. Alhasil, SKPP itu terbit dengan 'cacat' sehingga rawan digugat.	Tjr9.p1
60	Buktinya bisa dilihat saat ini. Pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA) menganggap SKPP Bibit-Chandra bakal ditolak MA? Wallahua'alam. Apalagi MA menganggap PK tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena secara Undang-undang (UU No 5/2004) PK tak bisa diajukan untuk putusan praperadilan. Lagi-lagi, apakah Kejaksaan tak mamahami undang-undang ini?	Tjr9.p2
61	SKPP dengan alasan sosiologis, mungkin baru ini diajukan Kejaksaan, yakni tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.	Tjr9.p3
62	Kita yakin, Kejaksaan bukan tidak memahami resiko diajukannya SKPP dengan alasan sosiologis. Kalau boleh berasumsi, sejak awal sebenarnya Kejaksaan telah mengetahui bahwa SKPP yang dikeluarkannya sangat lemah dan rawan gugatan.	Tjr9.p4
63	Atas penolakan PK tersebut, Kejaksaan sampai sekarang belum bersikap. Memang ada beberapa alternative menyikapi penolakan	Tjr9.p5

	<p>tersebut. Beberapa alternative itu antara lain, Kejaksaan bisa mengeluarkan SKPP lagi (sebagai perbaikan) atas SKPP sebelumnya. SKPP perbaikan ini—ICW menyebutnya sebagai SKPP jilid II—tentu dengan alasan berbeda dari SKPP sebelumnya, yakni alasan hukum. Konstruksinya, karena tidak cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, maka Kejaksaan mengeluarkan SKPP kedua. Walaupun SKPP kedua ini tetap bisa digugat, namun setidaknya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Persoalannya, apakah Kejaksaan bersedia melakukan hal demikian—setelah sebelumnya ngotot bahwa cukup bukti untuk menjerat Chandra?</p>	
64	<p>Alternative kedua, Kejaksaan mengeluarkan <i>deponering</i> atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Bila cara ini ditempuh, niscaya tak mungkin Kejaksaan dipraperadilan seperti yang terjadi sekarang ini. Hanya saja, untuk mengesampingkan perkara, Kejaksaan harus konsultasi terlebih dulu ke DPR dan Mahkamah Agung (MA).</p>	Tjr9.p6
65	<p>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan Kejaksaan memilih <i>deponering</i>. Sebab, ada indikasi kuat bahwa kasus Bibit-Chandra direayasa. Bahkan dalam sidangnya MK telah membeberkan rekayasa yang melibatkan Anggodo Widjojo untuk mengkriminalisasi Bibit-Chandra. Bukti itu makin kuat setelah Pengadilan menyatakan Anggodo bersalah dengan melakukan permufakatan jahat untuk mencoba menyuap pimpinan KPK. Apa arti putusan ini? Berarti tuduhan terhadap Bibit-Chandra melakukan pemerasan terhadap Anggodo sama sekali tidak benar alias hanya rekayasa.</p>	Tjr9.p10
66	<p>Dengan terungkapnya fakta tersebut, apakah Kejaksaan hendak memilih alternative membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan? Jika tetap membawanya ke pengadilan, berarti kerja Tim Delapan</p>	Tjr9.p11

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	yang dibentuk Presiden SBY tak ada gunanya, karena rekomendasinya diabaikan. Dengan kata lain, pernyataan SBY agar kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan tak lagi dihiraukan Kejaksaan. Apa maunya Kejaksaan? Kalau pun hendaknya mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, beranikah menuntut bebas Bibit-Chandra?	
--	---	--

Edisi Rabu Wage, 13 Oktober 2010

No	Data	Kode
67	PRODUK mie instan 'Indomie' dari Indonesia yang beredar di Taiwan, ditarik dari dua <i>supermarket</i> terkemuka <i>Parkshop</i> dan <i>Welcome</i> . Alasan yang dipublikasikan dalam dan luar negeri Taiwan, produk mie instan tersebut mengandung pengawet <i>E218</i> atau <i>Metyl P-Hydroxybenzoate</i> (bahan pangan pengawet) yang dilarang di negeri itu.	Tjr10.p1
68	Pelaporan resmi oleh aparat setempat yang segera dipublikasikan tersebut, langsung menuai respons tak hanya di Indonesia. Pantauan media massa hingga Selasa (12/10) Singapura juga segera aktif melakukan penelitian terhadap Indomie yang juga beredar di sana. Hongkong pun melakukan hal yang sama. Menurut <i>Agri-Food Veterinarry Authory</i> (AVA) Singapura juga tidak mengizinkan pemakaian zat pengawet itu pada produk mie instan. Saat ini, AVA tengah melakukan pengujian. Mereka berjanji segera mengumumkan hasilnya ke public begitu proses tes selesai.	Tjr10.p2
69	Harus diakui jenis makanan instant ini memang sangat populer di kalangan masyarakat. Konon, tak ada penduduk yang belum pernah mencicipi mie instant. Meskipun konsumsi terhadap mie instant, sampai saat ini masih terus pro-kontra. Dianjurkan untuk konsumsi, hanya dalam kondisi darurat. Sangat dianjurkan tidak dikonsumsi terlalu sering, karena memang banyak mengandung zat (kimia)	Tjr10.p3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	tambahan untuk pewarna maupun pengawet.	
70	Membicarakan kasus mie instant yang ditarik dari peredaran di Taiwan – nampak sama penting dengan kasus lain yang tengah menjadi <i>cover story</i> dan <i>head line</i> seperti kasus KPK dan bencana alam di Wasior. Seperti diketahui, produk mie instant Indomie ditarik dari sejumlah <i>supermarket</i> di Taiwan karena mengandung zat pengawet <i>methyl p-hydroxybenzoate</i> yang dilarang di Taiwan.	Tjr10.p4
71	Namun kita perlu ikut mencermati kasus ini. Sebab ternyata <i>asam benzoate (E210)</i> dan <i>methylparaben (E218)</i> di Taiwan juga dikenal sebagai bahan pengawet yang dinyatakan aman. Otomatis, zat tersebut legal. Hal ini dikuatkan dalam sidang FAO (Organisasi Pangan PBB) di Beijing pada 15-19 Maret 2010 yang menyebut <i>methylparaben</i> layak untuk dikonsumsi.	Tjr10.p5
72	Selama ini, ternyata Indomie sudah beredar di Taiwan sejak 15 tahun lalu. Awam pun akan segera mempertanyakan: ada apa di balik tindakan (kebijakan?) menarik produk tersebut? Para pakar bisnis, akan melihat sebagai persaingan dagang yang lazim terjadi di era perdagangan bebas ini.	Tjr10.p6
73	Untuk mencegah agar tidak muncul sentiment lain yang lebih emosional, misal, seputar harga diri bangsa (yang dilecehkan) dari sudut pandang ilmiah perundangan—maka harus segera dicari solusi yang tepat, tegas dan bermartabat. Kalaupun Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga mengatakan kasus dilarang beredarnya Indomie di Taiwan berkaitan dengan perang dagang.	Tjr10.p7
74	Untuk itu harus <i>fairness</i> . Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi maupun ahli hukum. Dengan jalur tersebut, kita bias akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas. Kita belum lupa catatan kasus minyak kelapa sawit (CPO) yang mengurangi dominasi Indonesia di perdagangan dunia akibat telaah kasus yang tidak objektif.	Tjr0.p8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

75	Dalam hal mie instant ini, kita harus tampil sebagai pemenang yang elegan. Mari kita tepiskan noda sebagai bangsa (Indonesia) yang selalu kalah. Jangan sampai lagi kalah diplomasi di laut, kalah di darat, kalah di ekspor.	Tjr10.p9
----	---	----------

Edisi Kamis Kliwon, 14 Oktober 2010

No	Data	Kode
76	USAHA Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sering disebut sebagai komunitas usaha yang tangguh dan mampu bertaham pada krisis. Kenyataan menunjukkan, Yogya memiliki banyak UMKM dan juga terbukti memiliki kinerja yang membanggakan, terutama ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia.	Tjr11.p1
77	Namun demikian, masih banyak permasalahan yang muncul terkait dengan keberadaan UMKM tersebut, khususnya yang bergerak dalam sector kerajinan. Salah satunya adalah belum tampak kemampuan yang signifikan dari mereka dalam upaya mengembangkan usahanya. Sebagian besar UMKM masih bertahan dengan volume usaha mereka. Padahal, peluang untuk bisa mengembangkan usaha cukup besar, terutama terkait dengan pendanaan atau dukungan modal.	Tjr11.p2
78	Salah satu factor penyebabnya, adalah masih banyaknya perajin kita yang berpola fakir konsumtif. Sehingga, ketika mendapat kelebihan dana, baik karena profit keberhasilan usahanya, maupun karena mendapat kucuran dana dari lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan usaha, tak serta-merta mereka manfaatkan untuk mengembangkan usahanya.	Tjr11.p3
79	Tak sedikit dari perajin tersebut yang mengalokasikan dana lebih tersebut untuk membeli barang-barang tersier yang bernuansa konsumtif, dalam arti sebenarnya tak benar-benar dibutuhkan.	Tjr11.p4
80	Tak sedikit pula yang kemudian menjajakan dana tersebut untuk	Tjr11.p5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	pengadaan sarana angkutan secara berlebih dan tak proporsional, seperti mobil yang mewah serta peralatan rumah tangga yang terkesan 'wah'.	
81	Akibatnya, ketika mebdapat order dalam jumlah yang besar, seperti ketika musim liburan, selalu muncul jawaban klise, yakni kekurangan modal. Padahal, masa-masa banyak order tersebut sudah bisa diprediksi sebelumnya. Hanya saja, karena pola pikir yang belum dewasa dari sementara UMKM kita tersebut, menjadikan peluang yang muncul di depan mereka tak bisa dimanfaatkan secara optimal.	Tjr11.p6
82	Oleh karena itulah, perlu upaya-upaya dari pemerintah untyuk mendewasakan pola pikir UMKM tersebut agar bias selektif dalam mengalokasikan dana mereka. Pola konsumtif harus sedikit dikurangi, dengan tetap focus pada pengembangan usaha mereka.	Tjr11.p7
83	Bagi UMKM sendiri, sudah saatnya melakukan introspeksi, dengan komitmen untuk meningkatkan usaha mereka dan jangan sampai tergiur pada iming-iming barang-barang konsumtif, yang bias menggiring mereka berpikir praktis, dengan membelanjakan dana keuntungan usaha mereka untuk barang-barang konsumtif. Hanya dengan cara inilah, para UMKM akan bias meningkatkan status mereka dan tak selmanya nasib mereka hanya sebagai usaha kecil dan menengah saja.	Tjr11.p8

Edisi Sabtu Pahing, 16 Oktober 2010

No	Data	Kode
84	CUACA ekstrem yang ditandai hujan terus menerus, serangan hama, dan panen yang tak serentak menentikan penurunan produksi beras tahun ini. Padahal konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 139 kilogram per tahun. Lebih tinggi dari konsumsi beras di China dan Jepang.	Tjr12.p1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

85	Tingkat konsumsi beras yang tinggi dengan pola musim yang berubah sangat dramatis, secara otomatis mengganggu pola taman yang selama ini sudah jadi pegangan para petani. Sehingga segala yang ditargetkan para petani tahun ini meleset. Tidak hanya pada tanaman padi, tapi juga tanaman pangan yang lain.	Tjr12.p2
86	Dengan konsumsi beras terbesar di dunia, yang mencapai dua kali lipat konsumsi global, Indonesia memiliki banyak jenis padi, seperti padi hibrida yang mencapai lebih 30 jenis yang setara dengan varietas padi hibrida Bernas Prima, selain itu jenis padi non hibrida yang jumlahnya mencapai lebih 100 varietas dan telah dikembangkan petani.	Tjr12.p3
87	Dengan besarnya konsumsi beras, wajar jika proyeksi pertanian yang mengarah pada ketersediaan beras secara nasional terus dipacu. Tapi apa yang diharap, lain dari yang didapat. Sebab, untuk pemenuhan kebutuhan beras secara nasional sering harus impor. Padahal pada masa lalu Indonesia pernah menjadi negara pengekspor beras. Namun pertambahan jumlah penduduk hingga makin banyaknya daerah persawahan menjadi kawasan pemukiman, terkadang tak disertai pembukaan lahan baru buat pertanian. Hal ini banyak terlihat di pulau Jawa, dimana lahan persawahan yang berada di dekat jalan raya banyak yang berubah menjadi took, perkantoran dan rumah tinggal ataupun ruko.	Tjr12.p4
88	Kalau sekarang digelar 'One Day no Rice' alias satu hari tanpa beras, diharapkan dapat menghemat 1,2 juta ton dengan harapan bias mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Kampanye itu diwarnai keyataan bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati lain yang dapat dijadikan alternative makanan pokok pengganti nasi.	Tjr12.p5
89	Kata 'ketergantungan' pada tataran emosi masih bias berubah. Tapi kalau sudah menyangkut isi perut, tak mudah, dan berhadapan	Tjr12.p6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	dengan kepentingan. Kampanye 'One Day no Rice' sangat baik jika bias ditanggapi serentak. Akan lebih baik jika kampanye seperti itu juga disertai penggalakan jenis tanaman pangan yang bias menjadi makanan pokok.	
90	Dari tinjauan para pakar, tanaman padi mengandung gas metana yang menyumbang pemanasan global. Sedangkan makanan pokok pengganti nasi yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia, seperti sagu, ubi, jagung dan bahan lainnya yang bisa dikembangkan. Tapi sangat jarang dipopulerkan, sehingga tak punya daya saing menghadapi nasi sebagai makanan utama.	Tjr12.p7
91	Jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa disertai pembukaan lahan persawahan padi, takkan mudah mengatasi ketergantungan pada beras. Oleh karena itu soal makanan pokok alternative harus dimulai pada setiap keluarga. Tanpa upaya penyadaran di tingkat local, musykil orang akan mencoba hidup tanpa beras. 'One Day no Rice' hanya akan menjadi sekadar slogan.	Tjr12.p8

Edisi Senin Wage, 18 Oktober 2010

No	Data	Kode
92	HARIAN ini menulis, Jogja Java Carnival (JJC) merupakan event kelas dunia. Menjadi ikon wisata internasional. Salah satu di antara tengarnya adalah, hadirnya beragam atraksi budaya yang ditampilkan komunitas lokal, nasional, regional, dan internasional.	Tjr13.p1
93	Tidak berlebihan kiranya ketika Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwana X menyatakan, JJC telah membuat Yogyakarta sebagai kota budaya yang semakin hidup. Beragam atraksi yang ditampilkan dalam JJC mampu menarik perhatian wisatawan lokal, domestik, maupun internasional.	Tjr13.p2
94	Sebagai warga kota Yogyakarta khususnya dan Provinsi DIY pada	Tjr13.p3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>umumnya, kita merasa bangga dengan adanya event tersebut. JJC yang berlangsung untuk yang ketiga kalinya itu, sungguh membuat hati kita <i>mongkog</i>. Kehadirannya semakin melengkapi sederet agenda tahunan yang telah dikenal luas segara nasional. Keberadaannya kian meneguhkan Yogyakarta sebagai kota tujuan wisaa dengan keanekaragaman produk seni dan budaya.</p>	
95	<p>JJC 2010 yang berlangsung semarak dan meriah itu seakan menandai puncak komiyman Pemkot Yogyakarta di bawah kepemimpinan Walikota Herry Zudianto dalam mengangkat harkat dan martabat yogyakarta yang multipredikat. Paling tidak, dua predikat tercermin secara gambling dalam peristiwa itu. Pertama, pedikatnya sebagai kota seni dan budaya yang terekspresikan dalam berbagai produk kreatif dan inovatif. Kedua, predikatnya sebagai miniature Indonesia yang terekspresikan dalam aneka penampilan yang dipersembahkan oleh putra-putri dari sejumlah daerah di Indonesia.</p>	Tjr13.p4
96	<p>Ya, kita menengarai JJC tahun ini merupakan puncak komitmen Walikota Herry Zudianto dalam meneguhkan Yogyakarta sebagai ikon wisata internasional. Tanppa kita sadari, puncak komitmen itu terjadi menjelang berakhirnya pengabdian Herry Zudianto sebagai Walikota Yogyakarta. Sebab seperti kita ketahui, tahun 2011 mendatang merupakan tahun terakhir masa jabatannya yang kedua.</p>	Tjr13.p5
97	<p>Terbesit semacam peranyaan (bernada iseng). Bagaimana nasib JJC sepeninggal Herry Zudianto nantinya? Akankah event kelas dunia itu masih akan berlanjut di tahun-tahun mendatang? Pertanyaan demikian tentunya berangkat dari adanya pemeo yang sering terjadi di negeri kita, yakni 'ganti pimpinan ganti kebijakan'. Dalam skala nasional, pemeo seperti itu dapat kita saksikan di saat terjadi kepemimpinan nasional atau pimpinan suatu kementrian.</p>	Tjr13.p6
98	<p>Tidak ada salahnya memang kita melempar pertanyaan semacam</p>	Tjr13.p7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	itu dalam kerangka antisipasi. Maksud kita, siapapun dan di kekuatan politik manapun yang akan memimpin Kota Yogyakarta nantinya, JJC harus dipertahankan. Harus dilestarikan sebagai produk dan peristiwa yang telah berskala dunia. Dngan demikian menjadi kewajiban kita semua, warga Kota Yogyakarta khususnya, untuk mengawal agar event JJC tetap abadi.	
--	--	--

Edisi Selasa Kliwon, 19 Oktober 2010

No	Data	Kode
99	MASYARAKAT kini sedang disuguhi berbagai atraksi hukum yang terkadang membanggakan, tapi sekaligus membingungkan. Ketika aparat penegak hukum gencar memburu dan menangkap mafia hukum, masyarakat pun bertanya: benarkah yang ditangkap aparat adalah actor mafia hukum yang sesungguhnya?	Tjr14.p1
100	Kita ambil contoh kasus mafia pajak dengan tokoh sentral mantan pegawai Gayus Tambunan. Dalam persidangan terungkap fakta keterlibatan jenderal polisi dalam praktik kotor tersebut. Tak kurang kesaksian Kompol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (penyidik kasus Gayus) yang menunjuk keterlibatan atasannya dalam kasus mafia pajak. Arafat dan Sri Sumartini merasa dikorban oleh atasannya. Namun, hingga sekarang sang atasan tak pernah dibawa ke pengadilan.	Tjr14.p2
101	Dua jendral yang disebut-sebut terkait dengan kasus mafia pajak itu adalah Brigjen Edmond Ilyas dan Brigjen Radja Erizman. Meski keduanya telah diperiksa di siding kode etik profesi dan dinyatakan bersalah, namun tidak otomatis berlanjut ke pengadilan negeri atau tipikor. Bahkan mereka malah dipromosikan sebagai staf ahli Kapolri. Inilah pemandangan yang bisa dilihat secara kasat mata oleh public. Para penyidik pelaksana harus menanggung sendiri perbuatannya. Bukankah tidak mungkin para bawahan bertindak	Tjr14.p3

	sendiri tanpa izin atau arahan atasan untuk menangani kasus sekelas Gayus?	
102	Belum habis kebingungan kita, kita kembali dikejutkan dengan persidangan kasus mafia hukum yang menyeret Sjahril Djohan. Sebelumnya, nama itu dimunculkan Komjen Susno Duadji ketika dimintai keterangan di hadapan Komisi III DPR. Pengakuan itu pula yang kemudian justru mengantarkan Susno sebagai tersangka kasus suap penangkaran ikan arwana. Bahkan, Susno dituduh korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar saat dirinya menjabat Kapolda Jabar. Uniknya, hanya Susno-lah perwira tinggi Polri yang dijadikan tersangka.	Tjr14.p4
103	Pengadilan telah memvonis Sjahril Djohan dengan hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan korupsi secara bersama-sama. Dengan divonis bersalahnya Sjahril Djohan, posisi Susno nampak makin terjepit. Mengapa? Karena, berdasar fakta yang terungkap di persidangan, melalui Sjahril inilah uang suap Rp 500 juta mengalir ke Susno Duadji terkait dengan penanganan kasus ikan arwana. Logika hukumnya, bila pemberi terkena hukuman, maka penerima atau pihak yang disuap juga terkena sanksi. Polisi kasus Sjahril kian jelas. Apalagi, Sjahril menyatakan telah menerima putusan hakim tanpa mengajukan banding—walaupun dirinya semula menyatakan keberatan dan menginginkan bebas. Dengan kata lain, Sjahril telah mengakui dirinya bersalah dan menerima hukuman yang dijatuhkan majelis hakim.	Tjr14.p5
104	Bagaimana dengan Susno? Bila hakim meyakini kebenaran yang disampaikan Sjahril tentang suap Rp 500 juta, tentu posisi Susno sangat terancam. Meski begitu, agar peradilan berjalan fair, Susno harus diberi kesempatan membela diri. Artinya, pengakuan saja tidak cukup untuk menjerat seseorang bersalah.	Tjr14.p6
105	Memang terasa aneh, mungkinkah Susno membongkar berbagai	Tjr14.p7

	kasus—termasuk kasus ikan arwana yang melibatkan Sjahril Djona—namun pada akhirnya justru memenjarakan diri sendiri? Lantas, siapa sesungguhnya mafia hukum itu? Wallahua’lam.	
--	--	--

Edisi Rabu Legi, 20 Oktober 2010

No	Data	Kode
106	PERNYATAAN dari Ungin Edy Wibowo (dari Badan Standar Pendidikan Nasional-BSNP) yang menyatakan bahwa penetapan standar kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2011 harus ditentukan pula oleh pemerintah daerah (Pemda) (KR< 19/10), menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Ada kelegaan tersendiri terhadap ‘kearifan’ BSNP yang memberi hak menentukan standar kelulusan.	Tjr15.p1
107	Khususnya bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang pencapaian prestasi UN 2010 mendapat reputasi ‘jeblok’ akibat banyak peserta UN yang gagal meraih angka di atas nilai standar. Pernyataan tersebut merupakan tantangan tersendiri, untuk kembali membuktikan tingkat keberhasilan UN yang masih menyandarkan pada penilaian kuantitatif dan kognitif melalui nilai tinggi.	Tjr15.p2
108	Kita boleh memberi acungan dua ibu jari atas kebijakan tersebut. Sebab menunjukkan BSNP melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Jika dilihat dari agenda UN sekitar caturwulan pertama 2011, ekspose kebijakan ini relative masih ‘pagi’. Tentu saja akan memberikan dampak maksimal bagi penyelenggaraan dan pencapaian prestasi UN tahun depan. Sebab memberi waktu pihak pemda untuk menyiapkan segala hal agar hasil maksimal.	Tjr15.p3
109	Terlepas dari pro-kontra UN, realita yang harus kita terina bahwa pemerintah telah merancang UN untuk menjawab amanat undang-undang. Jika kita melihat pasal 57 ayat 1 UU Sisdiknas yang	Tjr15.p4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	ditafsirkan oleh Pasal 63 ayat 1 PP 19 tahun 2005, berbunyi: penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintahan.	
110	Maka secara tegas memberi peluang yang besar bagi guru, satuan pendidikan dan pemerintah (daerah) untuk evaluasi. Karut marut urun rembug untuk agenda UN – telah menimbulkan paradoks sebuah proses evaluasi. Muncul pro-kontra yang seolah noktah hitam UN. Padahal pada saat yang bersamaan, seluruh peserta didik yang terkena agenda UN serius mempersiapkan diri. Sebenarnya, fenomena UN adalah agenda yang energik. Tentu saja, energi yang positif – mendorong murid sekolah dasar dan menengah untuk serius belajar. Belajar menempa diri dan belajar fair dievaluasi oleh pihak lain.	Tjr15.p5
111	UN juga agenda energik bagi guru sebagai sosok yang harus kompeten. Guru secara integrative dituntut memiliki kompetensi kepribadian, social, pedagogic dan kompetensi professional, jika guru hanya dianggap sebagai penyampai materi, maka siapa saja ‘dapat’ jadi guru. Namun ini menjadi sumber malapetaka pendidikan.	Tjr15.p6
112	Apakah UN harus dilanjutkan? Jika dirunut UN merupakan amanat UU, maka UN memang harus diselenggarakan. Meski, kita tidak perlu menutup mata pada perdebatan dan pemikiran yang solutif. Semua pihak perlu diajak memahami bahwa UN dapat digunakan sebagai entry point kompetensi peserta didik atas pelaksanaan proses system pendidikan.	Tjr15.p7
113	Mari kita ‘mengkritisi’ UN dengan kepedulian yang tulus. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Meskipun secara arif juga harus disadari bahwa UN bukan sebagai	Tjr15.p8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	'pertanggungjawaban' tugs-tugas pendidikan. Dunia pendidikan memang perlu dukungan konsisten dan komitmen dengan niat baik yang tulus dari semua pihak.	
--	---	--

Edisi Kamis Pahing, 21 Oktober 2010

No	Data	Kode
114	TAHUN 2010 ini, genap seperempat abad usia kerja sama <i>sister province</i> antara Pemda DIY dengan Kyoto Prefecture, Jepang. Sebuah usia yang tak pendek bagi sebuah kerja sama yang bisa diwujudkan dalam aktivitas konkret yang berkelanjutan.	Tjr16.p1
115	Memang, kerja sama yang dirintis 25 tahun yang lalu oleh Gubernur Kyoto, Hayashida Yukio dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut memiliki nilai strategis bagi kedua Pemerintah Daerah, dengan berbagai sector kerja sama, seperti seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, lingkungan, industri, iptek, serta perdagangan. Hamper setiap tahun kerja sama ini diisi dengan kegiatan dari kedua belah pihak. Sehingga, ketika Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir sendiri pada peringatan 20 tahun dan 25 tahun kerja sama DIY-Kyoto tersebut, beberapa waktu lalu, makin meneguhkan obsesi jangka panjang dari sinergisitas tersebut.	Tjr16.p2
116	Tak berlebihan kalau kemudian masyarakat DIY, khususnya para stakeholder berharap agar kerja sama sinergis DIY dan Kyoto tersebut dapat terasa lebih hidup dan berkesinambungan. Caranya, bisa dengan mengembangkan kerja sama G2G atau <i>government to government</i> menuju P2P atau <i>private to private</i> .	Tjr16.p3
117	Untuk itu, sekiranya perlu dihidupkan kembali <i>joint committee</i> yang mengikutsertakan elemen <i>private</i> atau masyarakat, misalnya dalam bentuk <i>Joint Committee Business to Business / JC-B2B</i> , yang idealnya diprakarsai oleh kalangan pelaku bisnis sendiri. Hal	Tjr16.p4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	ini didasarkan fakta bahwa di pihak Kyoto sendiri benar-benar terpisah antara <i>government</i> dengan <i>business</i> ..	
118	Dengan demikian, mungkin perlu adanya peran <i>arranger</i> dari kedua belah pihak. Hal ini pula yang telah dilakukan oleh <i>International Business Council / IBC</i> dengan fasilitator <i>Japan-Indonesia Association Economic Cooperation / JIAEC</i> , yang telah 10 tahun sukses dengan program pengiriman trainees ke Jepang. Bahkan, ada investor yang kemudian berminat investasi di Yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan dengan pihak Korea dan nanti dengan pihak asing lainnya. Misalnya, melalui IBC Australia, dan sebagainya.	Tjr16.p5
119	Hanya sayangnya, ada kesan borokrat tak mau berbagi peran dengan swasta. Padahal, kita bisa mencontoh era tahun 1980-1990an, ketika misi dagang selalu mengikutsertakan swasta, namun dengan sasaran yang jelas dengan system subsidi. Bahkan, dulu, ketika Sri Sultan HB X menjabat sebagai Ketua Umum Kadin DIY, dengan hasil yang konkret. Orientasinya jelas, bukan <i>cost</i> , namun <i>outcome</i> .	Tjr16.p6
120	Apa pun, kerja sama DIY-Kyoto layak ditangkap dan diisi oleh semua pihak, khususnya kolaborasi antara birokrasi, praktisi dan akademisi. Tak berlebihan kalau kita semua, terutama warga Yogya, menaruh harapan yang besar pada kelangsungan kerja sama DIY-Kyoto ini.	Tjr16.p7

Edisi Jumat Pon, 22 Oktober 2010

No	Data	Kode
121	SEBANYAK 1.500 kader program Keluarga Berencana (KB) se-Kota Yogyakarta mengikuti Temu Kader KB di Gedung Wana Bhakti Yasa, Kamis (21/20) kemarin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggelorakan kembali pelaksanaan KB. Sekaligus	Tjr17.p1

	meneguhkan komitmen Pemkot Yogyakarta dalam ikut meyukseskan prohram nasional yang selama satu decade ini terbengkalai.	
122	Keterbelakangan itu, seperti dikemukakan Kasi Warga Sejahtera Kantir KB Kota Yogyakarta Tri Karyadi (KR 20/10), tersaksikan dari banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang tidak mengikuti KB. Jumlahnya meliputi 13.180 PUS dari seluruh 48.216 PUS yang ada di Kota Yogyakarta. Suatu angka yang relative besar, karena di atas 30 persen.	Tjr17.p2
123	Kantor KB Kota Yogyakarta menengarai, tingginya angka PUS yang tidak ber-KB itu antara lain disebabkan minimnya tenaga penyuluh KB. Dari 45 kelurahan yang ada, jumlah penyuluh KB hanya 33 orang—sehingga ada kalanya seorang penyuluh mengampu 2 kelurahan. Akibatnya kinerjanya tidak bisa maksimal, yang berdampak pada tingginya angka <i>unmet need</i> —banyaknya PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani.	Tjr17.p3
124	Secara umum, selama hamper satu decade di era reformasi, Program KB Nasional tidak lagi gegap gempita. Struktur pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan program KB nyaris tak terdengar lagi. Desentralisasi, yang biasa diistilahkan dengan otonomi daerah (otda), membawa konsekuensi terjadinya pergeseran pusat kebijakan. Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten (Pemkot-Pemkab), sebagaimana tertuang dalam UU No 32 tahun 2004.	Tjr17.p4
125	Seiring dengan adanya UU yang mengamatkan sebagian kewenangan dan pembangunan – termasuk di dalamnya KB – diserahkan kepada Pemkot-Pemkab, menyebabkan Program KB menghadapi tantangan yang amat berat. Hal ini dikarenakan belum semua Pemkot-Pemkab mempunyai persepsi dan pemahaman yang	Tjr17.p5

	sama tentang arti penting dan strategisnya KB bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program KB tidak lagi menjadi prioritas di lapangan.	
126	Sejumlah besar Pemkot-Pemkab memandang dengan sebelah mata, yang tercermin dari lemahnya komitmen terhadap kelembagaan. Dari kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah KB (SK PDKB) yang ada, 80% lebih sudah diperdakan. Namun sebagian besar (65%) masih merger. Tidak berdiri utuh, tetapi digabung dengan instansi lain. Kondisi seperti ini jelas membahayakan pembangunan di bidang kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dikhawatirkan menjadi tidak terkendali, sehingga terjadilah <i>babby boom</i> .	Tjr17.p6
127	Kita mengapresiasi temu Kader KB yang diselenggarakan Kantor KB Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan sebagai langkah awal dalam menggelorakan kembali pelaksanaan Program KB di Kota Yogyakarta – yang di masa lalu, bersama 4 kabupaten lain se-DIY, mendapat predikat sebagai <i>show window</i> pelaksanaan Program KB Nasional. Sekaligus sebagai pertanda meningkat dan teguhnya komitmen (politik) Pemkot Yogyakarta dalam menyukseskan program kependudukan.	Tjr17.p7

Edisi Senin Legi, 25 Oktober 2010

No	Data	Kode
128	JANJI adalah hutang yang harus dibayar atau dilunasi. Demikianlah, setelah komjen Pol Timur Pradopo resmi menjabat Kapolri, ia dituntut menepati janjinya. Melaksanakan 10 program strategis yang dihidangkannya sebagai menu pokok sewaktu menjalani uji kelayakan, <i>fit and proper test</i> , di depan para anggota Komisi III DPR RI.	Tjr18.p1
129	Kehadiran Timur Pradopo di pucuk pimpinan Polri, bagi sementara	Tjr18.p2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>kalangan memang mengejutkan. Namanya baru disebut setelah berbagai pihak dan kalangan mengkritisi dua kandidat yang diajukan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, yakni Komjen Nana Soekarna. Nama Timur Pradopo yang tengah menjabat Kapolda Metro Jaya tiba-tiba menyeruak atas usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.</p>	
130	<p>Terangkatnya nama Timur Pradopo sebagai kandidat Kapolri juga menuai kontroversi di tengah masyarakat. Terutama dari kalangan pegiat LSM peduli HAM. Timur Pradopo ditengarai dan dinilai bersinggungan langsung dengan sederet kasus HAM baik sewaktu menjabat kapolres di wilayah Polda Metro Jaya, maupun saat menjadi Kapolda Metro Jaya. Kasus-kasus itulah yang kemudian dijadikan amunisi para anggota Komisi III DPR RI untuk ‘memberondongnya’.</p>	Tjr18.p3
131	<p>Mengantisipasi ‘berondongan’ itulah kiranya yang mengharuskan Timur Pradopo menyiapkan 10 menu pokok strategis sewaktu menjalani uji kelayakan. Nampaknya ia berhasil meyakinkan para anggota dewan yang terhormat, sehingga semua fraksi – meski ada yang menyertainya dengan notasi – menyetujui menjadi Kapolri yang baru.</p>	Tjr18.p3
132	<p>Sederet panjang tugas terbentang di hadapan Timur Pradopo menyusul pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat pecan lalu. Langkah pertama yang kemungkinan besar dilakukan adalah merestrukturisasi pimpinan badan dan lembaga di Mabes Polri, dengan menempatkan sosok-sosok terpercaya yang kapabel dan akseptabel. Strukturisasi pimpinan ini sangat diperlukan dalam upaya menopang dan mendukung kinerja sesuai skala prioritas, menghadirkan menu demi menu yang terangkum dalam 10 program strategis yang dijanjikannya.</p>	Tjr18.p4

133	Masyarakat luas memang sangat mendambakan Timur Pradopo mampu memperbaiki citra Polri yang tengah terpuruk. Mengembalikan citra utamanya sebagai penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat. Sebagai penegak hukum, Polri dituntut bertindak proporsional dan rasional – bukan malah menjadi bagian dari masalah sebagai dampak dari salah langkah dan kebijakan yang aporsional dan irasional – seperti antara lain tersaksikan dari kasus rekening gendut para perwira tingginya.	Tjr18.p5
134	Sedang dalam kaitan dengan tugas pokoknya sebagai pengayom masyarakat, Polri dituntut mampu membersihkan citranya dengan benar-benar mampu menghadirkan rasa ayom dan ayem. Bukan malah menjadikan perorangan atau pihak yang meminta pengayoman sebagai objek, sehingga pameo ‘melapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing’ dapat terkikis.	Tjr18.p6

Edisi Selasa Pahing, 26 Oktober 2010

No	Data	Kode
135	MASYARAKAT di sekitar kawasan Merapi kini harus bersiaga bila sewaktu-waktu gunung api teraltif di dunia ini meletus. Memang bukan sekali ini masyarakat harus siap-siap menghadapi bencana. Tujuannya jelas, jangan sampai ada korban jiwa. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungapian (BPPTK) mengindikasikan meletusnya Gunung Merapi tinggal menunggu waktu. Karena itu, Pemda harus menyiapkan segala sesuatunya guna memperkecil resiko bahaya letusan.	Tjr19.p1
136	Peringatan yang disampaikan BBPTK ini tentu tak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk antisipasi agar tak timbul korban jiwa ketika Merapi benar-benar meletus. Meski dikatakan bahwa letusan tinggal menunggu waktu—antara lain didasarkan pada indicator gerakan magma yang makin mendekati	Tjr19.p2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>permukaan puncak Merapi serta semakin banyaknya multiphase hingga 500 kali per hari—namun kapan waktunya, tak ada yang bisa memprediksi. Para ahli mengkhawatirkan bila letusan itu bersifat eksplosif, yang risiko bahayanya lebih tinggi ketimbang letusan biasa khas Merapi. Letusan khas Merapi yakni munculnya guguran lava yang diikuti awan panas atau sering disebut sebagai ‘wedhus gembel’.</p>	
137	<p>Menyusul naiknya status Merapi menjadi siaga dan kemarin pagi dinaikkan lagi menjadi awas, benarkah Pemkab sudah mempersiapkan segala sesuatunya guna mengantisipasi terjadinya letusan? Sabtu kemarin memang telah digelar apel kesiapsiagaan yang melibatkan jajaran Muspida setempat. Berbagai langkah antisipasi nampaknya juga telah dilakukan, antara lain dengan menyiapkan barak pengungsian, perbaikan jalur evakuasi beserta sarana dan prasarana penunjangnya serta sosialisasi dan peringatan dini bila terjadi letusan. Kini dengan dinaikkannya status menjadi awas, evakuasi warga pun harus segera dilakukan.</p>	Tjr19.p3
138	<p>Langkah antisipasi memang tak selalu sesuai harapan warga. Misalnya, langkah penutupan penambangan untuk sementara waktu, tak sepenuhnya diterima penambang untuk sementara waktu, tak sepenuhnya diterima penambang. Sebagian penambang merasa keberatan lantaran pekerjaan menambang merupakan satu-satunya mata pencaharian hidup. Sampai kapan mereka berhenti menambang, belum bisa dipastikan.</p>	Tjr19.p4
139	<p>Kita tentu mendukung upaya semacam itu, namun akan lebih bijak bila Pemkab juga memberi alternative solusi agar para penambang bisa tetap bekerja di luar lokasi bahaya. Keselamatan nyawa manusia tentu harus diutamakan ketimbang aspek lainnya.</p>	Tjr19.p5
140	<p>Sedang terkait sosialisasi dan peringatan dini bahaya Merapi, nampaknya juga belum disebarakan secara optimal oleh Pemkab.</p>	Tjr19.p6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Temuan di lapangan menunjukkan, baik guru maupun siswa SD Negeri 2 Krinjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang merasa takut bila Merapi benar-benar meletus. Mereka tak tahu harus berbuat apa, karena selama ini tak pernah mendapat sosialisasi seputar bagaimana cara menyelamatkan diri bila Merapi meletus.</p>	
141	<p>Padahal, jarak sekolah mereka dengan Merapi hanya 6 kolimeter. Karenanya, sosialisasi atau arahan dari Pemkab tak boleh ditunda-tunda, karena ini menyangkut nasib sekitar 88 siswa yang belajar di sekolah tersebut. Apalagi, tak ada yang bisa memastikan kapan tepatnya Merapi meletus. Lebih baik segera bertindak sebelum terlambat.</p>	Tjr19.p7

Edisi Rabu Pon, 27 Oktober 2010

No	Data	Kode
142	<p>MASYARAKAT pendidikan negeri ini sudah pasti merespons positif rencana Panitia Kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat yang hendak merevisi pasal 71 dan pasal 72 pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebab pada pasal-pasal itulah terletak dasar masalah munculnya kritik 'sisi negatif' pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selama ini. Diharapkan dengan selesainya revisi, UN akan makin sempurna sebagai salah satu agenda pendidikan Indonesia yang akan membawa membaiknya kualitas pendidikan.</p>	Tjr20.p1
143	<p>Satu hal yang sangat krusial adalah upaya Panja untuk menolak hak veto UN dalam kelulusan siswa. UN tidak menjadi penentu mutlak kelulusan, meski dalam pasal 72 ada 4 syarat kelulusan yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki nilai baik dalam moral dan kepribadian, lulus mata pelajaran iptek dan lulus UN.</p>	Tjr20.p2

144	<p>Kita menunggu <i>entry point</i> apa yang hendak digunakan Panja untuk melakukan revisi atas pasal-pasal tersebut. Muara yang dituju, nampaknya sudah sangat jelas. Yakni agar UN tidak menjadi satu-satunya penentu final kelulusan siswa. Masyarakat berharap Panja mampu memposisikan diri dengan pijakan pedagogic yang ideal. Bukan pijakan politis. Sehingga ada kesadaran dasar bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah UN yang mampu membuat penyesuaian dengan perkembangan zaman. Tidak hanya berkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Akan tetapi juga aspek humanistic, seperti kearifan local dan moral, etika dan estetika.</p>	Tjr20.p3
145	<p>Panjak juga diharapkan mampu memformulasikan apa yang dimaksud oleh para kritikus pendidikan selama ini—khususnya tentang realita bahwa UN lebih menitikberatkan pada aspek kognisi. Artinya, inilah saatnya Panja harus mampu masuk ke ranah afeksi yang selama ini ‘ditiadakan’. Sebab sebenarnya pendidikan yang meninggalkan dan menanggalkan aspek afektif, hanya akan mendapat pelajaran capital tanpa membuahkan pendidikan yang pedagogis. Ini sesuai dengan ‘santapan’ sehari-hari pada pendidik, bahwa edukatif tidak sama dan membangun dengan pedagogis.</p>	Tjr20.p4
146	<p>Mumpung sedang proses revisi, masukan ini semoga diakomodasikan untuk keperluan masa datang yang sangat memerlukan pendidikan komprehensif meliputi kognisi, afeksi dan psikomotorik. Jika tiga pijakan yang mutlak sebagai fondasi bangunan pendidikan ini sudah disepakati – maka teknik ujian bisa dirumuskan sesuai dengan tujuan UN. Panja juga seharusnya menengok teori-teori ilmu pendidikan (pedagogis). Atau setidaknya, anggota Panja adalah orang yang memiliki bekal ilmu tersebut. Hal ini untuk mencegah kebijakan yang dihasilkan meleset lagi dari substitusi pendidikan. Atau bahkan dibelokkan</p>	Tjr20.p5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	menjadi kebijakan politis.	
147	Setidaknya Panja juga mau memahami, bahwa pendidikan di Milenium II (abad 21) ini sudah bergeser jauh dari ‘masa lalu’ yang bertitik berat pada penguasaan isi ilmu pengetahuan seperti literature, sejarah, sains, dan lain-lain. Menuju paradigma baru yakni bertujuan agar siswa memiliki skill dan ability untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan isi ilmu pengetahuan – guna memecahkan masalah hidup untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Jika dulu konsep pendidikan bagaikan ‘disuapi’ oleh guru. Sekarang guru dan murid, harus discovery dan inquiry. Menemukan materi dan mendemonstrasikan melalui peralatan masakini yang notabene adalah multimedia.	Tjr20.p6
148	Sesungguhnya, UN tidak hanya menjadi ujian bagi siswa. Akan tetapi system pendidikan negara kita.	Tjr20.p7

Edisi Kamis Wage, 28 Oktober 2010

No	Data	Kode
149	PAMERAN Akbar bertajuk Jogja Export Expo (JEE) kembali digelar, 27-30 Oktober 2010, di Jogja Expo Center/JEC. Pameran yang digelar setiap tahun ini menjadi ajang kompetisi produk inovatif kerajinan bernuansa ekspor. Dalam event ini pula, para perajin dan pengusaha selaku seller bertemu langsung dengan buyers. Dengan demikian, akan terjadi interaksi langsung yang sekaligus bisa menjadi ajang ‘uji nyali’ produk daerah dalam upaya menembus pasar ekspor.	Tjr21.p1
150	Sebagaimana diketahui, pameran yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DIY tahun 2010 ini merupakan putaran yang kelimabelas. Untuk tahun ini, Pemprov DIY, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) DIY serta organisasi lainnya. Terbukti, dari tahun ke	Tjr21.p2

	tahun, pameran ini mendapat apresiasi yang bagus dari public. Selalu muncul inovasi produk baru dalam pameran tersebut.	
151	Di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat sekarang ini, maka eksistensi produk kerajinan menjadi komoditas yang benar-benar diunggulkan, khususnya dalam mendukung kinerja ekspor non-migas. Secara nasional, kinerja ekspor terus dipacu, dan pemerintah secara konsisten dan terus-menerus melakukan langkah-langkah konkret dalam mendukung kebangkitan kembali ekspor kita, setelah dua tahun lalu dihempas dampak krisis financial global.	Tjr21.p3
152	Sehingga, sangat tepat tema yang dipatok untuk penyelenggaraan JEE tahun 2010 ini, yakni <i>Competitive Advantage To Global Market</i> . Sungguh menantang, khususnya dalam menghadapi persaingan produk sejenis dari negara lain, khususnya China, dan beberapa negara tetangga kita di kawasan Asia, seperti Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam.	Tjr21.p4
153	Dengan memacu para pengusaha dan perajin kita untuk memiliki jiwa yang tangguh menghadapi kompetisi global, diharapkan akan muncul banyak pendatang baru, dengan semangat baru, inovasi baru, dan siap menghadapi tantangan baru.	Tjr21.p5
154	Tak berlebihan istilah ‘uji nyali’ diberikan pada ajang gelar produk kerajinan di JEE tersebut. Karena, masing-masing stand dituntut untuk siap dengan segala kemungkinan, terkait dengan selera dan tuntutan pasar. Sebab, selama ini, ada kesan sebagian perajin dan pengusaha kita bersikap <i>nrimo</i> , dan tak mampu mengangkat nilai dari harga jual produk yang mereka ciptakan dengan susah-payah.	Tjr21.p6
155	Dibutuhkan keberanian dari pengusaha dan perajin kita untuk memasuki pasar global, dengan mengedepankan unggulan kompetitif. Predikat ‘tahan banting’ bisa saja diberikan kepada perajin dan pengusaha daerah ketika nantinya, usai JEE, akan	Tjr21.p7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	mengikuti ajang pameran yang lebih besar lagi, Pameran Produk Ekspor. Namun demikian, keberanian untuk percaya diri menampilkan produk kita di kancah pameran akbar tersebut, sangat relevan.	
156	Hanya dengan cara inilah, tujuan utama gelar pameran JEE ini bisa diwujudkan, yakni mempromosikan potensi produk unggulan yang dimiliki daerah.	Tjr21.p8

Edisi Sabtu Legi, 30 Oktober 2010

No	Data	Kode
157	DARI pengoperasian system peringatan dini jauh sebelum erupsi gunung Merapi, menunjukkan akurasi teknologi peralatan yang digunakan untuk memantau cukup canggih, sehingga mampu mendeteksi segala gejolak di dalam perut Merapi. Hanya satu hal yang tak mudah terpantau, yakni saat magma menggelelegak menyodok timbunan material di puncak Merapi. Dari pengoperasian peralatan berteknologi cukup canggih itu bisa dilakukan peringatan dini, karena para pakar gunung berapi dan petugas pengawasnya sangat mengenal karakteristik ancaman di suatu wilayah yang berada di kawasan rawan bencana. Selain itu bisa memperkirakan risiko bencana di suatu wilayah dengan melakukan analisis ancaman, analisis kerebtanan dan ssebagainya. Sehingga bisa menjadi acuan dalam mitigasi bencana, dan melalui kemajuan teknologi komunikasi saat ini bisa segera dirintis jaringan komunikasi di masyarakat untuk mengakses informasi-informasi actual dari pemerintah maupun masyarakat tentang kondisi gunung api. Semuanya bertujuan mengurangi risiko korban jiwa.	Tjr22.p1
158	Pada letusan gunung Merapi tahun 1930 menghancurkan 13 desa, dan menewaskan 1.400 orang, dan ribuan luka berat, karena waktu itu belum ada teknologi untuk pemantauan gunung berapi.	Tjr22.p2

	<p>Sehingga tak memungkinkan adanya peringatan dini, dan warga menganggap gunung Merapi baik-baik saja. Akibatnya, warga sekitar gunung Merapi tak tahu tingkat bahaya yang akan dihadapi, sehingga tak punya waktu untuk mengungsi karena tidak ada peringatan dini.</p>	
159	<p>Berdasar pengoperasian peralatan berteknologi canggih dan analisis, bisa diperkirakan batas aman bagisemua orang jika suatu saat gunung meletus, karena dari berbagai kasus letusan gunung berapi di Indonesia, sejauh ini system peringatan dini bisa dikatakan sangat baik. Bahkan masyarakat semakin paham tentang anatomi gunung berapi dan dinamikannya.</p>	Tjr22.p3
160	<p>Dengan kata lain, gerakan magma gunung berapi bisa terdeteksi, tapi tak bisa diprediksi saat meletusnya maupun arah gerakan material dan awan panas. Pada erupsi Merapi masa lalu, kawasan Kinahrejo selalu aman. Tapi kali ini dilanda awan panas, dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Sehingga bisa dikatakan perubahan anatomi gunung berapi bisa terjadi setiap saat.</p>	Tjr22.p4
161	<p>Manfaat teknologi dengan tenaga ahli yang menanganinya sudah terbukti sangat mengurangi korban jiwa, karena jauh sebelum erupsi bisa diketahui tingkat bahaya yang akan terjadi. Mengabaikan peringatan dini dari hasil pemantauan dengan peralatan teknologi canggih sangat berisiko. Menderita di tempat pengungsian beberapa minggu lebih baik ketimbang kehilangan nyawa.</p>	Tjr22.p5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Edisi Sabtu Pon, 2 Oktober 2010

No	Paragraf	Pola Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
1	<p>BARBAR, primitif, hukum rimba, atau sebutan lain mencuat ketika khalayak ramai menonton TV yang membayangkan bentrokan dua kelompok masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, 29 September lalu. Para pemirsa TV secara gamblang melihat kedua kelompok masyarakat itu membawa senjata tajam. Terlihat pula para wartawan foto dan kameraman TV leluasa meliput adegan kekerasan, tanpa terganggu sedikit pun oleh massa kedua pihak yang bentrok. Seolah aksi mereka pas kalau diliput media massa. (Tjr1.p1)</p>	(aPppd)	(bPppd) penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang terjadi dengan memaparkan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana tempat terjadinya, kapan terjadinya, bagaimana suasananya.
2	<p>Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala melihat kejadian itu sebagai isyarat kembali maraknya aksi premanisme. (Tjr1.p2)</p>	(aPpa7)	(bPpa7)
3	<p>Premanisme selalu terkait dengan dunia kejahatan. Kata ‘preman’ menyuguhkan identitas kaum sipil. Dengan demikian premanisme merupakan aktifitas warga sipil yang bias mengarah pada unsur kejahatan, meski dalam praktik mereka yang digolongkan preman hanya sebagai petugas keamanan tempat hiburan malam dan sebagainya. (Tjr1.p3)</p>	(aPpd) Kalimat topik – kalimat pengembang	(bPpd) ada pendefinisian terhadap kalimat topik yaitu kata ‘preman’. Pendefinisian tersebut terdapat pada kalimat pengembang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4	<p>Ibukota dan kota besar yang semakin banyak memiliki tempat hiburan malam, dan siang, menjadi lahan rezeki bagi kelompok masyarakat seperti itu. Jarang ditemui petugas keamanan tempat hiburan yang tak punya kelompok. Sehingga kelompok besar yang bersaing sering terlibat bentrokan karena perebutan wilayah untuk mengais rezeki. Satu bentrokan kecil di suatu tempat hiburan bisa menyulut bentrokan besar. Ketika kasus betrokan kecil terangkat di pengadilan, kedua kelompok bisa bergerak sebagai usaha mempengaruhi jalannya pengadilan. Manakala mereka berhadapan, maka adegan massa kontra massa pun terjadi. Tapi untuk kelompok massa preman, senjata pun bicara, sehingga munculnya orang yang meregang nyawa atau luka berat, termasuk polisi yang berusaha melerai, bisa terjadi. (Tjr1.p4)</p>	<p>(aPpsa) Kalimat topik- kalimat pengembang</p>	<p>(bPpsa) kalimat topik menunjukkan sebab sedangkan kalimat pengembang menunjukkan akibat. Keduanya dihubungkan dengan kata 'sehingga'</p>
5	<p>Bentrokan antara kelompok preman kebanyakan bermuara pada perebutan lahan rezeki, meski terkadang diwarnai persoalan pribadi. Puncak perebutan rezeki berupa bentrokan terbatas. Namun percikan kecil bisa jadi bara yang besar, karena kelompok preman juga punya pengaruh dengan warga masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka yang tak pernah berperan sebagai preman bisa</p>	<p>(aPpsa) kaliamt topik- kalimat pengembang</p>	<p>(bPpsa) kalimat topik menunjukkan sebab sedangkan kalimat pengembang menunjukkan akibat. Keduanya dihubungkan dengan kata 'sehingga'</p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	terlibat bentrokan karena solidaritas. (Tjr1.p5)		
6	Sebagai warga negara hukum, dalam bentrokan bentuk apapun, mereka yang terlibat secara hukum bisa jadi tersangka. (Tjr1.p6)	(aPpd)	(bPpd)
7	Kebanyakan kriminolog mengatakan, premanisme di dalam dan di luar negeri tak mudah diberantas, karena suatu waktu jasa para preman dimanfaatkan aparat penegak hukum. Sehingga sulit menekan premanisme sampai ke titik nol. (Tjr1.p7)	(aPpsa) kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpsa) kalimat topik sebagai akibat dan kalimat pengembang sebagai sebab. Ditandai dengan kata 'karena' dan 'sehingga'
8	Namun kejadian di jalan Ampera, Jakarta Selatan, 29 September lalu merupakan 'lampu merah' atas membiaknya premanisme yang diwarnai perang di jalanan umum, yang terus menerus ditayangkan di TV, sehingga bisa menimbulkan ketakutan masyarakat. (Tjr1.p8)	(aPpsa) kalimat topik- kalimat pengembang	(bPpsa) kalimat topik sebagai sebab dan kalimat pengembang sebagai akibat. Ditandai dengan kata 'sehingga'
9	Galibnya, pembangunan masyarakat sipil yang dicitakan, harus ditegakkan warga sipil sendiri. Jika premanisme membiak, sudah saatnya diberantas. (Tjr1.p9)	(aPpa7)	(bPpa7)

Edisi Senin Kliwon, 4 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
10	LAGI-LAGI kecelakaan kereta api (KA). Kali ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. KA Eksekutif Argo Anggrek jurusan	(aPppd)	(bPppd) penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Jakarta-Surabaya menabrak bagian belakang KA Bisnis Senja Utama jurusan Jakarta-Semarang. Sebanyak 36 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka berat dan ringan. Pada hari yang sama, di Solo juga terjadi kecelakaan KA. Gerbong belakang KA Gaya Baru Malam diserempet KA Eksekutif Bima. Seorang tewas, 4 lainnya cedera. (Tjr2.p1)		terjadi dengan memaparkan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana tempat terjadinya, kapan terjadinya, bagaimana suasanaanya.
11	Seperti biasa, Menteri Perhubungan atas nama pemerintah meminta maaf atas terjadinya kecelakaan transportasi massal itu. Seraya berjanji akan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Sementara melalui jurubicara kepresidenan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan menteri terkait dan jajaran Direksi PT KAI mengusur tuntas peristiwa maut tersebut. (Tjr2.p2)	(aPpsa) kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpsa) kalimat topik sebagai sebab dan kalimat pengembang sebagai akibat. Ditandai dengan kata 'sehingga'
12	Di antara kita tentu ada yang menengarai pernyataan para pejabat itu sekadar <i>lip service</i> . Hanya berfungsi sebagai pemanis bibir atau basa-basi dalam kerangka menghibur keluarga para korban. Sebatas menabur janji kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan kinerja. Buktinya, kecelakaan KA dalam berbagai ragam dan bentuknya selalu terulang dan terulang. Secara pukul rata, setiap tahun tidak kurang dari 100 kali	(aPpa4) kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpa4) kalimat topik dan kalimat penjelas dihubungkan dengan kata 'buktinya'

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	kecelakaan KA di berbagai tempat. (Tjr2.p3)		
13	Dalam setiap peristiwa kecelakaan transportasi -- darat, laut dan udara – secara garis besar disebabkan salah satu dari dua factor. Pertama, karena factor manusia (<i>human error</i>), atau factor teknis (<i>technical error</i>). Atau malah karena factor apa yang dominant dalam terjadinya kecelakaan KA di Pemalang itu. (Tjr2.p4)	(aPpsa) kalimat topik- kalimat pengembang	(bPpsa) kalimat topik sebagai akibat dan kalimat pengembang sebagai sebab. Ditandai dengan kata 'karena'
14	Tentu kita sangat sedih dan merasa pilu mengapa kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara silih berganti terjadi di negeri ini. Sepertinya kecelakaan itu sudah mentradisi. Tidak ada bulan atau tahun yang tidak diwarnai peristiwa kecelakaan, yang tidak jarang memakan korban jiwa manusia dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Mengapa seakan terkesan tidak ada upaya menghentikannya, atau paling tidak meminimalisasinya. Mengurangi secara signifikan frekuensinya, sehingga tidak terlalu banyak nyawa manusia yang melayang sia-sia. (Tjr2.p5)	(aPppt) kalimat pengembang- kalimat pengembang- kalimat topik	(bPppt) Kalimat topik berbentuk sebuah pertanyaan. Ditandai dengan kata tanya 'mengapa'
15	Tidak bisa tidak! Kementerian Perhubungan harus melakukan evaluasi menyeluruh dan super serius terhadap sarana-sarana transportasi dan mekanikanya, berikut manusia yang mengoperasikannya. Dari evaluasi itu kita berharap akan diketahui secara pasti beragam	(aPpsa) kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpsa) kalimat topik sebagai akibat dan kalimat pengembang sebagai sebab. Ditandai dengan kata 'sebab'

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	kelemahan atau kesalahan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan peralatan maupun kinerjanya. Sebab kalau tidak, peristiwa kecelakaan demi kecelakaan beragam modal transportasi akan selalu terulang dan terulang dalam batas waktu yang panjang. (Tjr2.p6)		
--	---	--	--

Edisi Selasa Legi, 5 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
16	PUJIAN terus mengalir ke institusi Polri terkait penangkapan anggota kelompok bersenjata yang diduga sebagai pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerbu Mapolsek Hamparan Perak Deli Serdang Sumatera Utara. Dua peristiwa itu diyakini Polri bukan berdiri sendiri, melainkan terkait dengan jaringan terorisme. (Tjr3.p1)	(aPppd)	(bPppd) Penulis berusaha memaparkan peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, di mana tempat terjadinya dan sebagainya.
17	Dalam penyergapan di sejumlah lokasi di Sumatera Utara, polisi setidaknya menembak mati 6 tersangka. Beberapa di antaranya ditangkap hidup-hidup. Mengapa polisi menembak mati? Versi aparat kepolisian menyebutkan, para tersangka tak mau menyerah, melainkan terus melawan dengan menembaki petugas. Dalam kondisi terancam itulah polisi akhirnya menembak mati tersangka. (Tjr3.p2)	aPppd, aPppt, aPpsa kalimat pengembang-kalimat topik-kalimat pengembang	bPppd, bPppt, bPpsa kalimat topik berbentuk sebuah pertanyaan. Ditandai dengan kata tanya 'mengapa'

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18	<p>Bahkan, untuk lebih meyakinkan publik, penggrebekan itu ditayangkan stasiun televisi swasta. Aksi saling tembak antara petugas dan tersangka juga bisa terekam. Semua yang disajikan nampak meyakinkan, sehingga banyak pihak mendukung tindakan kepolisian. (Tjr3.p3)</p>	<p>(aPpsa) kalimat pengembang- kalimat topik- kalimat pengembang</p>	<p>(aPpsa) kalimat topik sebagai sebab dan kalimat pengembang sebagai akiabat. Ditandai dengan kata 'sehingga'</p>
19	<p>Kita tentu merespons positif upaya Polri meringkus semua pelaku perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerbu Mapolsek Hamparan Perak. Kita sangat mengapresiasi kerja Polri yang dalam waktu relative cepat bisa mengendus persembunyian tersangka untuk kemudian meringkusnya. Beberapa tersangka memang masih dalam pengejaran petugas. (Tjr3.p4)</p>	<p>(aPppd)</p>	<p>(bPppd)</p>
20	<p>Di sisi lain, polisi juga mengakui bahwa kerja mereka didukung masyarakat. Acara penggrebekan tersangka diawali dari informasi masyarakat. Misalnya, para tersangka yang merasa terpojok di hutan, meminta bantuan kepada warga sekitar, namun kemudian warga justru melaporkan ke polisi. Ada pula tersangka yang meminta diantarkan warga menuju pos polisi guna menyerahkan diri. Agaknya, mereka telah menyadari bahwa aparat kepolisian benar-benar <i>all out</i> memburu pelaku. (Tjr3.p5)</p>	<p>(aPpc), (aPpsa) Kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang</p>	<p>(bPpc), (bPpsa) Kalimat topik dikembangkan dengan memberikan contoh-contoh pada kalimat pengembang. Ditandai dengan kata 'misalnya'</p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

21	<p>Meski demikian, beberapa pihak menyayangkan mengapa polisi menembak mati tersangka. Padahal, seandainya tersangka ditangkap dalam kondisi hidup, lebih menguntungkan karena bisa dimintai keterangan guna mengungkap jaringannya. Pertanyaannya, benarkah polisi dalam kondisi terdesak yang mengancam keselamatan jiwa? Tentu harus ada pertanggungjawaban publiknya. Bahkan, setiap peluru yang melesat, harus ada pertanggungjawabannya. (Tjr3.p6)</p>	<p>(aPppt) Kalimat pengembang-kalimat topik-kalimat pengembang</p>	<p>(bPppt) Kalimat topik berbentuk sebuah pertanyaan. Ditandai dengan kata 'pertanyaannya'</p>
22	<p>Kita tentu berharap agar aparat tidak salah tembak. Dalam beberapa kejadian, aparat digugat lantaran dianggap tidak profesional dalam menangani kasus terorisme. Sepertinya aparat serba salah, tidak bertindak dihujat, namun bertindak dianggap berlebihan, melanggar HAM dan sebagainya. (Tjr3.p7)</p>	<p>(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan memperinci perbandingan tersebut hingga ke hal-hal yang bersifat konkret. Ditandai dengan kata 'namun'</p>
23	<p>Dalam kaitan itu, kita mengingatkan, undang-undang tetap menjadi acuan dalam bertindak. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberi keleluasaan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan, hendaknya tidak disalahgunakan. Karena hal itu menyangkut nasib seseorang.</p>	<p>(aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPpsa) Kalimat topik sebagai akibat dan kalimat pengembang sebagai sebab. Ditandai dengan kata 'karena'</p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Sekali lagi, kita mengingatkan, setiap tindakan aparat yang bersentuhan dengan kepentingan publik harus ada pertanggungjawabannya. Hal ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan, bila aparat bertindak professional, pasti masyarakat mendukung. (Tjr3.p8)</p>	
--	--	--

Edisi Rabu Pahing, 6 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
24	<p>MASINIS keretab api eksekutif Argo Bromo Anggrek, M Halik Rudianto, menjadi tersangka untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan manabrak kereta api (KA) Senja Utama di Stasiun Petarukan (Pemalang), Sabtu pagi lalu. Semua ini setelah Polres Pemalang dan Tim Polda jateng melakukan pemeriksaan dan menentukan pemeriksaan dan menentukan pasal-pasal yang 'menjerat' masinis. (Tjr4.p1)</p>	(aPppd)	(bPppd) Penulis berusaha memaparkan peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan terjadinya, di mana tempatny dn sebagainya.
25	<p>Kecelakaan yang menewaskan 35 penumpang dan korban luka berat lainnya itu makin menambah daftar panjang kecelakaan transportasi. Satu hal yang jamak dilakukan dalam setiap kecelakaan adalah segera mencari dan menunjuk siapa yang bersalah. Untuk kecelakaan kereta api (KA), masinis dan asisten masinis menjadi sosok yang langsung menjadi tumpuan</p>	(aPppd), (aPpp)	(bPppd), (bPpp) Penulis memaparkan peristiwa apa yang terjadi, siapa yang terlibat dan seharusnya bertanggung jawab dan sebagainya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	kesalahan. Menjadi ‘kambing’ yang ‘paling hitam’. Tak banyak yang akan jernih berpikir bahwa kondisi masinis dan asisten, bagaikan orang jatuh, tertimpa tangga bahkan kemudian diterkam harimau. (Tjr4.p2)		
26	Mengikuti liputan perihal tragedy ini, sungguh menyesakkan dada. Prihatin, sedih campur aduk dengan perasaan kemanusiaan lainnya. Marilah kita berempati tidak hanya terhadap korban kecelakaan. Akan tetapi terhadap para masinis. Suatu profesi yang benar-benar menuntut kesehatan lahir dan batin. Psikis maupun fisik. Suatu kondisi manusiawi yang hanya akan diperoleh setelah kebutuhan dasar (<i>basic need</i>) tercukupi. (Tjr4.p3)	(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(aPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang terdapat pada kalimat pengembang. Ditandai dengan kata ‘akan tetapi’
27	Sulit untuk mengatakan kebutuhan dasar keluarga Halik Rudianto dan Giono (asisten masinis) telah tercukupi, saat media audio visual meliputi suasana keluarga. Dari tampilan fisik rumah petak yang sangat sederhana – (mungkin rumah dinas?) – dihuni isteri dan dua anaknya, masyarakat awam pun akan dapat mengukur tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Pastinya, serupa juga kehidupan keluarga para masinis lainnya. (Tjr4.p4)	(aPppd) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPppd) Ada sesuatu yang dideskripsikan yaitu tentang keadaan rumah, tampilan fisik rumah petak
28	Pertanyaan yang korelatif dengan kondisi itu, bagaimana mungkin sosok yang mendapat fasilitas kesejahteraan minim itu	(aPppt) Kalimat topik-kalimat pengembang-	(bPppt) Kalimat topik dikembangkan dengan sebuah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>mendapat tanggung jawab yang luar biasa: membawa kereta eksekutif dengan ratusan nyawa? Korporasi tempat bekerja bisa saja membuat peraturan baku yang bersifat tak bisa diganggu gugat, terutama dalam hal penggajian. Peraturan yang tak akan pernah bisa mampudiubah oleh pekerja. Ketidakberdayaan yang jamak terpaksa diterima oleh pekerja yang di negeri ini memang sangat rendah posisi tawar-nya. (Tjr4.p5)</p>	<p>kalimat pengembang</p>	<p>pertanyaan. Ditandai dengan kata tanya 'bagaimana' kemudian kalimat topik dijelaskan pada kalimat pengembang</p>
29	<p>Menjadikan tersangka masinis, sekalipun ada indikasi lalai karena mengantuk, nampak tak adil bagi kemanusiaan. Kecelakaan tersebut, jelas tanggung jawab korporasi. Juga tanggung jawab negara ini dalam memberi layanan transportasi masyarakat. Menjadikan masinis sebagai kambing hitam, seharusnya juga dilihat kambing yang amat-sangat lebih hitam. Yakni sosok pemangku kebijakan. Kita juga dapat mempertanyakan sensitivitas para legislative yang selain berkewajiban melakukan budgeting juga pengawasan. (Tjr4.p6)</p>	<p>(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan. Hal itu terdapat pada kalimat pengembang yang ditandai dengan kata 'seharusnya'</p>
30	<p>Kemana hati nurani para wakil rakyat sampai tidak melihat kesejahteraan buruk para masinis – sementara harus bertanggung jawab pada ratusan nyawa setiap malam? Mengantuk, seperti halnya lapar, adalah ritme</p>	<p>(aPppt) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat topik</p>	<p>(bPppt) Kalimat topik berbentuk sebuah pertanyaan yang ditandai dengan kata tanya 'ke mana' kemudian</p>

	biologis manusia. Harus dicari penyebab masinis mengantuk saat bekerja. Siapa tahu memang dia harus bekerja ekstra untuk hasrat hidup keluarga yang tak kunjung sejahtera? (Tjr4.p7)		dijelaskan pada kalimat pengembang setelah itu, ditegaskan kembali pada akhir paragraf berbentuk sebauah pertanyaan yang ditandai dengan kata tanya 'siapa'
31	Tragedi Pemalang kemarin, hendaknya menjadi <i>entry point</i> menengok kembali kelayakan hak dan kewajiban masinis. Mendesak dilakukan deregulasi, agar tidak ada lagi kecelakaan serupa. Mencari hikmah dari tragedy. Agar tak ada lagi kecelakaan serupa. (Tjr4.p8)	(aPpa7) kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpa7) kalimat topik dikembangkan dengan analisis tujuan yang ditandai dengan kata 'agar' pada kalimat pengembang.

Edisi Kamis Pon, 7 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
32	MASALAH komersialisasi pendidikan masih akan jadi persoalan klasik dan tak pernah hilang, selama peluang komersialisasi itu tetap ada. Apa pun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, selalu ada celah atau peluang untuk terjadinya pelanggaran. Sebab, seperti sudah menjadi tradisi dan 'penyakit' umum bahwa seketat apa pun peraturan dibuat, pasti ada saja kasus pelanggaran dengan memanfaatkan peluang yang tak tersentuh dalam peraturan	(aPpsa) Kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpsa) Kalimat topik berupa sebuah akibat sedangkan kalimat pengembang berupa sebuah sebab. Hal itu ditandai dengan kata 'sebab' pada kalimat pengembang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	tersebut, termasuk khususnya dalam sector pendidikan. (Tjr5.p1)		
33	Sehingga, wajar kalau kemudian muncul banyak komentar terkait dengan keluarnya Keputusan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai pengganti PP 17. Karena, sebagaimana diungkapkan beberapa pengamat, kendati dalam PP tersebut ada aturan yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus menerima mahasiswa miskin minimal 20 persen, tapi peluang adanya komersialisasi masih tetap ada. (Tjr5.p2)	(aPpsa) Kalimat pengembang-kalimat topik-kalimat pengembang	(bPpsa) Kalimat pengembang berupa sebuah akibat kemudian dilanjutkan dengan kalimat topik yang berada ditengah. Hal tersebut ditandai dengan kata 'sehingga' pada awal pararaf dan kata 'karena' pada tengah paragraf.
34	Komersialisasi antara lain bisa juga terjadi manakala hukum ekonomi <i>supply and demand</i> tak seimbang. Selama permintaan masih jauh melebihi persediaan atau kuota, maka peluang penyimpanan dengan melakukan komersialisasi, selalu ada. Dalam dunia pendidikan, maka komersialisasi sangat terasa dan terbuka pada tahapan penerimaan mahasiswa baru, hingga pelaksanaan program belajar mengajar. Hal ini terutama dipicu oleh dominasi pemikiran bahwa pendidikan formal adalah segala-galanya dan menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang dalam dunia pendidikan. (Tjr5.p3)	(aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpsa) Kalimat topik berupa sebuah sebab sedangkan kalimat pengembang berupa sebuah akibat. Hal tersebut ditandai dengan kata 'maka' pada kalimat pengembang.
35	Memang, kita senua tahu bahwa antara tuntutan kualitas	(aPpsa) Kalimat topik-	(bPpsa) Kalimat topik

	<p>pendidikan yang tentunya membutuhkan dukungan financial atau pembiayaan akan sangat terkait dengan kebutuhan sebuah institusi pendidikan akan ketersediaan dana yang signifikan. Sehingga, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus juga sejalan dengan misi pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Jangan sampai muncul dualisme atau dikotomi di antara keduanya. Dengan demikian, tujuan mulia dari pemerintah untuk mengedepankan rakyat miskin dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, tetap harus diamankan. (Tjr5.p4)</p>	<p>kalimat pengembang-kalimat penegas</p>	<p>sebagai sebab sedangkan kalimat pengembang sebagai akibat. Hal tersebut ditandai dengan kata 'sehingga' pada kalimat pengembang. Pada akhir paragraf ditegaskan kembali yang ditandai dengan kata 'dengan demikian'</p>
36	<p>Artinya, tak ada yang salah dengan munculnya sebuah peraturan, sejauh diikuti dengan langkah pengawasan dan upaya yang terus menerus dalam menutup celah-celah munculnya komersialisasi pendidikan. Dalam kaitan inilah, kita layak menjaga konsistensi penyelenggaraan pendidikan agar jangan sampai frustrasi lantaran dibingungkan oleh peraturan yang lebih sering berubah-ubah, dan kemudian terjebak serta terdoda untuk melakukan langkah dan tindakan yang bisa diindikasikan sebagai komersialisasi. (Tjr5.p5)</p>	<p>(aPpa7) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPpa7) Kalimat topik dikembangkan dengan analisis tujuan yang terdapat pada kalimat pengembang. Ditandai dengan kata 'agar'</p>
37	<p>Apa pun, kita layak menggarisbawahi seruan Mendiknas yang mewajibkan semua PTN harus menerima</p>	<p>(aPpa7)</p>	<p>(bPpa7)</p>

	<p>mahasiswa miskin, minimal 20 persen. Misi dan tugas mulia ini harus diamankan dan harus benar-benar dibersihkan dari komersialisasi pendidikan. (Tjr5.p6)</p>		
--	--	--	--

Edisi Jumat Wage, 8 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
38	<p>MASIH ingat <i>Inter-Governmental Group on Indonesia</i> atau IGGI? Kelompok negara-negara donor untuk Indonesia itu ‘dibubarkan’ Presiden Soeharto – karena Johannes Pieter Pronk, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda sebagai coordinator IGGI, mengkritisi masalah Ham di Indonesia. Keputusan Presiden Soeharto itu dinilai sangat berani, karena dilakukan menjelang berlangsungnya pertemuan tahunan IGGI. (Tjr6.p1)</p>	<p>(aPppt) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPppt) Kalimat topik berbentuk sebuah pertanyaan pada paragraf pertama. Kalimat topik tersebut kemudian dijelaskan pada kalimat pengembang pada paragraf-paragraf selanjutnya.</p>
39	<p>Selasa (5/10) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membuat keputusan yang sangat berani. Menunda (untuk tidak sampai menggunakan istilah ‘membatalkan’) kunjungan kenegaraannya ke Negeri Belanda. Padahal seluruh rangkaian kegiatan protokoler baik yang dilakukan pemerintah Belanda telah siap. Alasan ‘pembatalan’, menjelang kedatangan Presiden SBY di</p>	<p>(aPppd) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPppd) Ada sesuatu yang dipaparkan yaitu tentang keputusan presiden SBY. Ada sesuatu yang diceritakan.</p>

	Belanda, pengadilan di negeri itu menyetujui dimulainya proses hukum atas tuntutan dugaan HAM di Indonesia. (Tjr6.p2)		
40	Memang, antara kedua peristiwa itu – ‘pembubaran’ IGGI oleh Presiden Soeharto dan ‘pembatalan’ kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Negeri Belanda – secara substantive tidak ada korelasinya. Tetapi nuansa yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yang sama-sama sangat berani itu relative sama. Ada upaya-upaya yang sangat kuat untuk memanfaatkan, baik IGGI maupun kunjungan kenegaraan, untuk kepentingan politis. Mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Indonesia. (Tjr6.p3)	(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan pada kalimat pengembang yang ditandai dengan kata ‘tetapi’
41	Tentunya, saat Presiden Sorharto ‘membubarkan’ IGGI dan sewaktu Presiden SBY ‘membatalkan’ kunjungan kenegaraan ke Belanda, diputuskan setelah mempertimbangkan pula reaksi dan dampak positif-negatif yang bakal timbul, baik di dalam negeri maupun di kalangan dunia internasional. Reaksi atas ‘pembubaran’ IGGI di dalam negeri Indonesia waktu itu boleh dikata positif. Sebab tidak siapapun dan pihak manapun termasuk media massa, dalam situasi kehidupan politik yang	(aPppt), (aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat penegas	(bPppt), (bPpsa) Kalimat topik berupa pertanyaan pada akhir paragraf. Kalimat topik juga berupa akibat dan kalimat pengembang berupa sebab. Hal tersebut ditandai dengan kata ‘sebab’ pada tengah paragraf.

	represif, tidak berani melawan arus. Sementara reaksi yang timbul atas ‘pembatalan’ kunjungan yang dilakukan Presiden SBY? (Tjr6.p4)		
42	Kita menyaksikan reaksi itu sangat beragam. Ada yang menilai keputusan itu sebagai tepat – karena dikatakan Presiden SBY, digelarnya pengadilan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia itu menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Ada pula yang menengarainya sebagai blunder politik, karena dilakukan di luar kelaziman. Diputuskan pada jam terakhir menjelang keberangkatan, sehingga menghadirkan unsur <i>surprise</i> bagi pemerintah dan kerajaan Belanda pada khususnya, dan dunia internasional pada umumnya. (Tjr6.p5)	(aPpsa), (aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat penegas	(bPpsa), (aPpp) Kalimat topik sebagai sebab sedangkan kalimat pengembang sebagai akibat yang ditandai dengan kata ‘karena’ pada kalimat pengembang. Pada akhir paragraf ditegaskan kembali dengan kata ‘sehingga’
43	Munculnya reaksi positif, pro maupun kontra, perlu kita sikapi dengan lapang dada. Pemerintah pun tentu menyadari, dalam kehidupan demokrasi siapapun pihak manapun bebas bersuara dan mengeluarkan pendapat. Tetapi karena permasalahan yang dikritisi sangat berkait dengan harga diri bangsa Indonesia, rasanya kita sepakat untuk tidak mereaksinya secara ekstrem. (Tjr6.p6)	(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang ditandai dengan kata ‘tetapi’ pada kalimat pengembang.

Edisi Sabtu Kliwon, 9 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
44	HUBUNGAN Indonesia dengan Malaysia sering memanas. Tapi kalau dirunut, kebanyakan karena persoalan hukum, antara lain perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dan masalah perbatasan. Konflik pun sempat menajam terkait penangkapan 3 petugas DKP dari Indonesia oleh Kepolisian Diraja Malaysia pertengahan Agustus. (Tjr7.p1)	(aPppd) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPppd) Kalimat topik dijelaskan pada kalimat pengembang dengan memaparkan peristiwa apa yang sedang terjadi, siapa saja yang terlibat.
45	Penangkapan 3 petugas DKP berbuntut pelemparan kotoran oleh kelompok LSM Bendera terhadap Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia menyulut kemarahan pejabat negeri jiran itu. (Tjr7.p2)	(aPppd), (aPpsa)	(bPppd), (bPpsa)
46	Kasus pengusiran maupun penyiksaan TKI Indonesia di Malaysia dan persoalan perbatasan memang mudah menyengat perasaan rakyat Indonesia, dan membawa persoalan ke tingkat diplomatic kedua negara. Tapi hingga sekarang sangat jarang terungkap kegalauan politik yang melanda Malaysia sekarang. (Tjr7.p3)	(aPpp) Kalimat topik-kalimat-kalimat pengembang	(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang terdapat pada kalimat pengembang di akhir paragraf. Ditandai dengan kata 'tetapi'
47	Sebagaimana diketahui, partai UMNO yang selama puluhan tahun bisa dikatakan sebagai 'mayoritas tunggal' mengalami pukulan berat di berbagai negara bagian di Malaysia pada Pemilu, yang berbuntut terjadinya konflik	(aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpsa) Kalimat topik sebagai 'sebab' sedangkan kalimat pengembang sebagai 'akibat' yang ditandai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	internal di tubuh partai terbesar itu. Bahkan kekalahan UMNO di berbagai negara bagian Malaysia sempat membawa konflik diplomatic antara Malaysia dengan India akibat tindakan rasialis pihak UMNO. (Tjr7.p4)		dengan kata ‘bahkan’ di akhir paragraf.
48	Popularitas dan soliditas UMNO menurun tapi masih berkuasa, sedangkan melejitnya partai-partai oposisi semakin menjadi ancaman bagi para tokoh UMNO. Sehingga masuk akal jika para tokoh UMNO mencari popularitas dengan berbagai cara. Terkait hal ini, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menuding partai berkuasa di Malaysia, UMNO, memanas-manasi hubungan Indonesia-Malaysia dengan menebar ketakutan dengan membangun image bahwa seolah-olah Malaysia terancam Indonesia. (Tjr7.p5)	(aPpsa), (aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpsa), (bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan sebab akibat dan perbandingan serta pertentangan. Kalimat topik sebagai sebab, kalimat pengembang sebagai akibat yang ditandai dengan kata ‘sehingga’ Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan ditandai dengan kata ‘tapi’ dan ‘sedangkan’ pada awal paragraf.
49	Meski tidak benar, tapi sentimen terhadap Indonesia menjalar ke masyarakat. Namun Anwar yakin tidak semua masyarakat akan melakukan tindakan yang merusak hubungan dua negara serumpun ini. (Tjr7.p6)	(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang	(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang ditandai dengan kata ‘namun’
50	Anwar juga menegaskan, mayoritas rakyat Malaysia tidak membenci Indonesia. Kalau ada	(aPpsa) Kalimat topik-kalimat	(bPpsa) Kalimat topik sebagai sebab

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	aura kebencian mengemuka di publik akibat permainan media massa Malaysia yang selalu menyampaikan hal buruk tentang Indonesia. Ia membantah pandangan bahwa mayoritas rakyat Malaysia tidak suka Indonesia. Ini hanya mayoritas kecil, kemudian dipermainkan oleh media. Anwar juga minta agar masyarakat kedua negara menjalin hubungan dan kerja sama yang baik. Masyarakat antar-dua negara ini, generasi muda, mahasiswa, anggota parlemennya bisa lebih baik berhubungan. (Tjr7.p7)	pengembang- kalimat pengembang	sedangkan kalimat pengembang sebagai akibat. Ditandai dengan kata 'akibat'
51	Dari kenyataan itu jelas bahwa segala gesekan dengan Indonesia bisa dijadikan komoditi politik bagi UMNO yang makin kurang populer bagi masyarakat Malaysia. (Tjr7.p8)	(aPpsa)	(bPpsa)

Edisi Senin Pahing, 11 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
52	TERJADI silang pendapat berkait dengan bencana banjir di Wasior, Papua Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah musibah diakibatkan pembalakan liar. Bantahan itu didasarkan pada laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Muarif. Sebelumnya, sejumlah LSM peduli pelestarian hutan melansir eksploitasi hutan Wasior	(aPpp) Kalimat topik- kalimat pengembang- kalimat pengembang	(bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang terdapat pda kalimat pengembang. Hal tersebut terletak pada akhir paragraf yang ditandai dengan

	secara berlebihan sebagai penyebabnya. Sementara Menhut Zulkifli Hasan dinyatakan, alam punya cara tersendiri untuk membalas terjadinya pembalakan liar. (Tjr8.p1)		kata ‘sementara itu’
53	Kita mencermati, setiap terjadi bencana alam yang menewaskan sejumlah orang dan memorakporandakan infrastruktur, silang pendapat seperti itu selalu terjadi. Di satu sisi, para pegiat pelestarian alam bersikukuh bencana dalam berbagai bentuk dan intensitasnya itu sebagai dampak dari terganggunya ekologi. Berubahnya keseimbangan dalam hubungan timbale balik antara makhluk hidup dengan kondisi alam sekitar dan lingkungannya. Sedang di sisi lain, pemerintah selalu terkesan mengelak atau menepis adanya ‘tuduhan’ tersebut. (Tjr8.p2)	(aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpp) kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang terdapat pada kalimat pengembang. Hal tersebut terletak pada tengah paaragraf dan akhir paragraf yang ditandai dengan kata ‘di satu sisi’ dan ‘sedang di sisi lain’
54	Ada pun penyebab banjir banding di Wasior, yang pasti musibah itu telah menyentak nurani berbangsa kita. Demikian dahsyatnya – sehingga 100 orang lebih meninggal dunia dan ratusan lainnya dinyatakan hilang – mengundang pula perhatian masyarakat internasional. Salah satu di antara tokoh dunia yang menyatakan keprihatinannya adalah Menlu AS Hillary Rodham Cliton. (Tjr8.p3)	(aPppd) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPppd) Ada sesuatu yang dipaparkan yaitu tentang peristiwa apa yang sedang terjadi, apa penyebabnya, berapa banyak korban jiwa dan sebagainya.
55	Kita berpendapat, untuk sementara hentikan dulu	aPpa6	bPpa6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>terjadinya silang pendapat. Rasanya sudah lebih dari cukup para pegiat pelestari alam membeberkan penyebab terjadinya bencana Wasior dengan berbagai analisis dan argumentasi yang melatarbelakangi ‘tuduhannya’. Sementara pemerintah tidak perlu terkesan ekstra reaktif menanggapi ‘tuduhan’ itu, sampai-sampai Presiden SBY pun merasa perlu membantahnya. (Tjr8.p4)</p>		
56	<p>Yang diperlukan rakyat Wasior, lebih-lebih yang kehilangan saudara dan rumah tempat tinggalnya adalah bantuan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bukan hanya bantuan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari. Tetapi juga bantuan pengobatan, sanitasi, serta normalisasi kehidupan lingkungan sehingga Wasior berdenyut lagi. Tidak berlama-lama menjadi kota mati. (Tjr8.p5)</p>	<p>(aPppd), (aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPppd), (bPpp) Kalimat topik dikembangkan dengan pertentangan yang terdapat pada kalimat pengembang pada tengah paragraf yang ditandai dengan kata ‘tetapi’</p>
57	<p>Tidak terlalu berlebihan bila kita mengingatkan, penanganan yang terkesan lamban atas derita rakyat dan pemilihan lingkungan Wasior, akan dapat menghadirkan isu sensitive, mengingat masih adanya kelompok mesyarakat Papua yang selalu berusaha memanfaatkan ‘kelemahan’ dan ‘kelengahan’ pemerintah untuk kepentingan politiknya. (Tjr8.p6)</p>	<p>(aPpsa), (aPpa7) Kalimat topik-kalimat pengembang</p>	<p>(bPpsa), (bPpa7) Kalimat topik sebagai sebab sedangkan kalimat pengembang sebagai akibat. Ditandai dengan kata ‘akan’</p>

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

58	Kita mengharapkan Presiden SBY sesegera mungkin mengunjungi Wasior, sekaligus membeberkan upaya normalisasi kehidupan masyarakatnya. Sekaligus rencana membangun kembali infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang telah porak poranda. Itu semua perlu dilakukan untuk mencegah munculnya isu negative dan sensitive tadi. (Tjr8.p7)	(aPpa7) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpa7) Kalimat topik dikembangkan dikembangkan dengan analisis tujuan yang ditandai dengan kata ‘mengharapkan’ dan kata ‘untuk’ pada akhir paragraf (penegas)
----	---	--	--

Edisi Selasa Pon, 12 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
59	PERDEBATAN seputar penolakan Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan peninjauan kembali (PK) terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKKP) dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, terus bergulir. Apalagi, sejak awal public menduga Kejaksaan tidak ikhlas mengeluarkan SKPP Bibit-Chandra lantaran institusi penegak hukum ini masih meyakini bahwa bukti dugaan suap dua pimpinan KPK ini cukup kuat. Alhasil, SKPP itu terbit dengan ‘cacat’ sehingga rawan digugat. (Tjr8.p1)	(aPppd)	(bPppd)
60	Buktinya bisa dilihat saat ini. Pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA) menganggap SKPP Bibit-Chandra bakal ditolak MA?	(aPppt) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat	(bPppt) Kalimat topik berupa pertanyaan pada awal paragraf kemudian

	<p>Wallahua'alam. Apalagi MA menganggap PK tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena secara Undang-undang (UU No 5/2004) PK tak bisa diajukan untuk putusan praperadilan. Lagi-lagi, apakah Kejaksaan tak mamahami undang-undang ini? (Tjr8.p2)</p>	<p>pengembang</p>	<p>ditegaskan kembali pada akhir paragraf berupa sebuah pertanyaan yang ditandai engan kata tanya'apa'</p>
61	<p>SKPP dengan alasan sosiologis, mungkin baru ali ini diajukan Kejaksaan, yakni tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan. (Tjr8.p3)</p>	<p>(aPpa6)</p>	<p>(bPpa6) Ditandai dengan kata 'alasan'</p>
62	<p>Kita yakin, Kejaksaan bukan tidak memahami resiko diajukannya SKPP dengan alasan sosiologis. Kalau boleh berasumsi, sejak awal sebenarnya Kejaksaan telah mengetahui bahwa SKPP yang dikeluarkannya sangat lemah dan rawan gugatan. (Tjr8.p4)</p>	<p>(aPpsa)</p>	<p>(bPpsa)</p>
63	<p>Atas penolakan PK tersebut, Kejaksaan sampai sekarang belum bersikap. Memang ada beberapa alternative menyikapi penolakan tersebut. Beberapa alternative itu antara lain, Kejaksaan bisa mengeluarkan SKPP lagi (sebagai perbaikan) atas SKPP sebelumnya. SKPP perbaikan ini—ICW menyebutnya sebagai SKPP jilid II—tentu dengan alasan berbeda dari SKPP sebelumnya, yakni alasan hukum. Konstruksinya, karena tidak cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, maka Kejaksaan</p>	<p>(aPppt), (aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat penegas</p>	<p>(bPppt), (bPpsa) kalimat topik berupa sebab sedangkan kalimat pengembang berupa akibat yang ditandai dengan kata 'maka' pada akhir paragraf kemudian ditegaskan dengan bentuk pertanyaan pada akhir paragraf</p>

	<p>mengeluarkan SKPP kedua. Walaupun SKPP kedua ini tetap bisa digugat, namun setidaknya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Persoalannya, apakah Kejaksaan bersedia melakukan hal demikian—setelah sebelumnya ngotot bahwa cukup bukti untuk menjerat Chandra? (Tjr8.p5)</p>		
64	<p>Alternative kedua, Kejaksaan mengeluarkan <i>deponering</i> atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Bila cara ini ditempuh, niscaya tak mungkin Kejaksaan dipraperadilan seperti yang terjadi sekarang ini. Hanya saja, untuk mengesampingkan perkara, Kejaksaan harus konsultasi terlebih dulu ke DPR dan Mahkamah Agung (MA). (Tjr8.p6)</p>	<p>(aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang</p>	<p>(bPpsa) Kalimat topik berupa sebab dan kalimat pengembang berupa akibat. Ditandai dengan kata ‘niscaya’ pada tengah paragraf.</p>
65	<p>Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan Kejaksaan memilih <i>deponering</i>. Sebab, ada indikasi kuat bahwa kasus Bibit-Chandra direkayasa. Bahkan dalam sidangnya MK telah membeberkan rekayasa yang melibatkan Anggodo Widjojo untuk mengkriminalisasi Bibit-Chandra. Bukti itu makin kuat setelah Pengadilan menyatakan Anggodo bersalah dengan melakukan permufakatan jahat untuk mencoba menyuap pimpinan KPK. Apa arti putusan ini? Berarti tuduhan terhadap Bibit-Chandra melakukan</p>	<p>(aPpsa), (aPppt) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat penegas</p>	<p>(bPpsa), (bPppt) Kalimat topik berupa akibat, kalimat pengembang berupa sebab. Ditandai dengan kata ‘sebab’ pada awal paragraf kemudian ditegaskan kembali dalam bentuk sebuah pertanyaan yang ditandai dengan kata tanya ‘apa’</p>

	pemerasan terhadap Anggodo sama sekali tidak benar alias hanya rekayasa. (Tjr8.p7)		
66	Dengan terungkapnya fakta tersebut, apakah Kejaksaan hendak memilih alternative membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan? Jika tetap membawanya ke pengadilan, berarti kerja Tim Delapan yang dibentuk Presiden SBY tak ada gunanya, karena rekomendasinya diabaikan. Dengan kata lain, pernyataan SBY agar kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan tak lagi dihiraukan Kejaksaan. Apa maunya Kejaksaan? Kalau pun hendaknya mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, beranikah menuntut bebas Bibit-Chandra? (Tjr8.p8)	(aPppt), (aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang-kalimat penegas	(bPppt), (bPpsa) Kalimat topik berupa pertanyaan ditandai dengan kata tanya ‘apa’ kemudian ditegaskan kembali pada akhir paragraf berupa pertanyaan ditandai dengan kata tanya ‘apa’ Kata ‘jika’, ‘berarti’, ‘karena’ menunjukkan hubungan sebab akibat yang terletak pada tengah paragraf.

Edisi Rabu Wage, 13 Oktober 2010

No	Paragraf	Jenis Pengembangan Paragraf	Penanda Pengembangan Paragraf
67	PRODUK mie instan ‘Indomie’ dari Indonesia yang beredar di Taiwan, ditarik dari dua <i>supermarket</i> terkemuka <i>Parkshop</i> dan <i>Welcome</i> . Alasan yang dipublikasikan dalam dan luar negeri Taiwan, produk mie instan tersebut mengandung pengawet <i>E218</i> atau <i>Metyl P-Hydroxybenzoate</i> (bahan pangan pengawet) yang dilarang di negeri itu. (Tjr9.p1)	(aPppd), (aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPppd), (bPpsa) Ada sesuatu yang dipaparkan tentang produk mie instan di Taiwan. Kalimat topik sebagai akibat sedangkan kalimat pengembang sebagai sebab. Ditandai dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

			kata 'alasan'
68	Pelaporan resmi oleh aparat setempat yang segera dipublikasikan tersebut, langsung menuai respons tak hanya di Indonesia. Pantauan media massa hingga Selasa (12/10) Singapura juga segera aktif melakukan penelitian terhadap Indomie yang juga beredar di sana. Hongkong pun melakukan hal yang sama. Menurut <i>Agri-Food Veterinary Authority</i> (AVA) Singapura juga tidak mengizinkan pemakaian zat pengawet itu pada produk mie instan. Saat ini, AVA tengah melakukan pengujian. Mereka berjanji segera mengumumkan hasilnya ke public begitu proses tes selesai. (Tjr9.p2)	(aPppd) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPppd) Penulis berusaha memaparkan peristiwa yang terjadi.
69	Harus diakui jenis makanan instant ini memang sangat populer di kalangan masyarakat. Konon, tak ada penduduk yang belum pernah mencicipi mie instant. Meskipun konsumsi terhadap mie instant, sampai saat ini masih terus pro-kontra. Dianjurkan untuk konsumsi, hanya dalam kondisi darurat. Sangat dianjurkan tidak dikonsumsi terlalu sering, karena memang banyak mengandung zat (kimia) tambahan untuk pewarna maupun pengawet. (Tjr9.p3)	(aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpsa) Kalimat topik berupa akibat pada awal paragraf sedangkan kalimat pengembang berupa sebab pada akhir paragraf yang ditandai dengan kata 'karena'
70	Membicarakan kasus mie instant yang ditarik dari peredaran di Taiwan – nampak sama penting dengan kasus lain yang tengah menjadi <i>cover story</i> dan <i>head line</i>	(aPpsa), (aPpp) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat	(bPpsa), (bPpp) Kalimat topik berupa sebuah akibat kalimat pengembang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	seperti kasus KPK dan bencana alam di Wasior. Seperti diketahui, produk mie instant Indomie ditarik dari sejumlah <i>supermarket</i> di Taiwan karena mengandung zat pengawet <i>methyl p-hydroxybenzoate</i> yang dilarang di Taiwan. (Tjr9.p4)	pengembang	berupa sebab. Ditandai dengan kata 'karena' pada akhir paragraf.
71	Namun kita perlu ikut mencermati kasus ini. Sebab ternyata <i>asam benzoate (E210)</i> dan <i>methylparaben (E218)</i> di Taiwan juga dikenal sebagai bahan pengawet yang dinyatakan aman. Otomatis, zat tersebut legal. Hal ini dikuatkan dalam siding FAO (Organisasi Pangan PBB) di Beijing pada 15-19 Maret 2010 yang menyebut <i>methylparaben</i> layak untuk dikonsumsi. (Tjr9.p5)	(aPpsa) Kalimat topik-kalimat pengembang-kalimat pengembang	(bPpsa) Kalimat topik berupa akibat sedangkan kalimat pengembang berupa sebab. Ditandai dengan kata 'sebab'
72	Selama ini, ternyata Indomei sudah beredar di Taiwan sejak 15 tahun lalu. Awam pun akan segera mempertanyakan: ada apa di balik tindakan (kebijakan?) menarik produk tersebut? Para pakar bisnis, akan melihat sebagai persaingan dagang yang lazim terjadi di era perdagangan bebas ini. (Tjr9.p6)	(aPppt) Kalimat pengembang-kalimat topik-kalimat pengembang	(bPppt) Kalimat topik terletak di tengah paragraf berupa sebuah pertanyaan yang ditandai dengan kata tanya 'ada apa'
73	Untuk mencegah agar tidak muncul sentiment lain yang lebih emosional, misal, seputar harga diri bangsa (yang dilecehkan) dari sudut pandang ilmiah perundangan—maka harus segera dicari solusi yang tepat, tegas dan bermartabat. Kalaupun Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga	(aPpa7)	(bPpa7)

	mengatakan kasus dilarang beredarnya Indomie di Taiwan berkaitan dengan perang dagang. (Tjr9.p7)		
74	Untuk itu harus <i>fairness</i> . Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi maupun ahli hukum. Dengan jalur tersebut, kita bias akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas. Kita belum lupa catatan kasus minyak kelapa sawit (CPO) yang mengurangi dominasi Indonesia di perdagangan dunia akibat telah kasus yang tidak objektif. (Tjr9.p8)	aPpa7, aPpa8	bPpa7, bPpa8
75	Dalam hal mie instant ini, kita harus tampil sebagai pemenang yang elegan. Mari kita tepiskan noda sebagai bangsa (Indonesia) yang selalu kalah. Jangan sampai lagi kalah doplimasi di laut, kalah di darat, kalah di ekspor. (Tjr9.p9)	(aPpa7)	(bPpa7) Ditandai dengan kalimat “Mari kita tepiskan noda sebagai bangsa (Indonesia) yang selalu kalah. Jangan sampai lagi kalah doplimasi di laut, kalah di darat, kalah di ekspor” menunjukkan ajakak, tujuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

161

Contoh Silabus

SILABUS

Sekolah :
 Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
 Kelas/ Semester : X/ 1
 Standar Kompetensi : 4. menulis
 Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif).

Kompetensi dasar	Materi pembelajaran	Indikator	Kegiatan pembelajaran	Penilaian	Alokasi waktu	Alat/bahan/sumber belajar
4.3. menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif.	Paragraf ekspositif a. Pengertian paragraf ekspositif b. Ciri – ciri paragraf ekspositif. c. Pola pengembangan paragraf ekspositif	4.3.1 Siswa mampu menjelaskan pengertian paragraf ekspositif dengan tepat. 4.3.2 Siswa mampu menjelaskan ciri – ciri paragraf ekspositif dengan tepat. 4.3.3 Siswa mampu mengidentifikasi pola	a. menjelaskan pengertian paragraf ekspositif. b. menjelaskan ciri – ciri paragraf ekspositif. c. mengidentifikasi pola pengembangan paragraf ekspositif pada suatu wacana. d. menulis paragraf	Bentuk tes: tertulis dan produk	2X45 menit	a. Gorys, Keraf. 1980. <i>Eksposisi dan Deskripsi</i> . Ende Flores: Nusa Indah. b. Suryanto, Alex dan Agus Haryanta. 2007. <i>Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia</i> , Tangerang: Esis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

162

		pengembangan paragraf ekspositif pada suatu wacana. 4.3.4 Siswa mampu menulis paragraf ekspositif dengan menggunakan pola pengembangan paragraf ekspositif.	ekspositif dengan menggunakan pola pengembangan paragraf ekspositif.			
--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui
Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi

NIP. _____

NIP. _____

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Nama sekolah :

Mata pelajaran : Bahasa Indonesia

Kelas/semester : X/1

Standar kompetensi

4. Menulis

Mengungkapkan informasi dalam berbagai bentuk paragraf (naratif, deskriptif, ekspositif).

Kompetensi dasar

4.3. Menulis gagasan secara logis dan sistematis dalam bentuk ragam paragraf ekspositif.

Indikator

4.3.1 Siswa mampu menjelaskan pengertian paragraf ekspositif dengan tepat.

4.3.2 Siswa mampu menjelaskan ciri – ciri paragraf ekspositif dengan tepat.

4.3.3 Siswa mampu mengidentifikasi pola pengembangan paragraf ekspositif pada suatu wacana.

4.3.4 Siswa mampu menulis paragraf ekspositif dengan menggunakan pola pengembangan paragraf ekspositif.

1. Tujuan pembelajaran

4.3.1 Siswa dapat menjelaskan pengertian paragraf ekspositif dengan tepat.

4.3.2 Siswa dapat menjelaskan ciri – ciri paragraf ekspositif dengan tepat.

4.3.3 Siswa dapat mengidentifikasi pola pengembangan paragraf ekspositif pada suatu wacana.

4.3.4 Siswa dapat menulis paragraf ekspositif dengan menggunakan pola pengembangan paragraf ekspositif.

2. Materi pembelajaran

2.1 Pengertian paragraf ekspositif

Eksposisi ialah karangan yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Eksposisi atau pemaparan adalah salah satu bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut (Gorys Keraf, 1981, hal 3).

2.2 Ciri – ciri paragraf ekspositif

2.2.1 Menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2.2.2 Menyampaikan uraian – uraian ilmiah populer atau uraian ilmiah lainnya tanpa mempengaruhi pendapat pembaca.

2.2.3 Bersifat menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa mempengaruhi pendapatnya.

2.2.4 Berisi perincian – perincian secara menyeluruh sampai ke hal yang paling detail.

2.3 Pola pengembangan paragraf ekspositif

2.3.1 Pola proses

Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa.

Untuk menyusun sebuah proses, Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut

2.3.1.1 penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh.

2.3.1.2 penulis harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya.

2.3.1.3 penulis menjelaskan tiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh prose dengan jelas.

Contoh:

“Pohon anggur, di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambil daun anggur secukupnya. Lalu, tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan tersebut kita dinginkan dan setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah, kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri”

2.3.2 Pola Sebab Akibat

Pengembangan paragraf dapat pula dinyatakan dengan menggunakan sebab-akibat. Dalam hal ini sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan gagasan utama, sedangkan untuk memahami sepenuhnya, akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya. Persoalan sebab-akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Bila disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, maka proses itu dapat disebut proses kausal.

Contoh :

“Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85 persen. Akibatnya, Impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Sesudah swasembada pangan tercapai pada tahun 1984, pada tahun 1986, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. akan tetapi, pada tahun 1004, neraca perdagangan beras kita tekor 400 ribu ton. Sejak itu, impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton”

2.3.3 Pola Ilustrasi

Sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkrit. Dalam karangan eksposisi, ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Dalam hal ini pengamatan-pengamatan pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam menjelaskan gagasan-gagasan umum tersebut.

Contoh:

“Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak memahami imbas krisis ekonomi sektor-

sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65 persen; demikian pula perkebunan, yang meningkat 6,46 persen. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95 persen. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik broto (PDB) meningkat dari 18,07 persen menjadi 18,04 persen. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sector pertanian merosot dari tahun ke tahun”

3. Metode pembelajaran

Tanya jawab, jigsaw, dan penugasan

Alokasi waktu: 2 X 45 menit

4. Langkah – langkah kegiatan pembelajaran

Kegiatan	Alokasi waktu
1. Kegiatan pendahuluan	
1.1 Guru memulai pembelajaran dengan apersepsi mengenai paragraf ekspositif.	3'
1.2 Guru menyampaikan dan menjelaskan tujuan pembelajaran	2'
2. Kegiatan inti	
2.1 Guru menjelaskan materi pembelajaran	15'
2.2 Siswa mendiskusikan contoh paragraf eksposisi yang dibagikan oleh guru beserta pola pengembangannya.	10'
2.3 Siswa menyusun kerangka karangan paragraf eksposisi berdasarkan pola pengembangan tertentu.	10'
2.4 Siswa menulis paragraf eksposisi dengan pola pengembangan tertentu.	10'
2.5 Siswa mempresentasikan pekerjaan mereka di depan kelas dan siswa lain menanggapi.	30'
3. Penutup	
3.1 Guru membuat kesimpulan bersama siswa	5'

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.2 Penugasan: carilah tulisan tajuk rencana pada sebuah surat kabar, kemudian identifikasikan pola pengembangan paragraf ekspositifnya	4'
3.3 Guru menutup kegiatan pembelajaran	1'

5. Sumber Belajar

Gorys, Keraf. 1980. *Eksposisi dan Deskripsi*. Ende Flores: Nusa Indah.

Suryanto, Alex dan Agus Haryanta. 2007. *Panduan Belajar Bahasa dan Sastra Indonesia*, Tangerang: Esis.

6. penilaian

Bentuk tes: tertulis dan produk

Soal:

1. Jelaskan pengertian paragraf ekspositif!
2. Jelaskan ciri – ciri paragraf ekspositif!
3. Pola pengembangan paragraf ekspositif terdiri dari 3 jenis pola pengembangan, sebutkan dan jelaskan masing – masing pola pengembangan tersebut?

Tes produk

Buatlah sebuah karangan ekspositif berdasarkan pola pengembangan tertentu dengan tema “Kegiatan ekstrakurikuler yang baik dan bermanfaat di sekolah”.

7. Kunci jawaban

7.1 Paragraf ekspositif adalah paragraf yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan. Tujuannya untuk menambah

pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Eksposisi atau pemaparan adalah salah satu bentuk tulisan atau retorika yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang yang membaca uraian tersebut (Gorys Keraf, 1981, hal 3).

7.2 Ciri – ciri paragraf ekspositif

7.2.1 Menerangkan atau menguraikan suatu pokok pikiran

7.2.2 Menyampaikan uraian – uraian ilmiah populer atau uraian ilmiah lainnya tanpa mempengaruhi pendapat pembaca.

7.2.3 Bersifat menjelaskan, mengembangkan, atau menerangkan suatu gagasan untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa mempengaruhi pendapatnya.

7.2.4 Berisi perincian – perincian secara menyeluruh sampai ke hal yang paling detail.

7.3 Pola pengembangan paragraf ekspositif

7.3.1 Pola proses

Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu atau urutan dari suatu kejadian atau peristiwa.

Untuk menyusun sebuah proses, Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut

7.3.1.1 penulis harus mengetahui perincian-perincian secara menyeluruh.

7.3.1.2 penulis harus membagi proses tersebut atas tahap-tahap kejadiannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7.3.1.3 penulis menjelaskan tiap urutan itu ke dalam detail-detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh prose dengan jelas.

Contoh:

“Pohon anggur, di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambil daun anggur secukupnya. Lalu, tumbuk sampai halus. Masaklah hasil tumbukan itu dengan air secukupnya dan tunggu sampai mendidih. Setelah itu, ramuan tersebut kita dinginkan dan setelah dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Insya Allah, kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri”

7.3.2 Pola Sebab Akibat

Pengembangan paragraf dapat pula dinyatakan dengan menggunakan sebab-akibat. Dalam hal ini sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun demikian, dapat juga terbalik. Akibat dijadikan gagasan utama, sedangkan untuk memahami sepenuhnya, akibat itu perlu dikemukakan sejumlah sebab sebagai perinciannya.

Persoalan sebab-akibat sebenarnya sangat dekat hubungannya dengan proses. Bila disusun untuk mencari hubungan antara bagian-bagiannya, maka proses itu dapat disebut proses kausal.

Contoh

“Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85 persen. Akibatnya, Impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton tahun 1998. Sesudah swasembada pangan tercapai pada tahun 1984, pada tahun 1986, kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530,7 ribu ton pada tahun 1993. akan tetapi, pada tahun 1004, neraca perdagangan beras kita tekor 400 ribu ton. Sejak itu, impor beras meningkat dan pada tahun 1997 mencapai 2,5 juta ton”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7.3.3 Pola Ilustrasi

Sebuah gagasan yang terlalu umum, memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkrit. Dalam karangan eksposisi, ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Ilustrasi-ilustrasi tersebut dipakai sekedar untuk menjelaskan maksud penulis. Dalam hal ini pengamatan-pengamatan pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam menjelaskan gagasan-gagasan umum tersebut.

Contoh:

“Satu-satunya bidang pembangunan yang tidak memahami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya, perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65 persen; demikian pula perkebunan, yang meningkat 6,46 persen. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95 persen. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 18,07 persen menjadi 18,04 persen. Padahal selama 30 tahun terakhir, pangsa sector pertanian merosot dari tahun ke tahun”

8. Pedoman penilaian

Tes tertulis

Soal No 1

Kriteria penilaian	Skor
1. Siswa dapat menjelaskan pengertian paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	5
2. Siswa dapat menjelaskan pengertian paragraf ekspositif tetapi belum detail	4

3. Siswa dapat mendefinisikan tetapi tidak dapat menjelaskan.	3
4. Siswa dapat mendefinisikan tetapi kurang jelas.	2
5. Siswa terbata – bata dalam mendefinisikan dan menjelaskan dan tidak tepat.	1

Soal No 2

Kriteria penilaian	skor
1. Siswa dapat menjelaskan 4 ciri paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	5
2. Siswa dapat menjelaskan 3 ciri paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	4
3. Siswa dapat menjelaskan 2 ciri paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	3
4. Siswa dapat menjelaskan 1 ciri paragraf ekspositif.	2
5. Siswa kurang tepat dalam menjelaskan dan tidak menyinggung sama sekali dari salah satu ciri paragraf.	1

Soal No 3

Kriteria penilaian	Skor
1. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 3 jenis pola pengembangan paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 2 jenis pola pengembangan paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	4
3. Siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan 1 jenis pola pengembangan paragraf ekspositif dengan tepat dan jelas.	3
4. Siswa hanya menyebutkan 2 pola tanpa menjelaskan.	2
5. Siswa hanya menyebutkan 1 pola tanpa menjelaskan.	1

Tes produk:

Aspek Penilaian	Skor
1. kesesuaian isi paragraf dengan tema	20
2. bahasa yang digunakan	10
3. ejaan yang digunakan	10
4. hubungan antara kata, kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, kalimat penegas membentuk pola pengembangan tertentu atau tidak.	10

Mengetahui

Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi

NIP.

NIP.

SABTU PON 2 OKTOBER 2010 (23 SAWAL 1943)

Tajuk Rencana

Premanisme dan Pembangunan Masyarakat Sipil

BARBAR, primitif, hukum rimba, atau sebutan lain mencuat ketika khalayak ramai menonton TV yang menayangkan bentrokan dua kelompok masyarakat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, 29 September lalu. Para pemirsa TV secara gamblang melihat kedua kelompok masyarakat itu membawa senjata tajam. Terlihat pula para wartawan foto dan kameraman TV leluasa meliput adegan kekerasan, tanpa terganggu sedikit pun oleh massa kedua pihak yang bentrok. Seolah aksi mereka lebih pas kalau diliput media massa.

Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala melihat kejadian itu sebagai isyarat kembali maraknya aksi premanisme.

Premanisme selalu terkait dengan dunia kejahatan. Kata 'preman' menyuguhkan identitas kaum sipil. Dengan demikian premanisme merupakan aktifitas warga sipil yang bisa mengarah pada unsur kejahatan, meski dalam praktik mereka yang digolongkan preman hanya sebagai petugas keamanan tempat hiburan malam dan sebagainya.

Ibukota dan kota besar yang semakin banyak memiliki tempat hiburan malam, dan siang, menjadi lahan rezeki bagi kelompok masyarakat seperti itu. Jarang ditemui petugas keamanan tempat hiburan yang tak punya kelompok. Sehingga kelompok besar yang bersaing sering terlibat bentrokan karena perebutan wilayah untuk mengais rezeki. Satu bentrokan kecil di suatu tempat hiburan bisa menyulut bentrokan besar. Ketika kasus bentrokan kecil terangkat ke pengadilan, kedua kelompok bisa bergerak

sebagai usaha mempengaruhi jalannya pengadilan. Manakala mereka berhadapan, maka adegan massa kontra massa pun terjadi. Tapi untuk kelompok massa preman, senjata pun bicara, sehingga munculnya orang yang meregang nyawa atau luka berat, termasuk polisi yang berusaha melerai, bisa terjadi.

Bentrokan antara kelompok preman kebanyakan bermuara pada perebutan lahan rezeki, meski terkadang diwarnai persoalan pribadi. Puncak perebutan rezeki berupa bentrokan terbatas. Namun percikan kecil bisa jadi bara yang besar, karena kelompok preman juga punya pengaruh dengan warga masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka yang tak pernah berperan sebagai preman bisa terlibat bentrokan karena solidaritas.

Sebagai negara hukum, dalam bentrokan bentuk apapun, mereka yang terlibat secara hukum bisa jadi tersangka.

Kebanyakan kriminolog mengatakan, premanisme di dalam dan luar negeri tak mudah diberantas, karena suatu waktu jasa para preman dimanfaatkan aparat penegak hukum. Sehingga sulit menekan premanisme sampai ke titik nol.

Namun kejadian di jalan Ampera, Jakarta Selatan, 29 September lalu merupakan 'lampu merah' atas membiaknya premanisme yang diwarnai perang di jalanan umum, yang terus menerus ditayangkan TV, sehingga bisa menimbulkan ketakutan masyarakat.

Galibnya, pembangunan masyarakat sipil yang dicita-citakan, harus ditegakkan warga sipil sendiri. Jika premanisme membiak, sudah saatnya diberantas. □ - s.

SENIN KLIWON 4 OKTOBER 2010 (25 SAWAL 1943)

Tajuk Rencana

Kecelakaan Kereta Api Seolah Tradisi

LAGI-LAGI kecelakaan kereta api (KA). Kali ini terjadi di Pematang, Jawa Tengah. KA Eksekutif Argo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya menabrak bagian belakang KA Bisnis Senja Utama jurusan Jakarta-Semarang. Sebanyak 36 penumpang tewas dan puluhan lainnya luka berat dan ringan. Pada hari yang sama, di Solo juga terjadi kecelakaan KA. Gerbong belakang KA Gaya Baru Malam disempet KA Eksekutif Bima. Seorang tewas, 4 lainnya cedera.

Seperti biasa, Menteri Perhubungan atas nama pemerintah meminta maaf atas terjadinya kecelakaan transportasi massal itu. Seraya berjanji akan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja sehingga kecelakaan serupa tidak terjadi lagi. Sementara melalui jurubicara kepresidenan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan menteri terkait dan jajaran Direksi PT KAI mengუსut tuntas peristiwa maut tersebut.

Di antara kita tentu ada yang menengarai pernyataan para pejabat itu sekadar *lip service*. Hanya berfungsi sebagai pemanis bibir atau basa-basi dalam kerangka menghibur keluarga para korban. Sebatas menabur janji kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan kinerja. Buktinya, kecelakaan KA dalam berbagai ragam dan bentuknya selalu terulang dan terulang. Secara pukul rata, setiap tahun tidak kurang dari 100 kali kecelakaan KA di berbagai tempat.

Dalam setiap peristiwa kecelakaan transportasi — darat, laut

dan udara — secara garis besar disebabkan salah satu dari dua faktor. Pertama, karena faktor manusia (*human error*), atau faktor teknis (*technical error*). Atau malah karena faktor keduanya. Kita belum tahu faktor apa yang dominan dalam terjadinya kecelakaan KA di Pematang itu. *alibi*

Tentu kita sangat sedih dan merasa pilu mengapa kecelakaan transportasi darat, laut, dan udara silih berganti terjadi di negeri ini. Sepertinya kecelakaan itu sudah mentradisi. Tidak ada bulan atau tahun yang tidak diwarnai peristiwa kecelakaan, yang tidak jarang memakan korban jiwa manusia dalam jumlah puluhan hingga ratusan. Mengapa seakan terkesan tidak ada upaya menghentikannya, atau paling tidak meminimalisasinya. Mengurangi secara signifikan frekuensinya, sehingga tidak terlalu banyak nyawa manusia yang melayang sia-sia. *faktor*

Tidak bisa tidak! Kementerian Perhubungan harus melakukan evaluasi menyeluruh dan super serius terhadap sarana-sarana transportasi dan mekanikanya, berikut manusia yang mengoperasikannya. Dari evaluasi itu kita berharap akan diketahui secara pasti beragam kelemahan atau kesalahan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perbaikan peralatan maupun kinerjanya. Sebab kalau tidak, peristiwa kecelakaan demi kecelakaan beragam moda transportasi akan selalu terulang dan terulang dalam batas waktu yang panjang. □ - k. *analisis sebab*

SELASA LEGI 5 OKTOBER 2010 (26 SAWAL 1943)

Tajuk Rencana

Profesionalisme Penanganan Teroris

PUJIAN terus mengalir ke instansi Polri terkait penangkapan anggota kelompok bersenjata yang diduga sebagai pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerbu Mapolsek Hampan Perak Deli Serdang Sumatera Utara. Dua peristiwa itu diyakini Polri bukan berdiri sendiri, melainkan terkait dengan jaringan terorisme.

Dalam penyeragaman di sejumlah lokasi di Sumatera Utara, polisi setidaknya menembak mati 6 tersangka. Beberapa di antaranya ditangkap hidup-hidup. Mengapa polisi menembak mati? Versi aparat kepolisian menyebutkan, para tersangka tak mau menyerah, melainkan terus melawan dengan menembaki petugas. Dalam kondisi terancam itulah polisi akhirnya menembak mati tersangka.

Bahkan, untuk lebih meyakinkan publik, penggrebekan itu ditayangkan stasiun televisi swasta. Aksi saling tembak antara petugas dan tersangka juga bisa terekam. Semua yang disajikan nampak meyakinkan, sehingga banyak pihak mendukung tindakan kepolisian.

Kita tentu merespons positif upaya Polri meringkus semua pelaku perampokan Bank CIMB Niaga dan penyerbu Mapolsek Hampan Perak. Kita sangat mengapresiasi kerja Polri yang dalam waktu relatif cepat bisa mengendus persembunyian tersangka untuk kemudian meringkusnya. Beberapa tersangka memang masih dalam pengejaran petugas.

Di sisi lain, polisi juga mengakui bahwa kerja mereka didukung masyarakat. Acap penggrebekan tersangka diawali dari informasi masyarakat. Misalnya, para tersangka yang merasa terpojok di hutan, meminta bantuan kepada warga sekitar, namun kemudian warga justru melaporkan ke

polisi. Ada pula tersangka yang meminta diantarkan warga menuju pos polisi guna menyerahkan diri. Agaknya, mereka telah menyadari bahwa aparat kepolisian benar-benar *all out* memburu pelaku.

Meski demikian, beberapa pihak menyayangkan mengapa polisi menembak mati tersangka. Padahal, seandainya tersangka ditangkap dalam kondisi hidup, lebih menguntungkan karena bisa dimintai keterangan guna mengungkap jaringannya. Pertanyaannya, benarkah polisi dalam kondisi terdesak yang mengancam keselamatan jiwa? Tentu harus ada pertanggungjawaban publiknya. Bahkan, setiap peluru yang melesat, harus ada pertanggungjawabannya.

Kita tentu berharap agar aparat tidak salah tembak. Dalam beberapa kejadian, aparat digugat lantaran dianggap tidak profesional dalam menangani kasus terorisme. Sepertinya aparat serba salah, tidak bertindak dihujat, namun ketika bertindak dianggap berlebihan, melanggar HAM dan sebagainya.

Dalam kaitan itu, kita mengingatkan, undang-undang tetap menjadi acuan dalam bertindak. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memberi keleluasaan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan dan penahanan, hendaknya tidak disalahgunakan. Kalau memang salah tangkap, aparat tak perlu malu untuk mengakui, karena hal itu menyangkut nasib seseorang. Sekali lagi, kita mengingatkan, setiap tindakan aparat yang bersentuhan dengan kepentingan publik harus ada pertanggungjawabannya. Hal ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Dan, bila aparat bertindak profesional, pasti masyarakat mendukung. □ - s.



RABU PAHING 6 OKTOBER 2010 (27 SAWAL 1943)

Tajuk Rencana

Hikmah Tragedi Petarukan

MASINIS kereta api eksekutif Argo Bromo Anggrek, M Halik Rudianto, menjadi tersangka untuk mempertanggungjawabkan kecelakaan menabrak kereta api (KA) Senja Utama di Stasiun Petarukan (Pemalang), Sabtu pagi lalu. Semua ini setelah Polres Pemalang dan Tim Polda Jateng melakukan pemeriksaan dan menentukan pasal-pasal yang 'menjerat' masinis.

Kecelakaan yang menewaskan 35 penumpang dan korban luka berat lainnya itu makin menambah daftar panjang kecelakaan transportasi. Satu hal yang jamak dilakukan dalam setiap kecelakaan adalah segera mencari dan menunjuk siapa yang bersalah. Untuk kecelakaan kereta api (KA), masinis dan asisten masinis menjadi sosok yang langsung menjadi tumpuan kesalahan. Menjadi 'kambing' yang 'paling hitam'. Tak banyak yang akan jernih berpikir bahwa kondisi masinis dan asisten, bagaikan orang jatuh, tertimpa tangga bahkan kemudian diterkam harimau.

Mengikuti liputan perihal tragedi ini, sungguh menyesak dada. Prihatin, sedih campur aduk dengan perasaan kemanusiaan lainnya. Marilah kita berempati tidak hanya terhadap korban kecelakaan. Akan tetapi terhadap para masinis. Suatu profesi yang benar-benar menuntut kesehatan lahir dan batin. Psikis maupun fisik. Suatu kondisi manusiawi yang hanya akan diperoleh setelah kebutuhan dasar (*basic need*) tercukupi.

Sulit untuk mengatakan kebutuhan dasar keluarga Halik Rudianto dan Giono (asisten masinis) telah tercukupi, saat media audio visual meli-
put suasana keluarga. Dari tampilan fisik rumah petak yang sangat sederhana -- (mungkin rumah dinas?) -- di-
huni isteri dan dua anaknya, masyarakat awam pun akan dapat mengukur tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Pastinya, serupa juga kehidupan

keluarga para masinis lainnya.

Pertanyaan yang korelatif dengan kondisi itu, bagaimana mungkin sosok yang mendapat fasilitas kesejahteraan minim itu mendapat tanggung jawab yang luar biasa: membawa kereta eksekutif dengan ratusan nyawa? Korporasi tempat bekerja bisa saja membuat peraturan baku yang bersifat tak bisa diganggu gugat, terutama dalam hal penggajian. Peraturan yang tak akan pernah bisa mampu diubah oleh pekerja. Ketidakberdayaan yang jamak terpaksa diterima oleh pekerja yang di negeri ini memang sangat rendah posisi tawar-nya.

Menjadikan tersangka masinis, sekalipun ada indikasi lalai karena mengantuk, nampak tak adil bagi kemanusiaan. Kecelakaan tersebut, jelas tanggung jawab korporasi. Juga tanggung jawab negara ini dalam memberi layanan transportasi masyarakat. Menjadikan masinis sebagai kambing hitam, seharusnya juga dilihat kambing yang amat-sangat lebih hitam. Yakni sosok pemangku kebijakan. Kita juga dapat mempertanyakan sensitivitas para legislatif yang selain berkewajiban melakukan budgeting juga pengawasan.

Kemana hati nurani para wakil rakyat sampai tidak melihat kesejahteraan buruk para masinis - sementara harus bertanggung jawab pada ratusan nyawa setiap malam? Mengantuk, seperti halnya lapar, adalah ritme biologis manusia. Harus dicari penyebab masinis mengantuk saat bekerja. Siapa tahu memang dia harus bekerja ekstra untuk hasrat hidup keluarga yang tak kunjung sejahtera?

Tragedi Pemalang kemarin, hendaknya menjadi *entry point* menengok kembali kelayakan hak dan kewajiban masinis. Mendesak dilakukan deregulasi, agar tidak ada lagi kecelakaan serupa. Mencari hikmah dari tragedi. Agar tak ada lagi kecelakaan serupa.

analisis Eryan

KAMIS PON 7 OKTOBER 2010 (28 SAWAL 1943)

Tajuk Rencana

Menutup Peluang Komersialisasi Pendidikan

MASALAH komersialisasi pendidikan masih akan jadi persoalan klasik dan tak pernah hilang, selama peluang komersialisasi itu tetap ada. Apa pun peraturan yang dikeluarkan pemerintah, selalu ada celah atau peluang untuk terjadinya pelanggaran. Sebab, seperti sudah menjadi tradisi dan 'penyakit' umum bahwa seketat apa pun peraturan dibuat, pasti ada saja kasus pelanggaran dengan memanfaatkan peluang yang tak tersentuh dalam peraturan tersebut, termasuk khususnya dalam sektor pendidikan.

Sehingga, wajar kalau kemudian muncul banyak komentar terkait dengan keluarnya Keputusan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai pengganti PP 17. Karena, sebagaimana diungkapkan beberapa pengamat, kendati dalam PP tersebut ada aturan yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) harus menerima mahasiswa miskin minimal 20 persen, tapi peluang adanya komersialisasi masih tetap ada.

Komersialisasi antara lain bisa juga terjadi manakala hukum ekonomi *supply and demand* tak seimbang. Selama permintaan masih jauh melebihi persediaan atau kuota, maka peluang penyimpangan dengan melakukan komersialisasi, selalu ada. Dalam dunia pendidikan, maka komersialisasi sangat terasa dan terbuka pada tahapan penerimaan mahasiswa baru, hingga pelaksanaan proses belajar mengajar. Hal ini terutama dipicu oleh dominasi pemikiran bahwa pendidikan formal adalah se-

gala-galanya dan menjadi tolok ukur keberhasilan seseorang dalam dunia pendidikan.

Memang, kita semua tahu bahwa antara tuntutan kualitas pendidikan yang tentunya membutuhkan dukungan finansial atau pembiayaan akan sangat terkait dengan kebutuhan sebuah institusi pendidikan akan ketersediaan dana yang signifikan. Sehingga, upaya peningkatan kualitas pendidikan harus juga sejalan dengan misi pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Jangan sampai muncul dualisme atau dikotomi di antara keduanya. Dengan demikian, tujuan mulia dari pemerintah untuk mengedepankan rakyat miskin dalam mendapatkan kesempatan pendidikan, tetap harus diamankan.

Artinya, tak ada yang salah dengan munculnya sebuah peraturan, sejauh diikuti dengan langkah pengawasan dan upaya yang terus-menerus dalam menutup celah-celah munculnya komersialisasi pendidikan. Dalam kaitan inilah, kita layak menjaga konsistensi penyelenggaraan pendidikan agar jangan sampai frustrasi lantaran dibingungkan oleh peraturan yang lebih sering berubah-ubah, dan kemudian terjebak serta tergoda untuk melakukan langkah dan tindakan yang bisa diindikasikan sebagai komersialisasi.

Apa pun, kita layak menggarisbawahi seruan Mendiknas yang mewajibkan semua PTN harus menerima mahasiswa miskin, minimal 20 persen. Misi dan tugas mulia ini harus diamankan dan harus benar-benar dibersihkan dari komersialisasi pendidikan. □ - g. tujuan

JUMAT WAGE 8 OKTOBER 2010 (29 SAWAL 1943)

Tajuk Rencana

Mereaksi 'Pembatalan' Kunjungan Presiden SBY

MASIH ingat *Inter-Governmental Group on Indonesia* atau IGGI? Kelompok negara-negara donor untuk Indonesia itu 'dibubarkan' Presiden Soeharto — karena Johannes Pieter Pronk, Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda sebagai koordinator IGGI, mengkritisi masalah HAM di Indonesia. Keputusan Presiden Soeharto itu dinilai sangat berani, karena dilakukan menjelang berlangsungnya pertemuan tahunan IGGI.

Selasa (5/10) lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membuat keputusan yang sangat berani. Menunda (untuk tidak sampai menggunakan istilah 'membatalkan') kunjungan kenegaraannya ke Negeri Belanda. Padahal seluruh rangkaian kegiatan protokoler baik yang dilakukan pemerintah Indonesia maupun Belanda telah siap. Alasan 'pembatalan', menjelang kedatangan Presiden SBY di Belanda, pengadilan di negeri itu menyetujui dimulainya proses hukum atas tuntutan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Memang, antara kedua peristiwa itu — 'pembubaran' IGGI oleh Presiden Soeharto dan 'pembatalan' kunjungan kenegaraan Presiden SBY ke Negeri Belanda — secara substantif tidak ada korelasinya. Tetapi nuansa yang melatarbelakangi pengambilan keputusan yang sama-sama sangat berani itu relatif sama. Ada upaya-upaya yang sangat kuat untuk memanfaatkan, baik IGGI maupun kunjungan kenegaraan, untuk kepentingan politis. Mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.

Tentunya, saat Presiden Soeharto

'membubarkan' IGGI dan sewaktu Presiden SBY 'membatalkan' kunjungan kenegaraan ke Belanda, diputuskan setelah mempertimbangkan pula reaksi dan dampak positif-negatif yang bakal timbul, baik di dalam negeri maupun di kalangan dunia internasional. Reaksi atas 'pembubaran' IGGI di dalam negeri Indonesia waktu itu boleh dikatakan positif. Sebab tidak siapapun dan pihak manapun termasuk media massa, dalam situasi kehidupan politik yang represif, tidak berani melawan arus. Sementara reaksi yang timbul atas 'pembatalan' kunjungan yang dilakukan Presiden SBY?

Kita menyaksikan reaksi itu sangat beragam. Ada yang menilai keputusan itu sebagai tepat — karena seperti dikatakan Presiden SBY, digelarnya pengadilan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia itu menyinggung harga diri bangsa Indonesia. Ada pula yang menengarainya sebagai blunder politik, karena dilakukan di luar kelaziman. Diputuskan pada jam terakhir menjelang keberangkatan, sehingga menghadirkan unsur *surprise* bagi pemerintah dan kerajaan Belanda pada khususnya, dan dunia internasional pada umumnya.

Munculnya reaksi positif atau negatif, pro maupun kontra, perlu kita sikapi dengan lapang dada. Pemerintah pun tentu menyadari, dalam kehidupan demokrasi siapapun dan pihak manapun bebas bersuara dan mengeluarkan pendapat. Tetapi karena permasalahan yang dikritisi sangat berkaitan dengan harga diri bangsa Indonesia, rasanya kita sepakat untuk tidak mereaksinya secara ekstrem. □

SABTU KLIWON 9 OKTOBER 2010 (1 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana

Kegalauan Politik Malaysia Perlu Dicermati

HUBUNGAN Indonesia dengan Malaysia sering memanas. Tapi kalau dirunut, kebanyakan karena persoalan hukum, antara lain perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) dan masalah perbatasan. Konflik pun sempat menajam terkait penangkapan 3 petugas DKP dari Indonesia oleh Kepolisian Diraja Malaysia pertengahan Agustus.

Penangkapan 3 petugas DKP berbuntut pelemparan kotoran oleh kelompok LSM Bendera terhadap Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia dan menyulut kemarahan pejabat negeri jiran itu.

Kasus pengusiran maupun penyiksaan TKI Indonesia di Malaysia dan persoalan perbatasan memang mudah menyengat perasaan rakyat Indonesia, dan membawa persoalan ke tingkat diplomatik kedua negara. Tapi hingga sekarang sangat jarang terungkap kegalauan politik yang melanda Malaysia sekarang.

Sebagaimana diketahui, partai UMNO yang selama puluhan tahun bisa dikatakan sebagai 'mayoritas tunggal' mengalami pukulan berat di berbagai negara bagian di Malaysia pada Pemilu, yang berbuntut terjadinya konflik internal di tubuh partai terbesar itu. Bahkan kekalahan UMNO di berbagai negara bagian Malaysia sempat membawa konflik diplomatik antara Malaysia dengan India akibat tindakan rasialis pihak UMNO.

Popularitas dan soliditas UMNO menurun tapi masih berkuasa, sedangkan melejitnya partai-partai oposisi semakin menjadi

ancaman bagi para tokoh UMNO. Sehingga masuk akal jika para tokoh UMNO mencari popularitas dengan berbagai cara. Terkait hal ini, mantan Deputi Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim menuding partai berkuasa di Malaysia, UMNO, memanas-manas hubungan Indonesia-Malaysia dengan menebar ketakutan dengan membangun image bahwa seolah-olah Malaysia terancam Indonesia.

Meski tidak benar, tapi sentimen terhadap Indonesia menjalar ke masyarakat. Namun Anwar yakin tidak semua masyarakat akan melakukan tindakan yang merusak hubungan dua negara serumpun ini. *Perantangan*

Anwar juga menegaskan, mayoritas rakyat Malaysia tidak membenci Indonesia. Kalau ada aura kebencian mengemuka di publik akibat permainan media massa Malaysia yang selalu menyampaikan hal buruk tentang Indonesia. Ia membantah pandangan bahwa mayoritas rakyat Malaysia tidak suka Indonesia. Ini hanya mayoritas kecil, kemudian dipermainkan oleh media. Anwar juga minta agar masyarakat kedua negara menjalin hubungan dan kerja sama yang baik perlu dicamkan dengan baik. Masyarakat antar-dua negara ini, generasi muda, mahasiswa, anggota parlemennya bisa lebih baik berhubungan. *Perbandingan-perbandingan*

Dari kenyataan itu jelas bahwa segala gesekan dengan Indonesia bisa dijadikan komoditi politik bagi UMNO yang makin kurang populer bagi rakyat Malaysia. *Q - k.*

analisis akibat

SENIN PAHING 11 OKTOBER 2010 (3 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana

Bencana Wasior, Isu Negatif dan Sensitif

TERJADI silang pendapat berkait dengan bencana banjir di Wasior, Papua Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membantah musibah diakibatkan pembalakan liar. Bantahan itu didasarkan pada laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Muarif. Sebelumnya, sejumlah LSM peduli pelestarian hutan melansir eksploitasi hutan Wasior secara berlebihan sebagai penyebabnya. Sementara Menhut Zulkifli Hasan menyatakan, alam punya cara tersendiri untuk membalas terjadinya pembalakan liar.

Kita mencermati, setiap terjadi bencana alam yang menewaskan sejumlah orang dan memporak-porandakan infrastruktur, silang pendapat seperti itu selalu terjadi. Di satu sisi, para pegiat pelestarian alam bersikukuh bencana alam dalam berbagai bentuk dan intensitasnya itu sebagai dampak dari terganggunya ekologi. Berubahnya keseimbangan dalam hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan kondisi alam sekitar dan lingkungannya. Sedang di sisi lain, pemerintah selalu terkesan mengelak atau menepis adanya 'tuduhan' tersebut.

Apa pun penyebab banjir bandang di Wasior, yang pasti musibah itu telah menyentak nurani berbangsa kita. Demikian dahsyatnya — sehingga 100 orang lebih meninggal dunia dan ratusan lainnya dinyatakan hilang — mengundang pula perhatian masyarakat internasional. Salah satu di antara tokoh dunia yang menyatakan keprihatinannya adalah Menlu AS Hillary Rodham Clinton.

Kita berpendapat, untuk semen-

ta hentikan dulu terjadinya silang pendapat. Rasanya sudah lebih dari cukup para pegiat pelestari alam membeberkan penyebab terjadinya bencana Wasior dengan berbagai analisis dan argumentasi yang melatarbelakangi 'tuduhannya'. Sementara pemerintah tidak perlu terkesan ekstra reaktif menanggapi 'tuduhan' itu, sampai-sampai Presiden SBY pun merasa perlu membantahnya.

Yang diperlukan rakyat Wasior, lebih-lebih yang kehilangan saudara dan rumah tempat tinggalnya adalah bantuan dalam segala bentuk dan manifestasinya. Bukan hanya bantuan untuk keperluan makan dan minum sehari-hari. Tetapi juga bantuan pengobatan, sanitasi, serta normalisasi kehidupan lingkungan sehingga Wasior berdenyut lagi. Tidak berlama-lama menjadi kota mati.

Tidak terlalu berlebihan bila kita mengingatkan, penanganan yang terkesan lamban atas derita rakyat dan pemulihan lingkungan Wasior, akan dapat menghadirkan isu negatif. Bahkan bukan tidak mungkin berkembang menjadi isu sensitif, mengingat masih adanya kelompok masyarakat Papua yang selalu berusaha memanfaatkan 'kelemahan' dan 'kelengahan' pemerintah untuk kepentingan politiknya.

Kita mengharapkan Presiden SBY sesegera mungkin mengunjungi Wasior, sekaligus membeberkan upaya normalisasi kehidupan masyarakatnya. Sekaligus rencana membangun kembali infrastruktur dan fasilitas lingkungan yang telah porak poranda. Itu semua perlu dilakukan untuk mencegah munculnya isu negatif dan sensitif tadi. □ - k tujuan

SELASA PON 12 OKTOBER 2010 (4 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana *Sinulatan Rakyat***Apa Maunya Kejaksaan?**

PERDEBATAN seputar penolakan Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan peninjauan kembali (PK) Kejaksaan Agung (Kejakung) terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chadra M Hamzah, terus bergulir. Apalagi, sejak awal publik menduga Kejaksaan tidak ikhlas mengeluarkan SKPP Bibit-Chandra lantaran institusi penegak hukum ini masih meyakini bahwa bukti dugaan suap dua pimpinan KPK ini cukup kuat. Alhasil, SKPP itu terbit dengan 'cacat' sehingga rawan digugat.

Buktinya bisa dilihat saat ini. Pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA) menganggap SKPP Bibit-Chandra tidak sah. Apakah Kejaksaan tak pernah mempertimbangkan bahwa PK terkait SKPP Bibit-Chandra bakal ditolak MA? Wallahua'alam. Apalagi MA menganggap PK tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena secara Undang-undang (UU No 5/2004) PK tak bisa diajukan untuk putusan praperadilan. Lagi-lagi, apakah Kejaksaan tak memahami undang-undang ini?

SKPP dengan alasan sosiologis, mungkin baru kali ini diajukan Kejaksaan, yakni untuk kasus Bibit-Chandra. Ini berbeda dengan SKPP dengan alasan hukum, yakni tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan.

Kita yakin, Kejaksaan bukan tidak memahami risiko diajukannya SKPP dengan alasan sosiologis. Kalau boleh berasumsi, sejak awal sebenarnya Kejaksaan telah mengetahui bahwa SKPP yang dikeluarkannya sangat lemah dan rawan gugatan.

Atas penolakan PK tersebut, Kejaksaan sampai sekarang belum bersikap. Memang ada beberapa alternatif menyikapi penolakan tersebut. Beberapa alternatif itu antara lain, Kejaksaan bisa mengeluarkan SKPP lagi (sebagai perbaikan) atas SKPP sebelumnya. SKPP perbaikan ini—ICW menyebutnya sebagai SKPP jilid II—tentu dengan alasan berbeda dari SKPP sebelumnya, yakni alasan hukum. Konstruksinya, karena tidak

cukup bukti untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan, maka Kejaksaan mengeluarkan SKPP kedua. Walaupun SKPP kedua ini tetap bisa digugat, namun setidaknya telah memiliki dasar hukum yang kuat. Persoalannya, apakah Kejaksaan bersedia melakukan hal demikian—setelah sebelumnya ngotot bahwa cukup bukti untuk menjerat Bibit-Chandra?

Alternatif kedua, Kejaksaan mengeluarkan *deponering* atau mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Bila cara ini ditempuh, niscaya tak mungkin Kejaksaan dipraperadilan seperti yang terjadi sekarang ini. Hanya saja, untuk mengesampingkan perkara, Kejaksaan harus konsultasi terlebih dulu ke DPR dan Mahkamah Agung (MA).

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) mengusulkan Kejaksaan memilih *deponering*. Sebab, ada indikasi kuat bahwa kasus Bibit-Chandra direkayasa. Bahkan dalam sidangnya, MK telah membeberkan rekayasa yang melibatkan Anggodo Widjojo untuk mengkriminalisasi Bibit-Chandra. Bukti itu makin kuat setelah Pengadilan menyatakan Anggodo bersalah dengan melakukan permufakatan jahat untuk mencoba menyuap pimpinan KPK. Apa arti putusan ini? Berarti tuduhan terhadap Bibit-Chandra melakukan pemerasan terhadap Anggodo sama sekali tidak benar alias hanya rekayasa.

Dengan terungkapnya fakta tersebut, apakah Kejaksaan hendak memilih alternatif membawa kasus Bibit-Chandra ke pengadilan? Jika tetap membawanya ke pengadilan, berarti kerja Tim Delapan yang dibentuk Presiden SBY tak ada gunanya, karena rekomendasinya diabaikan. Dengan kata lain, pernyataan SBY agar kasus tersebut diselesaikan di luar pengadilan tak lagi dihiraukan Kejaksaan. Bola saat ini ada di tangan Kejaksaan. Apa maunya Kejaksaan? Kalau pun hendak mengajukan kasus tersebut ke pengadilan, beranikah menuntut bebas Bibit-Chandra? □ - s. *Perjuangan*

RABU WAGE 13 OKTOBER 2010 (5 DULKALDAH 1943)

Tajuk Rencana

'Indomie' dan Bangsa Indonesia

PRODUK mie instan 'Indomie' dari Indonesia yang beredar di Taiwan, ditarik dari dua *supermarket* terkemuka *Parkshop* dan *Welcome*. Alasan yang dipublikasikan dalam dan luar negeri Taiwan, produk mie instan tersebut mengandung pengawet *E218* atau *Metyl P-Hydroxybenzoate* (bahan pangan pengawet) yang dilarang di negeri itu.

Pelaporan resmi oleh aparat setempat yang segera dipublikasikan tersebut, langsung menuai respons tak hanya dari Indonesia, Pantauan media massa hingga Selasa (12/10) Singapura juga segera aktif melakukan penelitian terhadap Indomie yang juga beredar di sana. Hongkong pun melakukan hal yang sama. Menurut *Agri-Food Veterinarry Authority (AVA)* Singapura juga tidak mengizinkan pemakaian zat pengawet itu pada produk mie instan. Saat ini, AVA tengah melakukan pengujian. Mereka berjanji segera mengumumkan hasilnya ke publik begitu proses tes selesai.

Harus diakui jenis makanan instan ini memang sangat populer di kalangan masyarakat. Konon, tak ada penduduk yang belum pernah mencicipi mie instan. Meskipun konsumsi terhadap mie instan, sampai saat ini masih terus pro-kontra. Dianjurkan untuk konsumsi, hanya dalam kondisi darurat. Sangat dianjurkan tidak dikonsumsi terlalu sering, karena memang banyak mengandung zat (kimia) tambahan untuk pewarna maupun pengawet.

Membicarakan kasus mie instan yang ditarik dari peredaran di Taiwan - nampak sama penting dengan kasus lain yang tengah menjadi *cover story* dan *head line* seperti kasus KPK dan bencana alam Wasior. Seperti diketahui, produk mie instan Indomie ditarik dari sejumlah *supermarket* di Taiwan karena mengandung zat pengawet *methyl p-hydroxybenzoate* yang dilarang di Taiwan.

Namun kita perlu ikut mencermati kasus ini. Sebab ternyata *asam benzoat (E210)* dan *methylparaben (E218)* di Taiwan juga dikenal sebagai bahan pengawet yang dinyatakan aman. Otomatis, zat tersebut legal. Hal ini dikuatkan dalam sidang FAO (Organisasi Pangan PBB) di Beijing pada 15-19 Maret 2010 yang menyebutkan *methylparaben* layak untuk dikonsumsi.

Selama ini, ternyata Indomie sudah beredar di Taiwan sejak 15 tahun lalu. Awam pun akan segera mempertanyakan: ada apa di balik tindakan (kebijakan?) menarik produk tersebut? Para pakar bisnis, akan melihat sebagai persaingan dagang yang lazim terjadi di era perdagangan bebas ini.

Untuk mencegah agar tidak muncul sentimen lain yang lebih emosional, misal, seputar harga diri bangsa (yang dilecehkan) dari sudut pandang ilmiah dan perundangan - maka harus segera dicari solusi yang tepat, tegas dan bermartabat. Kalaulpun Menteri Perekonomian Hatta Rajasa juga mengatakan kasus dilarang beredarnya Indomie di Taiwan berkaitan dengan perang dagang.

Untuk itu harus *fairness*. Antara lain secara terbuka diteliti secara objektif, hadirkan para ahli baik ahli teknologi pangan maupun ahli hukum. Dengan jalur tersebut, kita bisa akan tetap punya martabat bersaing di era perdagangan bebas. Kita belum lupa catatan kasus minyak kelapa sawit (CPO) yang mengurangi dominasi Indonesia di perdagangan dunia akibat telaah kasus yang tidak objektif.

Dalam hal mie instan ini, kita harus tampil sebagai pemenang yang elegan. Mari kita tepiskan noda sebagai bangsa (Indonesia) yang selalu kalah. Jangan sampai lagi kalah diplomasi di laut, kalah di darat, kalah di ekspor. □ - s *tejuan, Persia*

KAMIS KLIWON 14 OKTOBER 2010 (6 DULKAJDAH 1943)

Tajuk Rencana

Mendewasakan Pola Pikir UMKM

USAHA Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sering disebut sebagai komunitas usaha yang tangguh dan mampu bertahan pada krisis. Kenyataan menunjukkan, Yogya memiliki banyak UMKM dan juga terbukti memiliki kinerja yang membanggakan, terutama ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia.

Namun demikian, masih banyak permasalahan yang muncul terkait dengan keberadaan UMKM tersebut, khususnya yang bergerak dalam sektor kerajinan. Salah satunya adalah belum tampak kemampuan yang signifikan dari mereka dalam upaya mengembangkan usahanya. Sebagian besar UMKM masih bertahan dengan volume usaha mereka. Padahal, peluang untuk bisa mengembangkan usaha cukup besar, terutama terkait dengan pendanaan atau dukungan modal.

Salah satu faktor penyebabnya, adalah masih banyaknya perajin kita yang berpola pikir konsumtif. Sehingga, ketika mendapat kelebihan dana, baik karena profit keberhasilan usahanya, maupun karena mendapat kucuran dana dari lembaga keuangan untuk mendukung pengembangan usaha, tak serta-merta mereka memanfaatkan untuk mengembangkan usahanya.

Tak sedikit dari perajin tersebut yang mengalokasikan dana lebih tersebut untuk membeli barang-barang tersier yang bernuansa konsumtif, dalam arti sebenarnya tak benar-benar dibutuhkan.

Tak sedikit pula yang kemudian menjajakan dana tersebut untuk pengadaan sarana angkutan secara berlebih dan tak proporsional, seperti mobil yang mewah serta peralatan rumah tangga yang terkesan 'wah'.

Akibatnya, ketika mendapat order dalam jumlah yang besar, seperti ketika musim liburan, selalu muncul jawaban klise, yakni kekurangan modal. Padahal, masa-masa banyak order tersebut sudah bisa diprediksi sebelumnya. Hanya saja, karena pola pikir yang belum dewasa dari sementara UMKM kita tersebut, menjadikan peluang yang muncul di depan mereka tak bisa dimanfaatkan secara optimal.

Oleh karena itulah, perlu upaya-upaya dari pemerintah untuk mendewasakan pola pikir UMKM tersebut agar bisa selektif dalam mengalokasikan dana mereka. Pola konsumtif harus sedikit demi sedikit dikurangi, dengan tetap fokus pada pengembangan usaha mereka. *Jurnal 3 Cara*

Bagi UMKM sendiri, sudah saatnya melakukan introspeksi, dengan komitmen untuk meningkatkan usaha mereka dan jangan sampai tergiur pada iming-iming barang-barang konsumtif, yang bisa menggiring mereka berpikir praktis, dengan membelanjakan dana keuntungan usaha mereka untuk barang-barang konsumtif. Hanya dengan cara inilah, para UMKM akan bisa meningkatkan status mereka dan tak selamanya nasib mereka hanya sebagai usaha kecil dan menengah saja. *U-c.*

SABTU PAHING 16 OKTOBER 2010 (8 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana

'Sehari Tanpa Beras' Baik, Tapi Tak Mudah

CUACA ekstrem yang ditandai hujan terus menerus, serangan hama, dan panen yang tak serentak menentukan penurunan produksi beras tahun ini. Padahal konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 139 kilogram per tahun. Lebih tinggi dari konsumsi beras di China dan Jepang.

Tingkat konsumsi beras yang tinggi dengan pola musim yang berubah sangat dramatis, secara otomatis mengganggu pola tanam yang selama ini sudah jadi pegangan para petani. Sehingga segala yang ditargetkan para petani tahun ini meleset. Tidak hanya pada tanaman padi, tapi juga tanaman pangan yang lain.

Dengan konsumsi beras terbesar di dunia, yang mencapai dua kali lipat konsumsi global, Indonesia memiliki banyak jenis padi, seperti padi hibrida yang mencapai lebih 30 jenis yang setara dengan varietas padi hibrida Bernas Prima, selain itu jenis padi non hibrida yang jumlahnya mencapai lebih 100 varietas dan telah dikembangkan petani.

Dengan besarnya konsumsi beras, wajar jika proyeksi pertanian yang mengarah pada ketersediaan beras secara nasional terus dipacu. Tapi apa yang diharap, lain dari yang didapat. Sebab, untuk pemenuhan kebutuhan beras secara nasional sering harus impor. Padahal pada masa lalu Indonesia pernah menjadi negara pengekspor beras. Namun pertambahan jumlah penduduk hingga makin banyaknya daerah persawahan menjadi kawasan pemukiman, terkadang tak disertai pembukaan lahan baru buat pertanian. Hal ini banyak terlihat di pulau Jawa, dimana lahan persawahan yang berada di dekat jalan raya banyak yang berubah menjadi toko, perkantoran dan

rumah tinggal ataupun ruko.

Kalau sekarang digelar 'One Day no Rice' alias satu hari tanpa beras, diharapkan dapat menghemat 1,2 juta ton dengan harapan bisa mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Kampanye itu diwarnai kenyataan bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati lain yang dapat dijadikan alternatif makanan pokok pengganti nasi. *Analisis Cara*

Kata 'ketergantungan' pada tataran emosi masih bisa berubah. Tapi kalau sudah menyangkut isi perut, tak mudah, dan berhadapan dengan kepentingan. Kampanye 'One Day no Rice' sangat baik jika bisa ditanggapi serentak. Akan lebih baik jika kampanye seperti itu juga disertai pengalakan jenis tanaman pangan yang bisa menjadi makanan pokok. *Cara*

Dari tinjauan para pakar, tanaman padi mengandung gas methana yang menyumbang pemanasan global. Sedangkan makanan pokok pengganti nasi yang merupakan bagian dari keanekaragaman hayati sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia, seperti sagu, ubi, jagung dan bahan lainnya yang bisa dikembangkan. Tapi sangat jarang dipopulerkan, sehingga tak punya daya saing menghadapi nasi sebagai makanan utama. *Perbandingan, Persepsi*

Jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa disertai pembukaan lahan persawahan padi, takkan mudah mengatasi ketergantungan pada beras. Oleh karena itu soal makanan pokok alternatif harus dimulai pada setiap keluarga. Tanpa upaya penyadaran di tingkat lokal, musykil orang akan mencoba hidup tanpa beras. 'One Day no Rice' hanya akan menjadi sekadar slogan. □ - k

analisis cara

SENIN WAGE 18 OKTOBER 2010 (10 DULKALDAH 1943)

Tajuk Rencana

Mempertahankan JJC sebagai Event Kelas Dunia

HARIAN ini menulis, Jogja Java Carnival (JJC) merupakan event kelas dunia. Menjadi ikon wisata internasional. Salah satu di antara tengarnya adalah, hadirnya beragam atraksi budaya yang ditampilkan komunitas lokal, nasional, regional, dan internasional.

Tidak berlebihan kiranya ketika Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, JJC telah membuat Yogyakarta sebagai kota budaya yang semain hidup. Beragam atraksi yang ditampilkan dalam JJC mampu menarik perhatian wisatawan lokal, domestik, maupun internasional.

Sebagai warga Kota Yogyakarta khususnya dan Provinsi DIY pada umumnya, kita merasa bangga dengan adanya event tersebut. JJC yang berlangsung untuk yang ketiga kalinya itu, sungguh membuat hati kita *mongkog*. Kehadirannya semakin melengkapi sederet agenda tahunan yang telah dikenal luas secara nasional maupun internasional. Keberadaannya kian meneguhkan Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata dengan keanekaragaman produk seni dan budaya.

JJC 2010 yang berlangsung semarak dan meriah itu seakan menandai puncak komitmen Pemkot Yogyakarta di bawah kepemimpinan Walikota Herry Zudianto dalam mengangkat harkat dan martabat Yogyakarta yang multipredikat. Paling tidak, dua predikat tercermin secara gamblang dalam peristiwa itu. Pertama, predikatnya sebagai kota seni dan budaya yang terekspresikan dalam berbagai produk kreatif dan inovatif. Kedua, predikatnya sebagai

miniaturnya Indonesia yang terekspresikan dalam aneka penampilan yang dipersembahkan oleh putra-putri dari sejumlah daerah di Indonesia.

Ya, kita menengara JJC tahun ini merupakan puncak komitmen Walikota Herry Zudianto dalam meneguhkan Yogyakarta sebagai ikon wisata internasional. Tanpa kita sadari, puncak komitmen itu terjadi menjelang berakhirnya pengabdian Herry Zudianto sebagai Walikota Yogyakarta. Sebab seperti kita ketahui, tahun 2011 mendatang merupakan tahun terakhir masa jabatannya yang kedua. *Analisis sebab*

Terbersit semacam pertanyaan (bernada iseng). Bagaimana nasib JJC sepeninggal Herry Zudianto nantinya? Akankah event kelas dunia itu masih akan berlanjut di tahun-tahun mendatang? Pertanyaan demikian tentunya berangkat dari adanya pemecah yang sering terjadi di negeri kita, yakni 'ganti pimpinan ganti kebijakan'. Dalam skala nasional, pemecah seperti itu dapat kita saksikan di saat terjadi kepemimpinan nasional atau pimpinan suatu kementerian. *Perayaan*

Tidak ada salahnya memang kita melemparkan pertanyaan semacam itu dalam kerangka antisipasi. Maksud kita, siapapun dan dari kekuatan politik manapun yang akan memimpin Kota Yogyakarta nantinya, JJC harus dipertahankan. Harus dilestarikan sebagai produk dan peristiwa yang telah berskala dunia. Dengan demikian menjadi kewajiban kita semua, warga Kota Yogyakarta khususnya, untuk mengawal agar event JJC tetap abadi. □ - s. *10/10/2010*

SELASA KLIWON 19 OKTOBER 2010 (11 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana *Korupsi Politik*

Siapa Sesungguhnya Mafia Hukum?

MASYARAKAT kini sedang disugui berbagai atraksi hukum yang terkadang membanggakan, tapi sekaligus membingungkan. Ketika aparat penegak hukum gencar memburu dan menangkap mafia hukum, masyarakat pun bertanya: benarkah yang ditangkap aparat adalah aktor mafia hukum yang sesungguhnya?

Kita ambil contoh kasus mafia pajak dengan tokoh sentral mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan. Dalam persidangan terungkap fakta keterlibatan jenderal polisi dalam praktik kotor tersebut. Tak kurang kesaksian Kopol Arafat Enanie dan AKP Sri Sumartini (penyidik kasus Gayus) yang menunjuk keterlibatan atasannya dalam kasus mafia pajak. Arafat dan Sri Sumartini merasa dikorban oleh atasannya. Namun, hingga sekarang sang atasan tak pernah dibawa ke pengadilan.

Dua jenderal yang disebut-sebut terkait dengan kasus mafia pajak itu adalah Brigjen Edmond Ilyas dan Brigjen Radja Erizman. Meski keduanya telah diperiksa di sidang kode etik profesi dan dinyatakan bersalah, namun tidak otomatis berlanjut ke pengadilan negeri atau tipikor. Bahkan mereka malah dipromosikan sebagai staf ahli Kapolri. Inilah pemandangan yang bisa dilihat secara kasat mata oleh publik. Para penyidik pelaksana harus menanggung sendiri perbuatannya. Bukankah tidak mungkin para bawahan bertindak sendiri tanpa izin atau arahan atasan untuk menangani kasus sekelas Gayus?

Belum habis kebingungan kita, kita kembali dikejutkan dengan persidangan kasus mafia hukum yang menyeret Sjahril Djohan. Sebelumnya, nama itu dimunculkan Komjen Susno Duadji ketika dimintai keterangan di hadapan Komisi III DPR. Pengakuan itu pula yang kemudian justru mengantarkan Susno sebagai

tersangka kasus suap penangkapan ikan arwana. Bahkan, Susno dituduh korupsi dana pengamanan Pilkada Jabar saat dirinya menjabat Kapolda Jabar. Uniknyalah, hanya Susno-lah perwira tinggi Polri yang dijadikan tersangka.

Pengadilan telah memvonis Sjahril Djohan dengan hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan korupsi secara bersama-sama. Dengan divonis bersalahnya Sjahril Djohan, posisi Susno nampak makin terjepit. Mengapa? Karena, berdasar fakta yang terungkap di persidangan, melalui Sjahril inilah uang suap Rp 500 juta mengalir ke Susno Duadji terkait dengan penanganan kasus ikan arwana. Logika hukumnya, bila pemberi terkena hukuman, maka penerima atau pihak yang disuap juga terkena sanksi. Posisi kasus Sjahril kian jelas. Apalagi, Sjahril menyatakan telah menerima putusan hakim tanpa mengajukan banding—walaupun dirinya semula menyatakan keberatan dan menginginkan bebas. Dengan kata lain, Sjahril telah mengakui dirinya bersalah dan menerima hukuman yang dijatuhkan majelis hakim.

Bagaimana dengan Susno? Bila hakim meyakini kebenaran yang disampaikan Sjahril tentang suap Rp 500 juta, tentu posisi Susno sangat terancam. Meski begitu, agar peradilan berjalan fair, Susno harus diberi kesempatan membela diri. Hakim harus menguji bukti yang dihadirkan di persidangan. Artinya, pengakuan saja tak cukup untuk menjerat seseorang bersalah.

Memang terasa aneh, mungkin Susno membongkar berbagai kasus—termasuk kasus ikan arwana yang melibatkan Sjahril Djohan—namun pada akhirnya justru memenjarakan diri sendiri? Lantas, siapa sesungguhnya mafia hukum itu? Wallahua'lam. □ - c.

redaktor

RABU LEGI 20 OKTOBER 2010 (12 DULKAIDAH 1943)

RAJUK RENCANA *Xedaulatan Rakyat*

UN, Agenda yang Energik

PERNYATAAN dari Ungin Edy Wibowo (dari Badan Standar Pendidikan Nasional-BSNP) yang menyatakan bahwa penetapan standar kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2011 harus ditentukan pula oleh pemerintah daerah (Pemda) (KR, 19/10), menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Ada kelegaan tersendiri terhadap 'kearifan' BSNP yang memberi hak menentukan standar kelulusan.

Khususnya bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang pencapaian prestasi UN 2010 mendapat reputasi 'jeblok' akibat banyak peserta UN yang gagal meraih angka di atas nilai standar. Pernyataan tersebut merupakan tantangan tersendiri, untuk kembali membuktikan tingkat keberhasilan UN yang masih menyandarkan pada penilaian kuantitatif dan kognitif melalui nilai tinggi.

Kita boleh memberi acungan dua ibu jari atas kebijakan tersebut. Sebab menunjukkan BSNP melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan bangsa. Jika dilihat dari agenda UN sekitar caturwulan pertama 2011, eks-pose kebijakan ini relatif masih 'pagi'. Tentu saja akan memberi dampak maksimal bagi penyelenggaraan dan pencapaian prestasi UN tahun depan. Sebab memberi waktu pihak pemda untuk menyiapkan segala hal agar hasil maksimal.

Terlepas dari pro-kontra UN, realita yang harus kita terima bahwa pemerintah telah merancang UN untuk menjawab amanat undang-undang. Jika kita melihat pasal 57 ayat 1 UU Sisdiknas yang ditafsirkan oleh Pasal 63 ayat 1 PP 19 tahun 2005, berbunyi: penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas (1) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (2) penilaian hasil belajar oleh satuan

pendidik, dan (3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Maka secara tegas memberi peluang yang besar bagi guru, satuan pendidikan dan pemerintah (daerah) untuk evaluasi. Karut marut *urun rembug* untuk agenda UN - telah menimbulkan paradoks sebuah proses evaluasi. Muncul pro-kontra yang seolah memberi noktah hitam UN. Padahal pada saat yang bersamaan, seluruh peserta didik yang terkena agenda UN serius mempersiapkan diri. Sebenarnya, fenomena UN adalah agenda yang energik. Tentu saja, energi yang positif-mendorong murid sekolah dasar dan menengah untuk serius belajar. Belajar menempa diri dan belajar *fair* dievaluasi oleh pihak lain. *Analisis*

UN juga agenda energik bagi guru sebagai sosok yang harus kompeten. Guru secara integratif dituntut memiliki kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik dan kompetensi profesional. Jika guru hanya dianggap sebagai penyampai materi, maka siapa saja 'dapat' jadi guru. Namun ini menjadi sumber malapetaka pendidikan. *sebab at'bad*

Apakah UN harus dilanjutkan? Jika dirunut UN merupakan amanat UU, maka UN memang harus diselenggarakan. Meski, kita tidak perlu menutup mata pada perdebatan dan pemikiran yang solutif. Semua pihak perlu diajak memahami bahwa UN dapat digunakan sebagai *entry point* kompetensi peserta didik atas pelaksanaan proses sistem pendidikan.

Mari kita 'mengkritisi' UN dengan kepedulian yang tulus. Untuk berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan. Meskipun secara arif juga harus disadari bahwa UN bukan sebagai 'pertanggungjawaban' tugas-tugas pendidikan. Dunia pendidikan memang perlu dukungan konsisten dan komitmen dengan niat baik yang tulus dari semua pihak. □ - c

Analisis

KAMIS PAHING 21 OKTOBER 2010 (13 DULKALDAH 1443)

Tajuk Rencana

Berharap Banyak pada Kerja Sama DIY-Kyoto

TAHUN 2010 ini, genap seperempat abad usia kerja sama *sister province* antara Pemda DIY dengan Kyoto Prefecture, Jepang. Sebuah usia yang tak pendek bagi sebuah kerja sama yang bisa diwujudkan dalam aktivitas konkret yang berkelanjutan.

Memang, kerja sama yang dirintis 25 tahun yang lalu oleh Gubernur Kyoto, Hayashida Yukio dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono IX tersebut memiliki nilai strategis bagi kedua Pemerintah Daerah, dengan berbagai sektor kerja sama, seperti seni dan budaya, pariwisata, pendidikan, lingkungan, industri, iptek, serta perdagangan. Hampir setiap tahun kerja sama ini diisi dengan kegiatan dari kedua belah pihak. Sehingga, ketika Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X hadir sendiri pada peringatan 20 tahun dan 25 tahun kerja sama DIY-Kyoto tersebut, beberapa waktu lalu, makin meneguhkan obsesi jangka panjang dari sinergisitas tersebut.

Tak berlebihan kalau kemudian masyarakat DIY, khususnya para stakeholder berharap agar kerja sama sinergis DIY dan Kyoto tersebut dapat terasa lebih hidup dan berkesinambungan. Caranya, bisa dengan mengembangkan kerja sama G2G atau *government to government* menuju P2P atau *private to private*.

Untuk itu, sekiranya perlu dihidupkan kembali *joint committee* yang mengikutsertakan elemen *private* atau masyarakat, misalnya dalam bentuk *Joint Committee Business to Business / JC-B2B*, yang idealnya diprakarsai oleh kalangan

pelaku bisnis sendiri. Hal ini didasarkan fakta bahwa di pihak Kyoto sendiri benar-benar terpisah antara *government* dengan *business*.

Dengan demikian, mungkin perlu adanya peran *arranger* dari kedua belah pihak. Hal ini pula yang telah dilakukan oleh *International Business Council / IBC* dengan fasilitator *Japan-Indonesia Association Economic Cooperation / JIAEC*, yang telah 10 tahun lebih sukses dengan program pengiriman trainees ke Jepang. Ternyata, program ini mendapat respons bagus dari pihak Jepang. Bahkan, ada investor yang kemudian berminat investasi di Yogyakarta. Hal yang sama juga dilakukan dengan pihak Korea dan nanti dengan pihak asing lainnya. Misalnya, melalui IBC Australia, dan sebagainya.

Hanya sayangnya, ada kesan birokrat tak mau berbagi peran dengan swasta. Padahal, kita bisa mencontoh era tahun 1980-1990-an, ketika misi dagang selalu mengikutsertakan swasta, namun dengan sasaran yang jelas dengan sistem subsidi. Bahkan, dulu, ketika Sri Sultan HB X menjabat sebagai Ketua Umum Kadin DIY, bisa *full board* oleh Pemda DIY, dengan hasil yang konkret. Orientasinya jelas, bukan *cost*, namun *outcome*.

Apa pun, kerja sama DIY-Kyoto layak ditangkap dan diisi oleh semua pihak, khususnya kolaborasi antara birokrasi, praktisi dan akademisi. Tak berlebihan kalau kita semua, terutama warga Yogya, menaruh harapan yang besar pada kelangsungan kerja sama DIY-Kyoto ini. □ - c. *Arrellis Apriana*

JUMAT PON 22 OKTOBER 2010 (14 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana

Meneguhkan Komitmen Sukseskan Program KB

SEBANYAK 1.500 kader program Keluarga Berencana (KB) se-Kota Yogyakarta mengikuti Temu Kader KB di Gedung Wana Bhakti Yasa, Kamis (21/10) kemarin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggelorakan kembali pelaksanaan KB. Sekaligus meneguhkan komitmen Pemkot Yogyakarta dalam ikut menyukseskan program nasional yang selama satu dekade ini terbengkalai.

Keterbengkelaiannya itu, seperti dikemukakan Kasi Warga Sejahtera Kantor KB Kota Yogyakarta Tri Karyadi (KR 20/10), tersaksikan dari banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang tidak mengikuti KB. Jumlahnya meliputi 13.180 PUS dari seluruh 48.216 PUS yang ada di Kota Yogyakarta. Suatu angka yang relatif besar, karena di atas 30 persen.

Kantor KB Kota Yogyakarta menengarai, tingginya angka PUS yang tidak ber-KB itu antara lain disebabkan minimnya tenaga penyuluh KB. Dari 45 kelurahan yang ada, jumlah penyuluh KB hanya 33 orang — sehingga ada kalanya seorang penyuluh harus mengampu 2 kelurahan. Akibatnya kinerjanya tidak bisa maksimal, yang berdampak pada tingginya angka *unmet need* — banyaknya PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani.

Secara umum, selama hampir satu dekade di era reformasi, Program KB Nasional tidak lagi gegap gempita. Struktur pemerintahan yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menyebabkan program KB nyaris tak terdengar lagi. Desentralisasi, yang biasa diistilahkan dengan otonomi daerah (otda), membawa konsekuensi terjadinya pergeseran pusat kebijakan dan pengambil keputusan. Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerin-

tah Kota dan Pemerintah Kabupaten (Pemkot-Pemkab), sebagaimana tertuang dalam UU No 32 tahun 2004.

Seiring dengan adanya UU yang mengamanatkan sebagian kewenangan dan pembangunan — termasuk di dalamnya KB — diserahkan kepada Pemkot-Pemkab, menyebabkan Program KB menghadapi tantangan yang amat berat. Hal ini dikarenakan belum semua Pemkot-Pemkab mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama tentang arti penting dan strategisnya KB bagi pembangunan yang berkelanjutan. Program KB tidak lagi menjadi prioritas di lapangan.

Sejumlah besar Pemkot-Pemkab memandang dengan sebelah mata, yang tercermin dari lemahnya komitmen terhadap kelembagaan. Dari kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah KB (SK PDKB) yang ada, 80% lebih sudah diperdakan. Namun sebagian besar (65%) masih merger. Tidak berdiri utuh, tetapi digabung dengan instansi lain. Kondisi seperti ini jelas membahayakan pembangunan di bidang kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) dikhawatirkan menjadi tidak terkendali, sehingga terjadilah *baby boom*.

Kita mengapresiasi Temu Kader KB yang diselenggarakan Kantor KB Kota Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan sebagai langkah awal dalam menggelorakan kembali pelaksanaan Program KB di Kota Yogyakarta — yang di masa lalu, bersama 4 kabupaten lain se-DIY, mendapat predikat sebagai *show window* pelaksanaan Program KB Nasional. Sekaligus sebagai pertanda meningkat dan teguhnya komitmen (politik) Pemkot Yogyakarta dalam menyukseskan program kependudukan. □ - g. Analisis Manfe

SENIN LEGI 25 OKTOBER 2010 (17 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana

Memperbaiki Citra Polri yang Terpuruk

JANJI adalah utang yang harus dibayar atau dilunasi. Demikianlah, setelah Komjen Pol Timur Pradopo resmi menjabat Kapolri, ia dituntut menepati janjinya. Melaksanakan 10 program strategis yang dihidangkannya sebagai menu pokok sewaktu menjalani uji kelayakan, *fit and proper test*, di depan para anggota Komisi III DPR RI.

Kehadiran Timur Pradopo di pucuk pimpinan Polri, bagi sementara kalangan memang mengejutkan. Namanya baru disebut setelah berbagai pihak dan kalangan mengkritisi dua kandidat yang diajukan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, yakni Komjen Pol Imam Sujarwo dan Komjen Nanan Soekarna. Nama Timur Pradopo yang tengah menjabat Kapolda Metro Jaya tiba-tiba menyeruak atas usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terangkatnya nama Timur Pradopo sebagai kandidat Kapolri juga menuai kontroversi di tengah masyarakat. Terutama dari kalangan pegiat LSM peduli HAM. Timur Pradopo ditengarai dan dinilai bersinggungan langsung dengan sederet kasus HAM baik sewaktu menjabat Kapolres di wilayah Polda Metro Jaya, maupun saat menjadi Kapolda Metro Jaya. Kasus-kasus itulah yang kemudian dijadikan amunisi para anggota Komisi III DPR RI untuk 'membrendongnya'.

Mengantisipasi 'berondongan' itulah kiranya yang mengharuskan Timur Pradopo menyiapkan 10 menu pokok strategis sewaktu menjalani uji kelayakan. Nampaknya ia berhasil meyakinkan para anggota dewan yang terhormat, sehingga semua fraksi — meski ada yang menyertainya dengan

notasi — menyetujui menjadi Kapolri yang baru.

Sederet panjang tugas terbentang di hadapan Timur Pradopo menyusul pelantikannya sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat pekan lalu. Langkah pertama yang kemungkinan besar dilakukan adalah merestrukturisasi pimpinan badan dan lembaga di Mabes Polri, dengan menempatkan sosok-sosok terpercaya yang kapabel dan akseptabel. Restrukturisasi pimpinan ini sangat diperlukan dalam upaya menopang dan mendukung kinerjanya. Barulah kemudian berkinerja sesuai skala prioritas, menghidangkan menu demi menu yang terangkum dalam 10 program strategis yang dijanjikannya.

Masyarakat luas memang sangat mendambakan Timur Pradopo mampu memperbaiki citra Polri yang tengah terpuruk. Mengembalikan citra utamanya sebagai penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat. Sebagai penegak hukum, Polri dituntut bertindak proporsional dan rasional — bukan malah menjadi bagian dari masalah sebagai dampak dari salah langkah dan kebijakan yang aproposional dan irasional — seperti antara lain tersaksikan dari kasus rekening gendut para perwira tingginya. *analisis tujuan*

Sedang dalam kaitan dengan tugas pokoknya sebagai pengayom masyarakat, Polri dituntut mampu membersihkan citranya dengan benar-benar mampu menghadirkan rasa *ayom* dan *ayem*. Bukan malah menjadikan perorangan atau pihak yang meminta pengayoman sebagai objek, sehingga pameo 'melapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing' dapat terkikis. □ - k *analisis akhir*

SELASA PAHING 26 OKTOBER 2010 (18 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana *Keputusan Rakyat*

Segera, Evakuasi Warga Merapi

MASYARAKAT di sekitar kawasan Merapi kini harus bersiaga bila sewaktu-waktu gunung api teraktif di dunia ini meletus. Memang bukan sekali ini masyarakat harus siap-siap menghadapi bencana. Tujuannya jelas, jangan sampai ada korban jiwa. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Kegunungpian (BPPTK) mengindikasikan meletusnya Gunung Merapi tinggal menunggu waktu. Karena itu, Pemda harus menyiapkan segala sesuatunya guna memperkecil risiko bahaya letusan.

Peringatan yang disampaikan BPPTK ini tentu tak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk antisipasi agar tak timbul korban jiwa ketika Merapi benar-benar meletus. Meski dikatakan bahwa letusan tinggal menunggu waktu—antara lain didasarkan pada indikator gerakan magma yang makin mendekati permukaan puncak Merapi serta semakin banyaknya multiphase hingga 500 kali per hari—namun kapan waktunya, tak ada yang bisa memprediksi. Para ahli mengkhawatirkan bila letusan itu bersifat eksplosif, yang risiko bahayanya lebih tinggi ketimbang letusan biasa khas Merapi. Letusan khas Merapi yakni munculnya guguran lava dan tumbuhnya kubah lava yang diikuti awan panas atau sering disebut sebagai 'wedhus gembel'.

Menyusul naiknya status Merapi menjadi siaga dan kemarin pagi dinaikkan lagi menjadi awas, apakah Pemkab sudah mempersiapkan segala sesuatunya guna mengantisipasi terjadinya letusan? Sabtu kemarin memang telah digelar apel kesiapsiagaan yang melibatkan jajaran Muspida setempat. Berbagai langkah antisipasi nampaknya juga telah dilakukan, antara lain dengan menyiapkan barak pengungsian,

perbaikan jalur evakuasi beserta sarana dan prasarana penunjangnya serta sosialisasi dan peringatan dini bila terjadi letusan. Kini dengan dinaikannya status menjadi awas, evakuasi warga pun harus segera dilakukan.

Langkah antisipasi memang tak selalu sesuai harapan warga. Misalnya, langkah penutupan penambangan untuk sementara waktu, tak sepenuhnya diterima penambang. Sebagian penambang merasa keberatan lantaran pekerjaan menambang merupakan satu-satunya mata pencaharian hidup. Sampai kapan mereka berhenti menambang, belum bisa dipastikan.

Kita tentu mendukung upaya semacam itu, namun akan lebih bijak bila Pemkab juga memberi alternatif solusi agar para penambang bisa tetap bekerja di luar lokasi bahaya. Keselamatan nyawa manusia tentu harus diutamakan ketimbang aspek lainnya. *analisis Cara Partan*

Sedang terkait sosialisasi dan peringatan dini bahaya Merapi, nampaknya juga belum disebarluaskan secara optimal oleh Pemkab. Temuan di lapangan menunjukkan, baik guru maupun siswa SD Negeri 2 Kringjing, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang merasa takut bila Merapi benar-benar meletus. Mereka tak tahu harus berbuat apa, karena selama ini tak pernah mendapat sosialisasi seputar bagaimana cara menyelamatkan diri bila Merapi meletus.

Padahal, jarak sekolah mereka dengan Merapi hanya sekitar 6 kilometer. Karenanya, sosialisasi atau arahan dari Pemkab tak boleh ditunda-tunda, karena ini menyangkut nasib sekitar 88 siswa yang belajar di sekolah tersebut. Apalagi, tak ada yang bisa memastikan kapan tepatnya Merapi meletus. Lebih baik segera bertindak sebelum terlambat. □ - e.

RABU PON 27 OKTOBER 2010 (19 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana *Simulator Rakyat***Saatnya UN Lebih Pedagogis**

MASYARAKAT pendidikan negeri ini sudah pasti merespons positif rencana Panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat yang hendak merevisi pasal 71 dan pasal 72 pada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebab pada pasal-pasal itulah terletak dasar masalah munculnya kritik 'sisi negatif' pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selama ini. Diharapkan dengan selesainya revisi, UN akan makin sempurna sebagai salah satu agenda pendidikan Indonesia yang akan membawa membaiknya kualitas pendidikan.

Satu hal yang sangat krusial adalah upaya Panja untuk menolak hak veto UN dalam kelulusan siswa. UN tidak menjadi penentu mutlak kelulusan, meski dalam pasal 72 ada 4 syarat kelulusan yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memiliki nilai baik dalam moral dan kepribadian, lulus mata pelajaran iptek dan lulus UN.

Kita menunggu *entry point* apa yang hendak digunakan Panja untuk melakukan revisi atas pasal-pasal tersebut. Muara yang dituju, nampaknya sudah sangat jelas. Yakni agar UN tidak menjadi satu-satunya penentu final kelulusan siswa. Masyarakat berharap Panja mampu memposisikan diri dengan pijakan pedagogik yang ideal. Bukan pijakan politis. Sehingga ada kesadaran dasar bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah UN yang mampu membuat penyesuaian dengan perkembangan zaman. Tidak hanya berkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Akan tetapi juga aspek humanistik lainnya, seperti kearifan lokal dan moral, etika dan estetika.

Panja juga diharapkan mampu memformulasikan apa yang dimaksud oleh para kritikus pendidikan selama ini — khususnya tentang realita bahwa UN lebih menitikberatkan pada aspek kognisi. Artinya, inilah saatnya Panja harus mampu masuk

ke ranah afeksi yang selama ini 'ditiadakan'. Sebab sebenarnya pendidikan yang meninggalkan dan menanggalkan aspek afektif, hanya akan mendapat pelajaran capital tanpa membuahkan pendidikan yang pedagogis. Ini sesuai dengan 'santapan' sehari-hari pada pendidik, bahwa edukatif tidak sama dan sebangun dengan pedagogis.

Mumpung sedang proses revisi, masukan ini semoga diakomodasikan untuk keperluan masa datang yang sangat memerlukan pendidikan komprehensif meliputi kognisi, afeksi dan psikomotorik. Jika tiga pijakan yang mutlak sebagai fondasi bangunan pendidikan ini sudah disepakati - maka teknik ujian bisa dirumuskan sesuai dengan tujuan UN. Panja juga seharusnya menengok teori-teori ilmu pendidikan (pedagogis). Atau setidaknya, anggota Panja adalah orang yang memiliki bekal ilmu tersebut. Hal ini untuk mencegah kebijakan yang dihasilkan meleset lagi dari substansi pendidikan. Atau bahkan dibelokkan menjadi kebijakan politis. *Analisis & Kritik*

Setidaknya Panja juga mau memahami, bahwa pendidikan di Milenium III (abad 21) ini sudah bergeser jauh dari 'masa lalu' yang bertitik berat pada penguasaan isi ilmu pengetahuan seperti literatur, sejarah, sains dan lain-lain. Menuju paradigma baru yakni bertujuan agar siswa memiliki *skill* dan *ability* untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan isi ilmu pengetahuan - guna memecahkan masalah hidup untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Jika dulu konsep pendidikan bagaikan 'disuapi' oleh guru. Sekarang guru dan murid, harus *discovery* dan *inquiry*. Menemukan materi dan mendemonstrasikan melalui peralatan masakini yang notabene adalah multimedia.

Sesungguhnya, UN tidak hanya menjadi ujian bagi siswa. Akan tetapi sistem pendidikan negara kita. D - s

KAMIS WAGE 28 OKTOBER 2010 (20 DULKAIDAH 1943)

Tajuk Rencana

Uji Nyali di Jogja Export Expo

PAMERAN Akbar bertajuk Jogja Export Expo (JEE) kembali digelar, 27-31 Oktober 2010, di Jogja Expo Center/JEC. Pameran yang digelar setiap tahun ini menjadi ajang kompetisi produk inovatif kerajinan bernuansa ekspor. Dalam event ini pula, para perajin dan pengusaha selaku seller bertemu langsung dengan buyers. Dengan demikian, akan terjadi interaksi langsung yang sekaligus bisa menjadi ajang 'uji nyali' produk daerah dalam upaya menembus pasar ekspor.

Sebagaimana diketahui, pameran yang digelar oleh Pemerintah Provinsi DIY tahun 2010 ini merupakan putaran yang kelimabelas. Untuk tahun ini, Pemprov DIY, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY, berkolaborasi dengan Kadin DIY, Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) DIY serta organisasi lainnya. Terbukti, dari tahun ke tahun, pameran ini mendapat apresiasi yang bagus dari publik. Selalu muncul inovasi produk baru dalam pameran tersebut.

Di tengah kondisi perekonomian nasional yang sedang menggeliat sekarang ini, maka eksistensi produk kerajinan menjadi komoditas yang benar-benar diunggulkan, khususnya dalam mendukung kinerja ekspor non-migas. Secara nasional, kinerja ekspor terus dipacu, dan pemerintah secara konsisten dan terus-menerus melakukan langkah-langkah konkret dalam mendukung kebangkitan kembali ekspor kita, setelah dua tahun lalu dihempas dampak krisis finansial global.

Sehingga, sangat tepat tema yang dipatok untuk penyelenggaraan JEE tahun 2010 ini, yakni *Com-*

petitive Advantage To Global Market. Sungguh menantang, khususnya dalam menghadapi persaingan produk sejenis dari negara lain, khususnya China, dan beberapa negara tetangga kita di kawasan Asia, seperti Malaysia, Thailand, dan juga Vietnam.

Dengan memacu para pengusaha dan perajin kita untuk memiliki jiwa yang tangguh menghadapi kompetisi global, diharapkan akan muncul banyak pendatang baru, dengan semangat baru, inovasi baru, dan siap menghadapi tantangan baru.

Tak berlebihan istilah 'uji nyali' diberikan pada ajang gelar produk kerajinan di JEE tersebut. Karena, masing-masing stand dituntut untuk siap dengan segala kemungkinan, terkait dengan selera dan tuntutan pasar. Sebab, selama ini, ada kesan sebagian perajin dan pengusaha kita bersikap *ngirimu*, dan tak mampu mengangkat nilai dari harga jual produk yang mereka ciptakan dengan susah-payah.

Dibutuhkan keberanian dari pengusaha dan perajin kita untuk memasuki pasar global, dengan mengedepankan unggulan kompetitif. Predikat 'tahan banting' bisa saja diberikan kepada perajin dan pengusaha daerah ketika nantinya, usai JEE, akan mengikuti ajang pameran yang lebih besar lagi, Pameran Produk Ekspor. Namun demikian, keberanian untuk percaya diri menampilkan produk kita di kancan pameran akbar tersebut, sangat relevan.

Hanya dengan cara inilah, tujuan utama gelar pameran JEE ini bisa diwujudkan, yakni mempromosikan potensi produk unggulan yang dimiliki daerah.

andi su tujan, ca

SABTU LEGI 30 OKTOBER 2010 (22 DULKALDAH 1943)

Tajuk Rencana

Anatomi Gunung Berapi Perlu Diseksamai

DARI pengoperasian sistem peringatan dini jauh sebelum erupsi gunung Merapi, menunjukkan akurasi teknologi peralatan yang digunakan untuk memantau cukup canggih, sehingga mampu mendeteksi segala gejala di dalam perut Merapi. Hanya satu hal yang tak mudah terpantau, yakni saat magma menggelejak menyodok timbunan material di puncak Merapi. Dari pengoperasian peralatan berteknologi cukup canggih itu bisa dilakukan peringatan dini, karena para pakar gunung berapi dan petugas pengawasnya sangat mengenal karakteristik ancaman di suatu wilayah yang berada di kawasan rawan bencana. Selain itu bisa diperkirakan risiko bencana di suatu wilayah dengan melakukan analisis ancaman, analisis kerentanan dan sebagainya. Sehingga bisa menjadi acuan dalam mitigasi bencana, dan melalui kemajuan teknologi komunikasi saat ini bisa segera dirintis jaringan komunikasi di masyarakat untuk mengakses informasi-informasi aktual dari pemerintah maupun masyarakat tentang kondisi gunung api. Semuanya bertujuan mengurangi risiko korban jiwa.

☛ Pada letusan gunung Merapi tahun 1930 menghancurkan 13 desa, dan menewaskan 1.400 orang, dan ribuan luka berat, karena waktu itu belum ada teknologi untuk pemantauan gunung berapi. Sehingga tak memungkinkan adanya peringatan dini, dan warga menganggap gu-

nung Merapi baik-baik saja. Akibatnya, warga sekitar gunung Merapi tak tahu tingkat bahaya yang akan dihadapi, sehingga tak punya waktu untuk mengungsi karena tidak ada peringatan dini.

Berdasar pengoperasian peralatan berteknologi canggih dan analisis, bisa diperkirakan batas aman bagi semua orang jika suatu saat gunung meletus, karena dari berbagai kasus letusan gunung berapi di Indonesia, sejauh ini sistem peringatan dini bisa dikatakan sangat baik. Bahkan masyarakat semakin paham tentang anatomi gunung berapi dan dinamikanya. *Analisis*

Dengan kata lain, gerakan magma gunung berapi bisa terdeteksi, tapi tak bisa diprediksi saat meletusnya maupun arah gerakan material dan awan panas. Pada erupsi Merapi masa lalu, kawasan Kinahrejo selalu aman. Tapi kali ini dilanda awan panas, dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda. Sehingga bisa dikatakan perubahan anatomi gunung berapi bisa terjadi setiap saat. *Sebab ahli*

Manfaat teknologi dengan tenaga ahli yang menanganinya sudah terbukti sangat mengurangi korban jiwa, karena jauh sebelum erupsi bisa diketahui tingkat bahaya yang akan terjadi. Mengabaikan peringatan dini dari hasil pemantauan dengan peralatan teknologi canggih sangat berisiko. Menderita di tempat pengungsian beberapa minggu lebih baik ketimbang kehilangan nyawa. □ - c.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BIODATA PENULIS



Agus Mulyanto lahir di Brebes pada tanggal 26 Mei 1988. Menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 1994-2000 di Sekolah Dasar Negeri 1 Jatibarang, setelah itu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Jatibarang pada tahun 2000-2003 kemudian pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Jatibarang pada tahun 2003-2006. Pada tahun yang sama (2006) melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah (PBSID), Jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Gelar Sarjana Pendidikan diperoleh dengan penulisan skripsi yang berjudul “*Pola Pengembangan Paragraf dalam Tajuk Rencana Surat Kabar Kedaulatan Rakyat Edisi Oktober 2010*”.